BAMSOET PASTIKAN PPHN BISA DIHADIRKAN TANPA AMANDEMEN UUD

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

EDISI NO.08/TH.XVI/AGUSTUS 2022

POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

Panitia Ad Hoc Akan Rumuskan Bentuk Hukum PPHN

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 Refleksi
Perubahan Iklim dan PPHN untuk Ketahanan Pangan

18 Nasional
Bamsoet Dorong Perusahaan Pers Suarakan Narasi Kebangsaan

39 Selingan
Lewat JIM Mendamaikan Negara Tetangga

54 Sosialisasi
Sosialisasikan Empat Pilar di Puri Ageng Blahbatuh

77

PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2022

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

08 BERITA UTAMA
Pakok-Pokok Haluan Negara
Salah satu terobosan yang disampaikan Badan Pengkajian MPR adalah bentuk hukum PPHN dalam Ketetapan (Tap) MPR — tanpa harus melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945—adalah Konvensi Ketatanegaraan. Tindak lanjutnya, MPR akan membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas menyusun rumusan bentuk hukum PPHN, termasuk mengkaji lebih lanjut peluang digunakannya Konvensi Ketatanegaraan.

39 SELINGAN
Lewat JIM Mendamaikan Negara Tetangga

76 Profil
Mamberob Y. Rumakiek

Pengantar Redaksi 04
Perspektif 06
Kolom 34
Aspirasi Masyarakat 47
Gema Pancasila 48
Varia MPR 68
Wawancara 70
Figur 72
Ragam 74
Dari Rumah Kebangsaan 80
Rehal 82

16 Nasional
Bamsoet Pastikan PPHN Bisa Dihadirkan Tanpa Amandemen UUD

54 Sosialisasi
Sosialisasikan Empat Pilar di Puri Ageng Blahbatuh Bali

COVER
Edisi No.08/TH.XVI/Agustus 2022
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi

MPR Akan Bentuk Panitia Ad Hoc PPHN

UPAYA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) mengalami progres yang signifikan. Badan Pengkajian MPR sebagai alat kelengkapan MPR telah berhasil menyelesaikan tugas mengkaji lebih dalam soal substansi dan bentuk hukum PPHN. MPR periode 2019 – 2024 memang mendapat amanat sesuai rekomendasi MPR periode 2014 – 2019, yaitu melakukan pendalaman hasil kajian substansi dan bentuk hukum PPHN.

MPR periode 2014 – 2019 sebenarnya saat itu sudah memunculkan opsi bentuk hukum Ketetapan (Tap) MPR melalui amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Opsi ini disertai dengan catatan pandangan dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang membuka kemungkinan PPHN dalam bentuk UU. Sampai akhir masa jabatan MPR periode 2014 – 2019 belum ada keputusan soal bentuk hukum PPHN.

Sejak terbentuk bulan Oktober 2019, Badan Pengkajian MPR mulai bekerja dan berkomitmen menyelesaikan tugas yang diamanatkan Pimpinan MPR. Di tengah pandemi Covid-19, Badan Pengkajian MPR tetap melaksanakan beragam metode kajian, seperti rapat pembahasan, diskusi, seminar, *focus group discussion*, dan penyerapan aspirasi masyarakat serta kerja sama dengan perguruan tinggi, dengan melibatkan para pakar/ahli, praktisi, serta akademisi.

Hasilnya, setelah kurang lebih 2 tahun 9 bulan bekerja, Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan kajian terhadap substansi dan bentuk hukum PPHN. Hasil kajian itu dituangkan dalam dua berkas (paper), yaitu "Rancangan PPHN" dan "Kajian Bentuk Hukum PPHN". Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, pun sudah melaporkan hasil kerja Badan Pengkajian di depan peserta Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang berlangsung di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022.

Dalam Ragab dibahas secara serius soal bentuk hukum PPHN. Namun, setelah melihat situasi dan kondisi serta dinamika politik saat ini, semua sepakat untuk tidak melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945. Peluang PPHN masuk dalam konstitusi pun tertutup. Namun, Badan Pengkajian MPR membuat terobosan agar PPHN bisa diterima dan menjadi payung hukum bagi seluruh penyelenggara negara. Karena itu, bentuk hukum PPHN harus berada di atas UU. Bagaimana caranya?

Terobosan itu adalah membuat Ketetapan (Tap) MPR tanpa melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945, yakni melalui Konvensi Ketatanegaraan. Landasan atau dasar hukumnya adalah Pasal 100 ayat 2 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR. Pasal itu berbunyi "Ketetapan MPR merupakan keputusan MPR yang a) berisi hal yang bersifat pengaturan (*regeling*); b) mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar MPR; c) menggunakan nomor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sebagai tindak lanjut atas hasil Ragab, MPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk membentuk Panitia Ad Hoc pada awal September 2022. Panitia Ad Hoc merupakan alat kelengkapan MPR RI yang berwenang menyiapkan rancangan keputusan MPR RI. Panitia Ad Hoc bertugas menyusun rumusan bentuk hukum PPHN, termasuk mengkaji lebih lanjut peluang Konvensi Ketatanegaraan sebagai terobosan menghadirkan PPHN tanpa amendemen konstitusi. Dengan diaturnya keberadaan PPHN melalui Konvensi Ketatanegaraan maka posisi hukum PPHN sangat kuat karena berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 serta berada di atas undang-undang.

Memang masih terbuka berbagai kemungkinan pembahasan dalam Panitia Ad Hoc. Namun, MPR masa jabatan 2019 – 2024 tampaknya bertekad bulat menghadirkan PPHN pada periode ini. Sudah dua periode (MPR masa jabatan 2009 – 2014 dan MPR masa jabatan 2014 – 2019) hanya bisa menghasilkan rekomendasi untuk MPR periode berikutnya. Agaknya, MPR masa jabatan 2019 – 2024 tidak ingin mengulang dengan mengeluarkan rekomendasi yang sama untuk MPR masa jabatan 2024 – 2029. PPHN bisa menjadi legacy untuk MPR masa jabatan 2019 – 2024. Semoga. ❑

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PENANGGUNG JAWAB
Ma'ruf Cahyono
PEMIMPIN REDAKSI
Siti Fauziah
DEWAN REDAKSI
Yana Indrawan, Dyastasita, Heri Herawan, Maifrizal
REDAKTUR PELAKSANA
Budi Muliawan
KOORDINATOR REPORTASE
Ario Setiawan
REDAKTUR FOTO
Oni Arief Benyamin, Slamet Eko Suprayitno
REPORTER
Bayu Nugroho, Yenita Revi, Try Syilvani, Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta
FOTOGRAFER
Ahmad Suryana, Frinda, Restu, Suprianto, Faridz Rizky, Wira, Subhan
PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI
Cucu Riwayati
STAF DISTRIBUSI
Ati Oktafia, Anggun Permana, Achmad Farobi, Widya Permataningrum
SEKRETARIS REDAKSI
Djarot Widiarto
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238, 57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

MPR • RI
EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

77
PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

Perubahan Iklim dan PPHN untuk Ketahanan Pangan

POTENSI menurunnya produktivitas sektor pertanian tanaman pangan akibat perubahan iklim akan menghadirkan tantangan serius bagi masa depan generasi anak-cucu. Strategi negara-bangsa untuk merespons tantangan itu idealnya mulai dirumuskan dan disepakati sejak sekarang. Dan, demi konsistensi serta ketaatan penyelenggara pemerintahan, kesepakatan atas strategi pembangunan sektor pertanian tanaman pangan itu akan ditetapkan dalam Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN).

Karena berfungsi sebagai arah dasar pembangunan nasional, PPHN patut dan wajib memberi penekanan khusus tentang masa depan aspek ketahanan pangan negara-bangsa. Masalah ini perlu mendapat perhatian khusus, karena perubahan iklim dengan segala eksesnya berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional di masa depan.

Para ahli, termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), sudah membuat penelitian dan perkiraan tentang dampak perubahan iklim terhadap sektor tanaman pangan di dalam negeri. Penelitian itu mengingatkan semua elemen masyarakat bahwa akan terjadi penurunan produksi tanaman pangan akibat pola musim yang tak menentu. Karena banjir atau durasi kekeringan yang panjang, produksi tanaman pangan di Jawa berpotensi turun sekitar 5% pada 2025, dan 10% pada 2050.

Maka, PPHN harus menyikapi dan menetapkan masa depan ketahanan pangan nasional sebagai target negara-bangsa agar semua komponen bangsa peduli. Selain itu, aspek ketahanan pangan nasional di masa depan harus ditetapkan dalam PPHN agar setiap penyelenggaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, taat dan konsisten bekerja mewujudkan ketahanan pangan.

Ekses perubahan iklim tampak begitu nyata sepanjang dasawarsa terakhir ini. Ekses itu bahkan dirasakan pada hampir semua aspek kehidupan, dan merata di seluruh dunia. Ditandai oleh naiknya suhu permukaan bumi, perubahan iklim menyebabkan terjadinya kekacauan pola musim.

Pola musim yang sulit diprediksi tentu saja berdampak signifikan pada sektor pertanian tanaman pangan. Dari aspek kesuburan, daya dukung lahan terus menurun. Hasil penelitian para ahli juga menyebutkan bahwa dari aspek volume, ketersediaan air pun semakin berkurang dengan kualitas yang terus menurun. Gangguan pada sektor pertanian tanaman pangan bertambah dengan munculnya faktor perusak, seperti hama wereng batang cokelat.

Sebagaimana dijelaskan para ahli, hama wereng batang cokelat merupakan hama tanaman padi. Hama ini tumbuh-kembang pada lingkungan mikroklimat (iklim mikro) yang lembap. Salah satu penyebab kelembaban lingkungan adalah tingginya curah hujan pada periode kemarau.

Kecenderungan seperti itu mengakibatkan produktivitas sektor pertanian pun terus menurun dari waktu ke waktu. Bahkan, publik pun tentu sudah pernah menyimak pemberitaan tentang gagal panen yang dialami para petani tanaman pangan di beberapa daerah di dalam negeri. Upaya beradaptasi dengan coba mengubah musim tanam pun menjadi tidak mudah karena cuaca yang serba tak menentu itu.

Hancurnya sektor pertanian tanaman pangan akibat perubahan iklim sudah dialami Madagaskar, sebuah negara di Samudra Hindia yang berseberangan dengan pantai timur Benua Afrika. Tahun 2021 lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa Madagaskar menjadi negara pertama yang mengalami bencana kelaparan akibat perubahan iklim. Durasi kekeringan yang panjang menyebabkan sektor pertanian tanaman pangan di negara itu gagal panen.

Di dalam negeri, informasi tentang petani lokal yang gagal panen akhir-akhir ini pun sudah akrab di telinga sebagian masyarakat, karena contoh kasusnya tidak sedikit dan terjadi di banyak daerah. Misalnya, menjelang akhir 2021, sekitar 578,5 hektare lahan padi di empat daerah di Jambi gagal panen akibat curah hujan tinggi. Belum lama ini, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, ratusan hektare tanaman tomat dan cabai rusak karena tingginya curah hujan. Sudah barang tentu banyak petani gagal panen. Harga cabai yang mahal belakangan ini pun disebabkan banyak petani gagal panen.

Contoh kasus lain yang juga wajib dicermati adalah pengalaman komunitas petani kopi Gayo di Aceh yang mengalami penurunan

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

produktivitas sampai 30% akibat perubahan iklim. Beberapa tahun lalu, komunitas petani holtikultura di Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, juga mengalami gagal panen. Ratusan hektare lahan yang ditanami jagung, pare, kacang panjang, terung, cabai dan jenis holtikultara lainnya tidak bisa dipanen karena terendam banjir pasang air laut (Rob).

Fenomena kasus gagal panen yang terjadi di berbagai belahan dunia akibat perubahan iklim itu mendorong PBB mengingatkan komunitas global bahwa dunia sedang menghadapi potensi bencana akibat menurunnya volume pasokan bahan pangan. Setelah Madagaskar, PBB memperkirakan akan banyak bencana kelaparan yang kemudian berpotensi terjadi di tempat lain. Selain faktor perubahan iklim, komunitas petani saat ini juga mendapatkan tekanan pada biaya produksi akibat lonjakan harga pupuk dan energi.

Maka, dalam konteks masa depan ketahanan pangan negara-bangsa, Indonesia sejak sekarang harus merespons segala dampak atau ekses perubahan iklim terhadap sektor tanaman pangan. Jangan menunggu, karena tidak ada yang tahu apakah pola musim akan kembali seperti sebelumnya. Rumusan strategi dan program yang inovatif harus diupayakan secara berkelanjutatan.

Dan, karena persoalannya bermuara pada perubahan iklim dengan segala eksesnya, proses perencanaan dan strategi pembangunan sektor pertanian tanaman pangan idealnya dikerjakan bersama, lintas ilmu dan lintas sektor. Pendekatan seperti ini nyaris jadi kebutuhan mutlak, karena inti atau sumber masalahnya butuh kajian dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan untuk kemudian diintegrasikan dalam rencana program.

Masuk akal untuk mengasumsikan bahwa dalam proses perencanaan dan strategi pembangunan sektor pertanian tanaman pangan di masa kini dan nanti, Kementerian Pertanian tidak bisa lagi bekerja sendiri. Para ahli pertanian mau tak mau butuh informasi atau masukan dari disiplin ilmu lain. Maka, butuh sinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta para ahli klimatologi dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika).

Memang, fakta bahwa Indonesia tidak impor beras dalam tiga-empat tahun terakhir ini patutlah disyukuri . Namun, kemungkinan terburuk akibat perubahan iklim di tahun-tahun atau dekade mendatang tetap harus diantisipasi guna meminimalisir ekses perubahan iklim.

Generasi orang tua masa kini harus harus melakukan sesuatu untuk setidaknya meringankan beban tantangan yang akan dihadapi generasi anak-cucu pada dekade-dekade mendatang. Untuk alasan itulah MPR RI menetapkan aspek masa depan ketahanan pangan nasional dalam PPHN sebagai kewajiban yang harus dikerjakan dan dijaga oleh setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

PPHN akan mendorong pemerintah untuk segera memulai langkah atau program-program kekinian yang dapat meminimalisir dampak perubahan iklim. Misalnya, PPHN akan mewajibkan pemerintah pusat maupun daerah konsisten merawat dan melindungi kemurnian hutan, mengurangi penggunaan zat kimia berbahaya dalam usaha pertanian dan menggunakan bahan nabati untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. ❑

Pokok-Pokok Haluan Negara

Panitia Ad Hoc Akan Rumuskan Bentuk Hukum PPHN

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Salah satu terobosan yang disampaikan Badan Pengkajian MPR adalah bentuk hukum PPHN dalam Ketetapan (Tap) MPR — tanpa harus melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945—adalah Konvensi Ketatanegaraan. Tindak lanjutnya, MPR akan membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas menyusun rumusan bentuk hukum PPHN, termasuk mengkaji lebih lanjut peluang digunakannya Konvensi Ketatanegaraan.

PIMPINAN Badan Pengkajian MPR bisa bernafas lega. Pasalnya, sebagai alat kelengkapan MPR, Badan Pengkajian telah menyelesaikan dan menuntaskan tugas yang diamanatkan oleh Pimpinan MPR untuk mengkaji lebih mendalam substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum PPHN, Badan Pengkajian MPR bekerja tidak hanya setahun dua tahun, tetapi sudah bertahun-tahun. Gagasan untuk menghidupkan kembali haluan negara sebenarnya sudah muncul sejak masa jabatan MPR periode 2009 – 2014.

Dari gagasan itu, MPR masa jabatan 2009 – 2014 kemudian merekomendasikan kepada MPR masa jabatan 2014 – 2019 untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara. MPR masa jabatan 2014 – 2019 pun melakukan serangkaian kajian, *seminar, focus group discussion*, dengan kalangan perguruan tinggi. Namun, sampai akhir masa jabatan 2014 – 2019 masih tersisa persoalan terkait dengan substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Untuk itu MPR masa jabatan 2019 – 2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian berkenaan dengan substansi dan bentuk hukum PPHN. Pada waktu itu sudah muncul opsi bentuk hukum Ketetapan (Tap) MPR dengan amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Namun, ada catatan pandangan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa PPHN dimungkinan dalam bentuk undang-undang.

Kini Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan tugasnya mengkaji substansi dan bentuk hukum PPHN. Hasilnya berupa dua berkas, yaitu "Rancangan PPHN" dan "Kajian Bentuk Hukum PPHN". Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, pun telah melaporkan hasil kerja Badan Pengkajian MPR terkait PPHN di depan peserta Rapat Gabungan Pimpinan MPR dan Kelompok DPD pada Senin, 25 Juli 2022, di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta. Bersamaan dengan Ragab, Djarot Saiful Hidayat menyerahkan dua berkas hasil kajian Badan Pengkajian MPR terkait PPHN.

Rapat Gabungan (Ragab) dipimpin Ketua MPR, Bambang Soesatyo, didampingi para Wakil Ketua, yaitu: Ahmad Basarah, Yandri Susanto, dan Arsul Sani, serta Lestari Moerdijat yang mengikuti secara virtual. Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, di antaranya Tb. Hasanuddin (PDI Perjuangan), Sodik Mujahid (Partai Gerindra), Idris Laena (Partai Golkar), Neng Eem Marhamah (PKB), Benny K. Harman (Partai Demokrat), Tiffatul Sembiring (PKS), Jon Erizal (PAN), M. Iqbal (PPP),

dan Tamsil Linrung (Kelompok DPD).

Ragab juga diikuti Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat. "Alhamdulillah, laporan hasil kajian Badan Pengkajian MPR sudah diterima dengan baik oleh peserta Ragab. Jadi, tugas Badan Pengkajian MPR merumuskan dan mengkaji substansi dan bentuk hukum PPHN sudah selesai," kata Djarot Saiful Hidayat usai Ragab.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meng-apresiasi hasil kerja Badan Pengkajiaan MPR. "Kami menyampaikan apresiasi kepada segenap Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian, yang meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan di tengah pandemi Covid-19, tetap berkomitmen melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan, selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan (sejak dibentuk pada bulan Oktober 2019). Badan Pengkajian telah melaksanakan beragam metode kajian, baik berupa rapat-rapat pembahasan, diskusi, seminar, *focus group discussion*, dan penyerapan aspirasi masyarakat serta kerja sama dengan perguruan tinggi, dengan melibatkan para pakar / ahli, praktisi, serta akademisi," katanya.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan. Syarief Hasan mengapresiasi kerja Badan Pengkajian MPR yang telah menuntaskan kajian mendalam terkait PPHN, khususnya mengenai substansi atau materi dan bentuk hukum PPHN. "Saya sangat mengepresiasi Badan Pengkajian MPR. Dengan demikian MPR periode 2019 – 2024 sebenarnya sudah menyelesaikan amanat rekomendasi MPR periode sebelumnya, yaitu MPR periode 2009 – 2014 dan MPR periode 2014 – 2019," katanya kepada *Majelis*.

Djarot Saiful Hidayat

Substansi dan Bentuk Hukum

Usai Ragab, Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, substansi PPHN berisi tentang hal-hal yang bersifat filosofi, kebijakan, memberikan arah, dan *directive*, serta menjadi *blue print* soal pembangunan Indonesia ke depan. Substansi PPHN ini didasarkan visi dan misi negara yang ada pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Visi tersebut adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. "Maka bahasanya adalah bahasa garis-garis besar. Mau dibawa kemana negara ini ke depan? Bagaimana mencapai visi dan misi Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945," terang politisi PDI Perjuangan ini.

Badan Pengkajian MPR, lanjut Djarot,

menerjemahkan visi dan misi itu dalam tiga ranah bidang pembangunan yang utama, yaitu: pembangunan karakter dan kualitas manusia Indonesia, pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan (lihat bagian kedua, "Inilah Substansi dan Materi PPHN"). "Karena PPHN ini hanya menyangkut garis-garis besar saja maka akan membawa konsekuensi apa bentuk dan dasar hukumnya. Kalau bahasa PPHN seperti itu maka di mana PPHN itu harus ditempatkan?" katanya.

Dari hasil kajian Badan Pengkajian MPR, lanjut Djarot, maka ada beberapa macam pilihan atau opsi bentuk hukum. Pertama, PPHN dimasukkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945. Artinya, perlu dilakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945. Kedua, dalam bentuk Ketetapan (Tap) MPR. Caranya, melalui amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. Cara lain adalah Tap MPR tanpa melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu MPR mengeluarkan keputusan MPR dalam bentuk Ketetapan MPR tentang PPHN sebagai Konvensi Ketatanegaraan.

Ketiga, mengatur PPHN dengan undang-undang (UU). Namun, karena bahasa substansi dan materi PPHN adalah garis-garis besar, lebih filosofis dan *directive* maka tidak cocok untuk menjadi UU yang lebih bersifat teknokratis. Oleh karena itu, opsi PPHN diatur dengan UU perlu juga dikaji lagi.

"Melihat situasi sosial politik saat ini, Badan Pengkajian MPR, baik pimpinan maupun anggota badan, menyepakati untuk tidak melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945. Kita menolak pilihan memasukkan PPHN ke dalam UUD NRI Tahun 1945. Kita juga tidak mengambil jalan amandemen terbatas. Kalau dilakukan amendemen UUD saat ini maka seperti membuka kotak pandora. Berbagai kepentingan bisa masuk. Karena itu kita tutup peluang amendemen UUD NRI Tahun 1945," papar Djarot.

Namun, Djarot mengakui perlu terobosan supaya PPHN bisa diterima dan menjadi payung bagi seluruh penyelenggara negara, bukan hanya presiden tetapi juga lembaga-lembaga tinggi negara. Karena itu, bentuk hukum PPHN harus dalam posisi di atas UU. "Semua opsi dan pilihan bentuk hukum PPHN itu akan menjadi bahan kajian dan pembahasan di Panitia Ad Hoc. Bagaimana kalau dengan bentuk Konvensi Ketata-negaraan, atau bagaimana dalam bentuk UU? Nanti biar Panitia Ad Hoc yang mengambil keputusan," tuturnya.

Terkait dengan kesepakatan Badan Pengkajian MPR untuk tidak melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945, Syarief Hasan juga mengapresiasi Badan Pengkajian MPR yang mampu menangkap dan membaca keinginan masyarakat, yaitu tidak menghendaki adanya amendemen UUD NRI Tahun 1945. "Banyak masukan masyarakat, terutama kalangan akademisi, bahwa jika dilakukan amendemen UUD maka ada kekhawatiran menjadi bias karena faktor

Sjarifuddin Hasan

kepentingan di luar haluan negara. Mereka menilai amendemen UUD NRI Tahun 1945 tidak urgen untuk saat ini," katanya.

Fraksi Demokrat sendiri, lanjut Syarief Hasan, sudah sejak awal menolak opsi amendemen UUD NRI Tahun 1945. "Sebab, amendemen itu berpotensi ke mana-mana, antara lain soal masa jabatan dan periodesasi presiden, tupoksi DPD, hingga kedudukan MPR. Ini semua bisa memengaruhi sistem ketatanegaraan kita," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, Syarief Hasan menyebutkan, Badan Pengkajian MPR menyampaikan opsi bentuk hukum PPHN diatur melalui Ketetapan (Tap) MPR tanpa melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu dalam bentuk Konvensi Ketatanegaraan. "Menurut hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR, bentuk hukum yang paling memungkinkan adalah melalui Konvensi Ketatanegaraan," sebutnya.

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tb. Hasanuddin mengungkapkan, Ragab yang menghadirkan Ketua Badan Pengkajian MPR ini memang membahas hasil kajian terkait PPHN yang telah dilaporkan Badan Pengkajian. Ragab membahas secara serius soal dasar hukum PPHN, apakah dimasukkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan konsekuensi amendemen UUD, melalui undang-undang (UU), atau melalui Ketetapan (Tap) MPR, dan dalam bentuk Konvensi Ketatanegaraan.

Menilai situasi dan kondisi saat ini, Tb. Hasanuddin menyebutkan sangat tidak tepat untuk melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai upaya menjadikan UUD sebagai dasar hukum PPHN. Bentuk hukum PPHN dalam UUD NRI Tahun 1945 memang lebih kuat dan mengikat, namun "timing"-nya saat ini kurang tepat. "Menurut Fraksi kami, kalau bentuk hukumnya melalui UUD NRI Tahun 1945 timingnya tidak tepat. Memang bila melalui amendemen UUD maka kedudukan PPHN lebih kuat dan mengikat, tetapi sekali lagi, kami melihat timingnya belum tepat sekarang ini," katanya kepada *Majelis*.

Sikap Fraksi PDI Perjuangan, kata anggota Komisi I DPR itu, lebih memilih untuk menunggu hasil pembahasan di Panitia Ad Hoc. Sebab, Panitia Ad Hoc akan membahas dan mengkaji lebih jauh soal pilihan bentuk hukum PPHN. Setelah melakukan pembahasan dan kajian, Panitia Ad Hoc juga akan mengambil keputusan. "Intinya fraksi kami menyerahkan kepada Panitia Ad Hoc, bagaimana sebaiknya dasar hukum PPHN itu," ujarnya.

Sikap Fraksi Partai Golkar agak berbeda. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Idris Laena, sepakat bahwa pada dasarnya hampir semua fraksi dan kelompok DPD dapat memahami pentingnya PPHN. Namun, persoalannya, ketika berbicara tentang produk hukum yang akan menjadi landasan PPHN maka muncul perdebatan yang berkepanjangan. "Jika harus dimasukkan dalam substansi UUD atau ditetapkan dengan Ketetapan (Tap) MPR maka akan ada konsekuensi amendemen terhadap UUD NRI

Tahun 1945. Padahal kita menghadapi tahun-tahun politik ke depan. Maka, sangat tidak populis dan akan menghadapi banyak tantangan, karena begitu sarat dengan kepentingan politik," katanya kepada *Majelis*.

Salah satu terobosan yang disampaikan Badan Pengkajian MPR adalah bentuk hukum PPHN dalam Ketetapan (Tap) MPR tanpa harus melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu Konvensi Ketatanegaraan. Fraksi Partai Golkar MPR dengan tegas menolak bentuk Konvensi Ketatanegaraan untuk PPHN. Sebab, Konvensi Ketatanegaraan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap lembaga negara lainnya, apalagi untuk mengikat seluruh warga negara Indonesia.

"Kalau Konvensi Ketatanegaraan yang dijadikan contoh adalah Sidang Tahunan MPR setiap tanggal 16 Agustus yang setiap tahun dilaksanakan tanpa diatur oleh konstitusi, tentu saja berbeda karena pidato tahunan itu bukan produk hukum," jelasnya.

Menurut Idris Laena, tradisi pidato sidang tahunan sudah dilakukan pada saat MPR menjadi lembaga tertinggi dan pelaksana kedaulatan rakyat, seperti diatur dalam UUD 1945 sebelum diamendemen. Kala itu, sesuai UUD 1945, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Namun, sejak amendemen konstitusi, MPR sudah tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, karenanya saat ini kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.

Badan Pengkajian MPR menjadikan Pasal 99 dan Pasal 100 Tata Tertib MPR sebagai landasan produk hukum PPHN. Idris Laena berpendapat, pasal dalam Tata Tertib MPR itu pasti akan menjadi perdebatan panjang di masyarakat. Pasalnya, Tata Tertib masing-masing lembaga hanya mengikat ke dalam dan bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Idris Laena memastikan Fraksi Partai Golkar akan menolak wacana menghadirkan PPHN dengan landasan hukum yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan. "Sesungguhnya jika PPHN dibuat dengan undang-undang sebagai landasan hukumnya maka akan lebih baik karena undang-undang lebih mengikat sebagai produk hukum, dan sekaligus dapat menggantikan Undang-Undang RPJPM yang akan segera berakhir," ujarnya.

Tb. Hasanuddin

Panitia Ad Hoc

Usai Ragab, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan Ragab Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang juga diikuti Pimpinan Badan Pengkajian MPR menyepakati pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menindaklanjuti hasil kajian Badan Pengkajian MPR berupa rancangan substansi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) dan bentuk hukum PPHN.

"Ragab Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD menyatakan, dapat menerima laporan Badan Pengkajian yang telah menyelesaikan tugas melakukan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Ragab juga sepakat untuk menindaklanjuti hasil kajian Badan Pengkajian MPR dengan membentuk Panitia Ad Hoc," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo.

Idris Laena

Pembentukan Panitia Ad Hoc diatur dalam Peraturan MPR No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR Pasal 34 sampai Pasal 40. Dalam Pasal 34 disebutkan, "Panitia Ad Hoc merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk oleh MPR dalam Sidang Paripurna MPR untuk melaksanakan tugas tertentu yang diperlukan". Sedangkan dalam Pasal 36 disebutkan, "Panitia Ad Hoc terdiri atas Pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD MPR".

Bamsoet mengungkapkan, Sidang Paripuran MPR untuk pembentukan Panitia Ad Hoc direncanakan pada awal atau pertengahan September 2022. Sedangkan rancangan komposisi Panitia Ad Hoc, terdiri dari pimpinan MPR ditambah 45 anggota secara proporsional dari fraksi dan kelompok DPD. Komposisi keanggotaan Panitia Ad Hoc adalah pimpinan MPR 10 orang, fraksi PDI Perjuangan 8 orang, fraksi Partai Golkar 5 orang, fraksi Partai Gerindra 5 orang, Fraksi Partai Nasdem 4 orang, Fraksi PKB 4 orang, Fraksi Partai Demokrat 3 orang, Fraksi PKS 3 orang, Fraksi PAN 3 orang, Fraksi PPP 1 orang, dan Kelompok DPD 9 orang.

"Panitia Ad Hoc bertugas menyusun rumusan bentuk hukum PPHN, termasuk mengkaji lebih lanjut peluang digunakannya Konvensi Ketatanegaraan sebagai terobosan menghadirkan PPHN tanpa amendemen konstitusi," katanya. Terkait Konvensi Ketatanegaraan, Badan Pengkajian MPR berlandaskan pada argumentasi atau dasar hukum Pasal 100 ayat 2 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI.

Pasal 100 ayat 2 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI berbunyi: "Ketetapan MPR merupakan keputusan MPR yang: a. berisi hal yang bersifat pengaturan (regeling); b. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar MPR; c. menggunakan nomor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ❑

DER/BSC

Inilah Substansi Pokok Pokok Haluan Negara

Substansi PPHN disusun dengan menggunakan paradigma Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai kerangka operasional dalam pembangunan tiga ranah kehidupan bangsa, yaitu pembangunan karakter dan kualitas manusia, pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan, dan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BADAN Pengkajian MPR telah menyelesaikan tugas melakukan kajian secara mendalam terhadap substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Laporan hasil pembahasan dan temuan Badan Pengkajian tersebut telah disampaikan dan dilaporkan dalam Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi serta Kelompok DPD di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 25 Juli 2022. Hasil pembahasan dan temuan Badan Pengkajian terkait dengan substansi (isi) PPHN dan pilihan bentuk hukum PPHN.

"Alhamdulillah (laporan hasil Badan Pengkajian MPR) sudah diterima (Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi serta Kelompok DPD). Jadi, tugas dari Badan Pengkajian untuk merumuskan atau mengkaji substansi dan pilihan bentuk hukum PPHN seperti ditugaskan dari Pimpinan MPR sudah selesai," kata Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, usai Rapat Gabungan. Ketua MPR Bambang Soesatyo pun mengungkapkan, salah satu putusan Ragab adalah Pimpinan MPR telah menerima hasil kajian terkait PPHN yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR.

Bagaimana substansi PPHN itu? Apakah sama seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru? Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan bahwa substansi PPHN hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari UUD NRI Tahun 1945. Sebab, PPHN memiliki tujuan memberikan arah kebijakan. Substansi PPHN ini disusun dengan menggunakan paradigma Pancasila dan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945.

"PPHN ini lebih bersifat *directive*, memberikan *blue print* arah kita ke depan, maka bahasanya adalah bahasa yang garis-garis besar, mau ke mana negara ini dibawa? Kemudian (PPHN) itu didasarkan pada visi misis negara. Visi misi negara itu ada di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Visi dan misi bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah visi terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun misi bangsa, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk itu perlu ada peta jalan pembangunan yang bisa menjamin kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi bangsa yang berdasarkan Pancasila. Pancasila menjadi landasan ideologi kerja yang dapat memberikan *framework* (panduan dan haluan) yang memudahkan perumusan prioritas pembangunan, pencanganan program kerja, serta pilihan kebijakan dalam kerangka membuat ketahanan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Tiga Ranah

Dalam kaitan itu, substansi PPHN disusun dengan menggunakan paradigma Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai kerangka operasional dalam pembangunan tiga ranah kehidupan bangsa. *Pertama*, pembangunan karakter dan kualitas manusia meliputi mental ideologi, agama, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta komunikasi dan informasi. *Kedua*, pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan meliputi politik dalam negeri, politik luar negeri, hukum, reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pertahanan dan keamanan. *Ketiga,* pembangunan ekonomi dan kesejahteraan meliputi pembangunan ekonomi, kependudukan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Ketiga ranah tersebut saling terkait dan berinter-relasi satu sama lain. Apabila diibaratkan sebagai pohon maka pembangunan karakter dan kualitas manusia adalah akarnya, yang menjadi fondasi dan memberi energi ke ranah lainnya. Pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan ibarat batang yang menjadi inti dari sebuah pohon, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan ibarat bunga dan buah yang memberikan manfaat bagi kehidupan.

Pembangunan karakter dan kualitas

manusia diarahkan untuk mengembangkan masyarakat religius yang berperikemanusiaan, egaliter (kesetaraan), mandiri, amanah (berintegrasi), beretos kerja positif dan kreatif, serta sanggup berkolaborasi dan menjalin persatuan (gotong royong) dengan semangat pelayanan dan keadilan.

Untuk itu, Pancasila perlu terus dimantapkan sebagai dasar dan ideologi negara dengan meningkatkan taraf keyakinan, penghayatan, pengetahuan, dan pengamalan Pancasila di kalangan aparatur negara dan warga negara. Selain itu, Pancasila harus dijadikan sebagai norma hukum dan norma etika yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan.

Indonesia juga perlu meneguhkan sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Agama menjadi landasan etika dan spiritual dalam penyelenggaraan negara dan segala peraturan perundang-undangan, serta berbagai kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan moral agama-agama.

Sedangkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul maka pendidikan perlu memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi, disertai dengan penguatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta mampu membaca perkembangan zaman, inovatif, dan kreatif. Upaya ini perlu diikuti dengan penguatan kualitas tenaga pendidikan, optimalisasi anggaran pendidikan, dan optimalisasi digitalisasi dalam dunia pendidikan.

Pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat berlandaskan Pancasila di mana tatanan sosial-politik yang hendak dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan. Semua diletakkan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang berdasarkan prinsip nomokrasi, negara persatuan (yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan), serta negara keadilan (negara kesejahteraaan).

Semua itu termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara, meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir dari revolusi Indonesia dengan jalan memadukan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi melalui pengembangan dan pengintegrasian pranata kebijakan ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan, terutama di bidang ekonomi, kesehatan, kependudukan, dan lingkungan hidup.

Untuk itu pemerataan pembangunan sangat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan mencakup penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, pemerataan daerah, serta pemerataan infrastruktur yang penting bagi pemerataan secara menyeluruh.

Itulah gambaran singkat arah pembangunan di tiga ranah kehidupan bangsa. PPHN sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta acuan dalam penyusuan haluan pembangunan nasional disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
- A. Dasar Pemikiran
- B. Pengertian
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Landasan
- E. Sistematika

Bab II : Kondisi Umum

Bab III : Visi dan Misi

Bab IV : Arah Kebijakan
- A. Pembangunan Karakter dan Kualitas Manusia
- B. Pembangunan Kelembagaan Sosial-Politik dan Tata Kelola Pemerintahan
- C. Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

Bab V : Kaidah Pelaksanaan

Bab VI : Penutup

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan Wakil Ketua MPR RI

Koonvensi Ketatanegaraan, Bentuk Hukum PPHN yang Paling Mungkin

GAGASAN mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bukanlah tiba-tiba muncul saat ini saja. Gagasan PPHN sudah melewati dua periode keanggotaan MPR, yaitu MPR masa jabatan 2009 – 2014 dan MPR masa jabatan 2014 – 2019. Dua periode masa jabatan itu mengeluarkan rekomendasi mengenai perlunya reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan PPHN.

MPR membentuk Badan Pengkajian untuk melakukan kajian mengenai reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Setelah dua periode itu, baru pada periode ini Badan Pengkajian bisa menuntaskan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan tugasnya melakukan kajian dengan hasil berupa rancanan PPHN dan kajian bentuk hukum. Dengan selesainya tugas Badan Pengkajian ini maka MPR periode 2019 – 2024 diharapkan bisa merealisasikan PPHN.

Untuk mengetahui lebih jauh pembahasan PPHN ini, *Majelis* mewawancarai Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan. Berikut penuturan Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, Wakil Ketua MPR yang membawahi Badan Pengkajian MPR. Petikannya.

Sejauh ini bagaimana perkembangan pembahasan PPHN di Badan Pengkajian MPR?

Badan Pengkajian MPR memang sudah melakukan kajian mendalam terkait PPHN. Hasil kajian Badan Pengkajian MPR mengenai substansi atau materi dan bentuk hukum PPHN sudah diserahkan kepada Pimpinan MPR. Saya sangat mengapresiasi Badan Pengkajian MPR yang telah menyelesaikan dan menuntaskan tugas utamanya melakukan kajian tentang PPHN. Belakangan ini, PPHN menjadi wacana strategis dan hangat dibicarakan di tengah masyarakat ketika dikaitkan dengan amendemen UUD NRI Tahun 1945. Dengan selesainya Badan Pengkajian MPR melakukan kajian terhadap PPHN maka MPR periode 2019 – 2024 sebenarnya sudah menyelesaikan amanat rekomendasi MPR periode sebelumnya, yaitu MPR periode 2009 – 2014 dan MPR periode 2014 – 2019.

Badan Pengkajian telah menyelesaikan tugasnya mengkaji substansi (materi) dan bentuk hukum PPHN. Bagaimana dengan substansi PPHN itu sendiri?

Substansi PPHN adalah perencanaan pembangunan nasional yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Dalam Rapim MPR sudah diputuskan bahwa PPHN yang mengatur arah pembangunan secara filosofis akan ditetapkan dengan Ketetapan MPR (Tap MPR), sedangkan teknisnya akan diatur melalui undang-undang. Perjalanan ini masih panjang. Nanti masih dilakukan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD. Kemudian membentuk Panitia Ad Hoc, kemudian menyelenggarakan sidang paripurna. Jadi memang semua belum final.

Tentu masyarakat masih bisa memberikan masukan terhadap substansi PPHN, karena PPHN ini adalah untuk kepentingan rakyat. Kajian yang dilakukan Badan Pengkajian MPR terhadap PPHN ini juga berdasarkan masukan dari masyarakat. Saya sendiri sering turun ke bawah bertemu dengan masyarakat untuk meminta masukan tentang PPHN ini. Memang, MPR menyusun substansi PPHN, tapi kita lihat nanti perkembangan pembahasan setelah Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD.

Lalu, bagaimana dengan kajian bentuk hukum PPHN? Selama ini ada tiga opsi, yaitu diatur dalam UUD NRI Tahun 1945; kedua, diatur dengan Ketetapan MPR; dan ketiga melalui undang-undang. Bagaimana sekarang kecenderungannya?

Kami juga mengapresiasi Badan Pengkajian MPR karena mampu membaca keinginan masyarakat terkait bentuk hukum PPHN yang menjadi polemik dan perdebatan di tengah masyarakat, terutama soal amendemen UUD NRI Tahun 1945. Dari banyak masukan masyarakat, di antaranya dari kalangan akademisi di perguruan tinggi, bahwa jika dipilih opsi bentuk hukum PPHN yang diatur dalam UUD maka pasti akan melalui amendemen UUD. (Langkah amandemen) Ini yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, karena takut bias akibat faktor kepentingan di luar haluan negara.

Oleh karena itu, Badan Pengkajian MPR menetapkan PPHN hanya diatur melalui Ketetapan MPR, yaitu dengan konvensi ketatanegaraan. Menurut hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR, bentuk hukum yang paling memungkinkan adalah melalui konvensi ketatanegaraan.

Jadi, pintu amandemen UUD NRI Tahun 1945 sudah benar-benar tertutup?

Kami Pimpinana MPR dan Badan Pengkajian MPR telah mengkaji terkait polemik amendemen UUD NRI Tahun 1945 yang membuat suhu politik Indonesia menjadi meningkat. Berbagai elemen bangsa Indonesia, termasuk para akademisi, melihat ada potensi perubahan yang berlebihan apabila dilakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945. Kami telah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dan kalangan akademisi yang mengkhawatirkan amendemen UUD NRI Tahun 1945. Mereka memandang bahwa amendemen bukan sesuatu yang urgen dilakukan saat ini.

Sejak awal, kami di Fraksi Partai Demokrat sendiri sudah menolak opsi amendemen UUD NRI Tahun 1945. Sebab, amendemen itu berpotensi kemana-mana, antara lain soal masa jabatan dan periodesasi presiden, tupoksi DPD, hingga kedudukan MPR yang bisa mempengaruhi sistem ketatanegaraan kita.

Bagaimana kelanjutannya setelah Badan Pengkajian MPR menyelesaikan tugasnya melakukan kajian dengan hasil berupa rancangan PPHN dan kajian bentuk hukum PPHN?

Pimpinan MPR akan menggelar Rapat Gabungan dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD. Dalam Ragab itu, Badan Pengkajian MPR akan melaporkan dan menyampaikan hasil kajian terkait dengan substansi dan produk hukum PPHN. Tentu akan ada masukan dan pemikiran dalam Ragab. Dalam Ragab itulah diputuskan tindak lanjut dari laporan Badan Pengkajian MPR. Langkah berikutnya setelah hasil laporan dan kajian Badan Pengkajian MPR diterima, maka perlu dibentuk Panitia Ad Hoc (PAH).

Apa yang menjadi tugas dari Panitia Ad Hoc?

Tentu Panitia Ad Hoc itu dibentuk untuk menindaklanjuti hasil kajian tentang PPHN, terutama soal rancangan substansi dan bentuk hukum PPHN. Pimpinan MPR perlu menggelar Sidang Paripurna MPR untuk memutuskan pembentukan Panitia Ad Hoc tersebut. Sebab, sesuai dengan Tata Tertib MPR, pembentukan Panitia Ad Hoc harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota MPR.

Sepertinya upaya untuk menghadirkan PPHN sudah semakin dekat. Apakah PPHN bisa terealisir pada tahun ini?

Berbicara tentang PPHN adalah bicara soal haluan negara dan pembangunan nasional. Indonesia membutuhkan satu konsep perencanaan pembangunan nasional untuk membangun Indonesia. Bukan untuk saat ini saja, tetapi pembangunan di masa depan. Untuk membangun Indonesia ke depan dibutuhkan komitmen bersama. Sebab, pembangunan nasional adalah kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

Haluan negara dibutuhkan oleh negara dan akan lebih banyak dampak positifnya dengan adanya haluan negara. Kita bisa pastikan juga bahwa semua elemen masyarakat tentu setuju dengan adanya haluan negara bagi bangsa Indonesia. Sebab, kita semua tentu bertanya-tanya bagaimana negara Indonesia pada 10 tahun yang akan datang. Bagaimana Indonesia pada 25 tahun ke depan. Atau bagaimana wajah Indonesia pada 100 tahun mendatang.

Karena itu, kita semua menginginkan adanya perencanaan pembangunan yang baik. Pembangunan nasional seharusnya memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kehadiran PPHN akan lebih banyak dampak positifnya. Karena itu, Pimpinan MPR berharap, kita bisa menghadirkan PPHN dengan secepatnya. ❑

Rapat Konsultasi dengan Presiden Joko Widodo

Bamsoet Pastikan PPHN Bisa Dihadirkan Tanpa Amendemen UUD

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pimpinan MPR RI dan Presiden Joko Widodo melakukan Rapat Konsultasi, Kamis (17/7/2022), di Istana Negara. Kepada Presiden, pimpinan MPR menyampaikan, PPHN bisa dihadirkan tanpa melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945, tapi melalui konvensi ketatanegaraan.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI lainnya memastikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) akan dihadirkan sebagai Bintang Pengarah Bangsa Indonesia tanpa melalui Amendemen Konstitusi. MPR RI periode 2019-2024 akan melakukan terobosan melalui konvensi ketatanegaraan.

Pimpinan MPR RI juga menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI terhadap substansi dan bentuk hukum PPHN sebagai bintang penunjuk arah yang menjamin kesinambungan program pembangunan.

Badan Pengkajian MPR RI juga telah memiliki terobosan hukum bahwa bentuk hukum PPHN yang paling tepat dilakukan melalui Ketetapan MPR RI. Menghadirkannya tidak perlu melakukan amendemen konstitusi, karena bisa dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan. Dalam kaitan itu diperlukan kesepakatan delapan lembaga negara, yaitu: MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga Kepresidenan.

Karena itu, pada Sidang Tahunan MPR RI 2022 yang diselenggarakan pada 16 Agustus 2022, MPR RI akan membentuk Panitia Ad Hoc sebagai alat kelengkapan MPR RI yang berwenang menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI. “Salah satunya menyiapkan Konvensi Ketatanegaraan agar Indonesia bisa segera memiliki PPHN, tanpa harus terlebih dahulu mengamandemen konstitusi,” ujar Bamsoet usai Rapat Konsultasi antara Pimpinan MPR RI dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (14/7/22).

Turut hadir para pimpinan MPR RI, antara lain: Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nurwahid, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain membentuk Panitia Ad Hoc, dalam Sidang Tahunan MPR RI 2022 telah disepakati mengikuti pola tahun lalu jika situasi pandemi Covid-19 masih mengkhawatirkan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pada 18 Agustus 2022, Presiden berkomitmen akan hadir memperingati Hari Konstitusi sekaligus memperingati HUT ke-77 MPR RI. Peringatan ini bukan hanya sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi tanggung jawab sejarah untuk

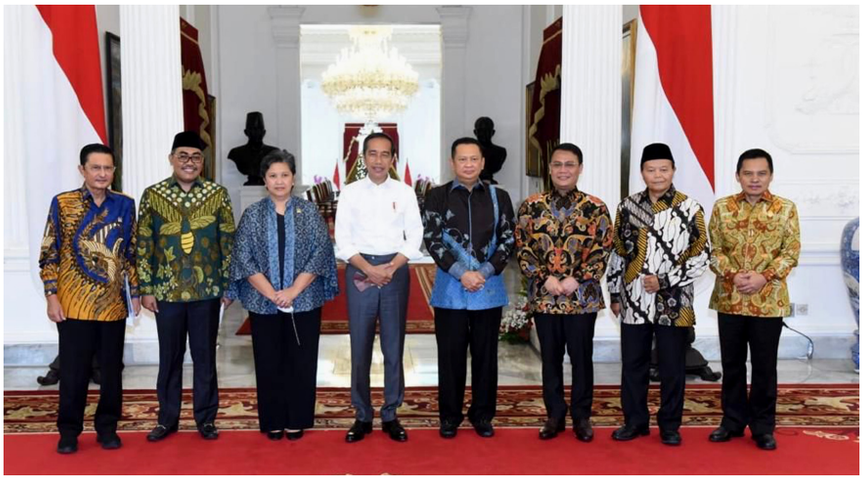

meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka. Sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penetapan barometer, mengenai sejauh mana pelaksanaan konstitusi dan capaiannya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Jika selama ini Hari Konstitusi hanya diperingati oleh MPR, untuk tahun ini diharapkan juga bisa diperingati oleh seluruh warga bangsa. Termasuk oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara, dalam satu rangkaian dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, Pimpinan MPR RI juga menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo terkait inisiasi MPR RI membentuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. Sebagaimana juga telah mendapatkan dukungan dari Raja Arab Saudi, King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi Mr. Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko Mr. Hakim Benchamach, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Issa, dan para duta besar negara sahabat, seperti Duta Besar Kerajaan Maroko, Republik Yaman, Republik Islam Iran, Qatar, Kerajaan Bahrain dan Kesultanan Oman.

"Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia ditargetkan terbentuk pada akhir tahun 2022. Proses pembentukannya akan dilakukan di Gedung Asia-Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia," pungkas Bamsoet. ❑

Dialog Nasional 76 Tahun SPS

Bamsoet Dorong Perusahaan Pers Suarakan Narasi Kebangsaan

"Mau tidak mau, suka tidak suka, industri pers dipaksa untuk beradaptasi dan berinovasi, agar dapat terus mempertahankan eksistensinya," jelas Bamsoet dalam Dialog Nasional 76 Tahun Serikat Perusahaan Pers (SPS) secara virtual, Rabu (6/7/22).

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengingatkan derasnya arus globalisasi yang ditopang lompatan kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan disrupsi terhadap media massa. Bahkan, koran *The Washington Post* pernah mengungkapkan kekesalan atas kehadiran smartphone sebagai 'biang keladi' ambruknya industri media cetak.

The Washington Post Express hanyalah satu dari sekian banyak media besar Amerika yang terpaksa harus gulung tikar karena ditinggalkan pembacanya demi beralih pada media online. Tercatat sejak tahun 2004, jumlah media cetak di Amerika yang terpaksa tutup mencapai 1.800 media, dengan rata-rata 100 koran tutup setiap tahunnya.

"Kemajuan teknologi telah menggeser paradigma preferensi masyarakat dalam memilih media. Cara menikmati sajian informasi merepresentasikan gaya hidup," ujar Bamsoet dalam Dialog Nasional 76 Tahun Serikat Perusahaan Pers (SPS), secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu (6/7/22).

Turut serta dalam dialog itu, antara lain: Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya, Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Januar P. Ruswita, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Jaja Subagja, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Dripa Sjabana, dan Staf Khusus Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nezar Patria.

Menurut Bamsoet, masyarakat merasa lebih nyaman dan praktis dalam mengakses berita dengan hanya menjentikkan jari ke smartphone, dan mendapatkan konten berita yang uptodate, lebih kaya format, baik dalam bentuk teks, audio, maupun video. Dibandingkan membaca media cetak yang dinilai tidak efisien, merepotkan, dan menyajikan berita kemarin untuk dibaca hari ini.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dengan tingkat penetrasi internet yang melonjak tajam di Indonesia, tercatat hingga awal Januari 2022 menyentuh angka 205 juta user atau sekitar 73,7% dari total populasi, menjadikan konvergensi media cetak ke media online sebagai fenomena yang sulit dibendung. Desakan digitalisasi media massa pun bermuara pada semakin melebarnya gap antara media konvensional dengan media digital.

Sebagai gambaran, kata Bamsoet, jumlah media cetak yang pada 2014 tercatat sebanyak 1.321, menurun drastis menjadi 644 pada tahun 2019. Oplah media cetak yang pada tahun 2014 mencapai 23,3 juta eksemplar, pada 2019 turun menjadi 12,8 juta eksemplar. Bisa jadi pada 2022 akan lebih memprihatinkan lagi. "Mau tidak mau, suka tidak suka, industri pers dipaksa untuk beradaptasi dan berinovasi, agar dapat terus mempertahankan eksistensinya," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, peningkatan penggunaan platform media digital pun semakin dirasakan di tengah pandemi Covid-19, di mana aktivitas ekonomi dan bisnis semakin dibatasi. Setelah eksistensinya tergerus oleh hadirnya era digital, kini media cetak semakin terpukul oleh dampak pandemi. Merujuk pada survei SPS tahun 2021, sebanyak 71% perusahaan media cetak mengalami penurunan omzet hingga 40% pada periode Januari-April 2020.

Di tengah hiruk pikuk persoalan yang melingkupi industri pers, lanjut Bamsoet, apresiasi perlu diberikan kepada Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang tetap berada di garda terdepan, sebagai tulang punggung

wibawa industri media nasional, dan konsisten menyuarakan narasi kebangsaan, serta pentingnya membangun semangat kolaborasi untuk bangkit bersama.

"Sebagai institusi tempat bernaung bagi perusahaan pers, SPS juga menegaskan esensi pers, baik sebagai institusi publik maupun institusi sosial, yang mempunyai peran yang strategis dan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Bamsoet, pemenuhan hak asasi rakyat untuk memperoleh informasi, dan kemerdekaan pers untuk menyampaikan informasi, berbanding lurus dengan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat. "Inilah salah satu esensi dasar dalam penegakan nilai-nilai demokrasi. Sehingga dalam konsepsi negara demokratis, pers tidak saja turut memberi warna, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama penyangga demokrasi. Bukan hanya semata-mata menjadi institusi penyedia informasi bagi publik, tetapi juga merepresentasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, dan penyedia ruang bagi partisipasi publik," pungkas Bamsoet. ❑

RUU Bank Makanan

HNW Kembali Dorong Agar Segera Disahkan

Bank Makanan merupakan organisasi yang dikelola oleh masyarakat yang mengumpulkan makanan layak konsumsi yang berlebih (surplus food) dari restoran, toko retail, hotel, dan industri makanan. Lalu menyalurkan kepada warga yang membutuhkan

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengkhawatirkan dampak dari Covid-19, dan ekses resesi ekonomi global terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Hidayat berharap, agar DPR dan Pemerintah menghadirkan lagi berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah itu. Atau paling tidak mengurangi ekses-ekses negatifnya.

Untuk itu, Hidayat meminta agar DPR dan Pemerintah segera membahas dan mengundangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dapat membantu masyarakat rentan. Salah satunya adalah RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR.

Penyataan itu disampaikan Hidayat saat memberikan sambutan dalam Seminar terkait Bank Makanan yang diselenggarakan oleh FoodCycle Indonesia di Jakarta, Jumat (15/7/2022). Selain Hidayat, seminar FoodCycle Indonesia, ini juga menghadirkan beberapa narasumber. Antara lain, pendiri FoodCycle Indonesia Astrid Paramita dan perwakilan dari dunia bisnis. Juga Craig Nemitz dari the Global Foodbanking Network (GFN) yang memaparkan bagaimana jaringan bank makanan bergerak di Negara-negara lain.

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengatakan, Indonesia harus bersiap terhadap segala kemungkinan dari dampak pandemi Covid-19 maupun resesi global tersebut. Apalagi, kondisi perekonomian Indonesia cukup terpukul dengan pandemi Covid-19 yang menghasilkan jumlah warga miskin yang semakin banyak. Kondisi ini diharapkan dapat terbantu dengan kehadiran UU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial yang memang diinisiasi untuk membantu Negara melaksanakan kewajibannya peduli dan membantu fakir miskin.

Sebagai informasi, Bank Makanan merupakan organisasi yang dikelola oleh masyarakat yang mengumpulkan makanan layak konsumsi yang berlebih (surplus food) dari restoran, toko retail, hotel, dan industri makanan. Lalu menyalurkan kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan ini menangani dua persoalan sekaligus, yakni kemubaziran pangan yang juga mengkhawatirkan di Indonesia dan membantu masyarakat rentan

terhadap akses makanan.

"Sewajarnya kita mendukung kegiatan Bank Makanan ini. Termasuk kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mubazir dan bijaksana mengelola makanan, kegiatan aksi sosial, hingga keberpihakan pemerintah atas kegiatan ini, termasuk dari sisi regulasi. Maka sudah seharusnya bila RUU Bank Makanan ini segera dibahas dan disetujui untuk diundangkan," ujarnya.

Setidaknya, kata HNW, ada beberapa poin penting yang diatur dalam RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial yang diinisiasi oleh HNW sebagai anggota Komisi VIII DPRRI yang juga membidangi masalah sosial. Pertama, untuk memberikan payung hukum legalitas dari kegiatan dan lembaga Bank Makanan. Karena dalam hal ini masih ada kekosongan hukum. Kedua sebagai upaya untuk mendorong restoran, café, hotel, toko retail, untuk tidak membuang makanan layak konsumsi yang mereka miliki secara percuma. Makanan yang dimaksud adalah makanan berlebih yang masih layak untuk dikonsumsi.

"Salah satu cara yang dihadirkan adalah memberikan insentif atau reward kepada mereka apabila mendonasikan makanan berlebih tersebut melalui Bank Makanan yang kemudian akan didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan," ujarnya.

Ketiga, dukungan berupa imunitas terbatas bagi para donor makanan dan relawan Bank Makanan. Imunitas dari gugatan perdata atau kriminalisasi pidana diberikan apabila ada ekses atas makanan yang didistribusikan ini telah sesuai standard operating procedure (SOP) yang ada. Keempat, menghadirkan dukungan pemerintah pusat maupun daerah terhadap organisasi Bank Makanan yang bermunculan di Indonesia. Seperti dengan pengakuan legalitas, penyediaan gudang makanan, transportasi distribusi makanan dan lain sebagainya.

Di mancanegara, seperti Malaysia dan AS, sudah ada regulasi soal Bank Makanan. Di Indonesia, RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial yang diinisiasi langsung oleh HNW selaku Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial masih dalam tahap ditetapkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 - 2024, dan sedang diperjuangkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas.

HNW berharap, dengan suksesnya kegiatan Bank Makanan beserta regulasinya akan mengoreksi kemubaziran pangan di Indonesia. Apalagi, Indonesia pernah disebut sebagai negara peringkat kedua dalam kemubaziran pangan. Setiap tahunnya diperkirakan, terdapat 13 juta ton makanan yang dimubazirkan pada 2016. Padahal angka tersebut dapat memberikan makanan kepada 11% populasi Indonesia. Data terakhir, pada 2022, nilai makanan yang termubazirkan di Indonesia senilai Rp 300 triliun.

"Demi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua Rakyat Indonesia yang memerlukan bantuan pangan, apalagi mereka yang terdampak Covid-19 maupun resesi global, sudah seharusnya bila RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial ini segera disepakati dan diundangkan oleh DPR dan Pemerintah," pungkas HNW. ❑

Pimpinan MPR di Maroko

Menguatkan Rencana Pembentukan Forum MPR se-Dunia

PIMPINAN MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., dan Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar, bertemu dengan Mr. Rachid Talbi El Alami selaku Ketua Majelis Al-Nuwwab (setingkat DPR di Kerajaan Maroko). Setelah itu, kedua pimpinan MPR itu melanjutkan pertemuan dengan Mr. Mohamed Hanine selaku Wakil Ketua Majelis Al-Mustasyarin (setingkat MPR di Kerajaan Maroko). Pertemuan berlangsung di Gedung Parlemen Maroko, Senin (18/7/2022) waktu setempat.

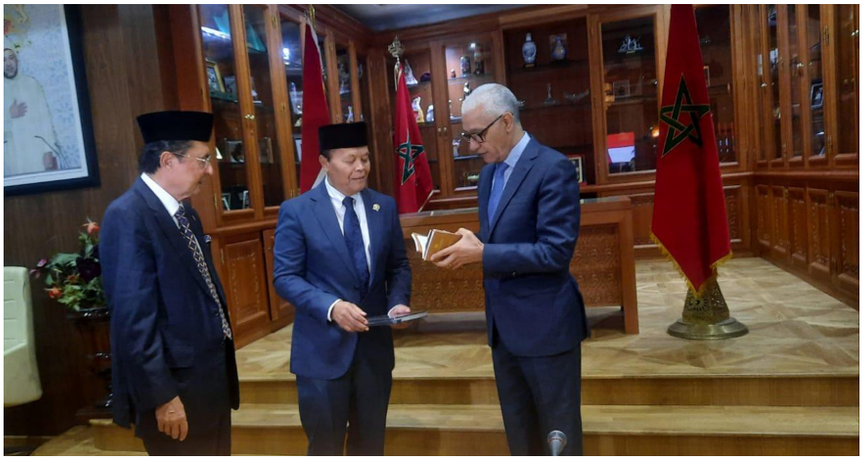

Kehadiran Hidayat dan Fadel Muhammad di Negeri Magribi itu sebagai delegasi MPR RI untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya antara Ketua MPR RI dan Ketua Majelis Al-Mustasyarin Maroko terkait prakarsa MPR untuk membentukan Forum Majelis Syura atau Forum MPR se-Dunia.

Di awal pertemuan, Wakil Ketua Majelis Al-Mustasyarin menyampaikan salam dari

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ketua Majlis Al-Mustasyarin yang tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas keparlemenan di luar Maroko. Mr. Mohamed Hanine menyatakan bahwa Ketua Majelis Al-Mustasyarin sangat mendukung prakarsa dari MPR tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Hidayat yang akrab disapa HNW itu menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Parlemen Maroko dan kerjasama yang sudah dilakukan selama ini. Di hadapan para pimpinan Parlemen Maroko, HNW membahas soal realisasi usulan pembentukan Forum Majelis Syura atau Forum MPR se-Dunia beserta tanggapan positif negara-negara sahabat Indonesia atas ide tersebut. Seperti dukungan dari Raja Arab Saudi dan Majelis Syura Arab Saudi, serta para pimpinan Parlemen di Turki, Iran, dan sejumlah negara lainnya.

HNW menyebutkan, beberapa faktor penting pembentukan Forum Majelis Syura atau Forum MPR se-Dunia, antara lain: Konsolidasi anggota maupun lembaga-lembaga MPR, atau sejenisnya yang belum terakomodasi dalam berbagai Organisasi Keparlemenan, seperti IPU dan PUIC. Forum ini bertujuan agar bersama dengan lembaga-lembaga global dan regional yang sudah ada menghadirkan rasa saling menguatkan. Selain itu, agar MPR dan lembaga sejenis makin berkontribusi untuk peradaban dan perdamaian dunia, demokrasi, dan kemaslahatan lainnya, dengan saling bertemu serta berbagi pengalaman dan kepedulian.

Delegasi MPR RI yang dipimpin HNW juga menyampaikan bahwa terpilihnya Maroko sebagai Ketua African Parliament Union (APU) sebagai badan yang membawahi lembaga-lembaga Majelis Syura maupun lembaga-lembaga sejenis di Afrika, dapat menjadi rujukan pembentukan Forum MPR se-Dunia yang dimulai dari seluruh parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

"Ide Majelis Syura atau Majelis Permusyawaratan se-Dunia sudah didukung sejak 2019 oleh Majelis Permusyawaratan Maroko dan Majelis Syura Saudi dan sudah diselenggarakan seminar nasional serta kajian terkait ide itu, tetapi realisasinya tertunda karena Covid-19.

Insya Allah realisasinya akan dilaksanakan Oktober 2022 di Kota Bandung sebagai kota sejarah KTT Asia Afrika bersamaan presidensi Indonesia di G20," ungkap HNW.

Menanggapi pemaparan Delegasi MPR RI, baik Ketua Majlis Al-Nuwwab maupun Wakil Ketua Majlis Al-Mustasyarin Maroko, menyambut sangat baik ide tersebut dan akan mendukung prakarsa MPR. Ketua Majlis Al-Nuwwab Maroko juga berjanji akan mengangkat gagasan Forum Majelis Syura atau Forum MPR se-Dunia saat menerima Ketua Majelis Syura Arab Saudi pada pekan ini.

Di sisi lain, Wakil Ketua Majlis Al-Mustasyarin Maroko juga turut menyampaikan dukungan terhadap gagasan tersebut. Wakil Ketua Majlis Al-Mustasyarin Maroko akan mendalami proposal pembentukan Forum Majelis Syura atau Fo-

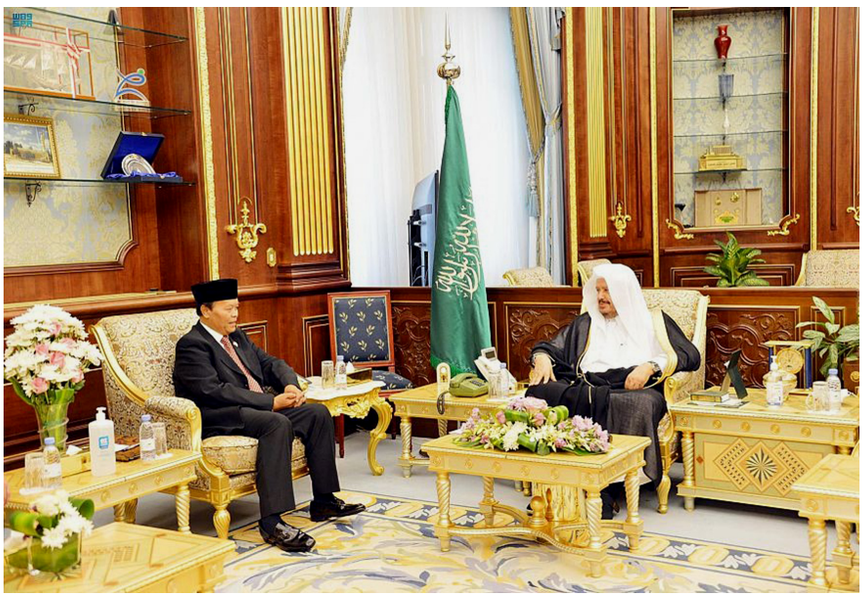

rum MPR se-Dunia tersebut untuk memberikan masukan dan pengayaan bila diperlukan.

Pimpinan MPR di Saudi Arabia

Lanjutkan Diplomasi, ealisasikan Pembentukan Forum MPR se-Dunia

SETELAH mengunjungi Maroko, Pimpinan MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., dan Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar bertemu Syaikh Dr. Abdullah Ibn Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Majelis Syura Arab Saudi, di Kantor Majelis Syura Saudi, Riyadh, Selasa (19/7/2022) waktu setempat.

Kehadiran kedua Pimpinan MPR itu di Arab Saudi juga dalam rangka menunaikan amanah sekaligus utusan resmi MPR RI untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya antara pimpinan MPR dengan Ketua Majelis Syura Arab Saudi pada Desember 2019. Yaitu, merealisasikan usulan inisiatif MPR RI terkait pembentukan Forum Majelis Syura atau MPR se-Dunia. Usulan itu dimulai dengan pembentukan forum di lingkungan PUIC, Parlemen-Parlemen negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Majelis Syura Arab Saudi, Dr. Mishaal bin Fahm Al-Sulami, Asisten Ketua Majelis Syura Saudi, Dr. Hanan bint Abdurrahim Al-Ahmadi, serta Sekretaris Jenderal Majelis Syura Saudi, Prof. Muhammad bin Dakhil Al-Mutairi. Juga Prof. Ahmad Al-Mahmadi, Dr. Iman Al-Jibrin, Ir. Saleh Al-Nuzha, Dr. Tariq Al-Shimri, Dr. Ali Al-Ali, dan Prof. Muhammad Al-Humaidhi, selaku Anggota Komite Kerjasama Parlementer Arab Saudi-Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Hidayat yang akrab dipanggil HNW menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Ketua Majelis Syura Arab Saudi atas jalinan kerjasama yang sudah dilakukan selama ini. Pembahasan utama yang disampaikan HNW di hadapan Ketua dan para pimpinan Majelis Syura Arab Saudi ialah bagaimana tindak lanjut dan realisasi usulan pembentukan Forum Majelis Syura. Atau Forum MPR se-Dunia beserta tanggapan positif parlemen dari negara-negara sahabat Indonesia atas ide tersebut. Seperti dukungan dari Majlis Al-Mustasyarin (setara MPR RI), dan Majlis Al-Nuwwab (setara DPR RI), maupun para pimpinan parlemen dari sejumlah negara lainnya.

HNW menyebutkan, faktor penting pembentukan Forum Majelis Syura atau Forum MPR se-Dunia di antaranya konsolidasi anggota maupun lembaga-lembaga MPR atau sejenisnya yang belum terakomodasi dalam berbagai Organisasi Keparlemenan, seperti IPU, dan PUIC. Dengan tujuan, bersama lembaga-lembaga global dan regional yang sudah ada, menghadirkan forum agar lembaga-lembaga MPR dan sejenisnya dapat menguatkan forum-forum yang telah ada.

"Juga agar MPR dan lembaga sejenis makin berkontribusi untuk peradaban dan perdamaian dunia, demokrasi, serta kemaslahatan lainnya, dengan saling bertemu, berbagi pengalaman dan kepedulian," jelas HNW.

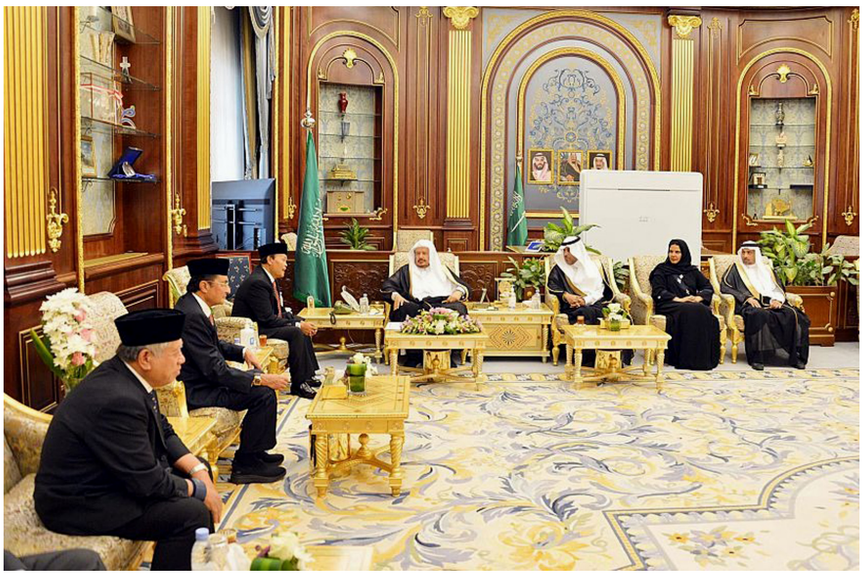

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Adanya Liga dan Lembaga yang mewadahi Majelis Tinggi, Majelis Syura, Senat, dan majelis-majelis sejenis di negara-negara Arab dan Afrika, kata HNW, bisa menjadi rujukan dan bukti pentingnya pembentukan Forum Majelis Syura di tingkat OKI. Bahkan, bila disepakati bisa ditingkatkan hingga tingkat IPU.

"Semoga prakarsa MPR RI yang didasari pengamalan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mendapatkan sambutan positif dari berbagai duta besar Negara-Negara anggota OKI di Jakarta, akan menambahkan kontribusi positif Indonesia untuk kemaslahatan dan kebaikan Parlemen-Parlemen dari kawasan Afrika dan Negara-Negara Arab, meluas ke anggota PUIC (Negara-Negara OKI), bahkan ke seluruh negara-negara di dunia (IPU)," kata HNW lagi.

Sebagaimana pertemuan awal, tahun 2019, pada kesempatan itu Ketua Majelis Syura Arab Saudi menyampaikan apresiasi atas inisiatif MPR RI. Ketua Majelis Syura Saudi juga kembali menyatakan dukungannya, bahkan kali ini lebih kongkret menyampaikan bahwa delegasi Majelis Syura Saudi akan menghadiri prosesi Deklarasi Pembentukan Forum ini sebagaimana diusulkan oleh MPR, yaitu pada akhir Oktober 2022.

Di samping itu pertemuan tersebut juga mendiskusikan faktor-faktor yang bisa menyukseskan pembentukan forum, dengan fokus pada komitmen perjuangan kemaslahatan bersama. Juga yang terkait dengan masalah kontribusi peradaban, kemanusiaan, serta perdamaian. Serta saling menguatkan forum-forum keparlemenan yang sudah ada maupun antarlembaga Majelis Syura dan majelis-majelis sejenis. Semua upaya tersebut agar tetap menghindari hal-hal yang bisa memecah, membuat masalah, ataupun menihilkan forum-forum yang sudah ada. ❑

The Sandi Group Global Holdings (TSG GH)

Bamsoet Dorong Pemain Dunia Investasi Nikel di Indonesia

Dengan berbagai kekayaan sumber daya nikel, Indonesia tetap terbuka terhadap masuknya investor dari luar negeri.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi rencana The Sandi Group Global Holdings (TSG GH) berinvestasi di berbagai program pembangunan di Indonesia. Antara lain di sektor infrastruktur, dan pertambangan seperti nikel.

Pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan Presiden Joko Widodo sejak 1 Januari 2020 telah membuahkan banyak keuntungan bagi Indonesia. Satu di antaranya dalam memperbesar hilirisasi komoditas nikel menjadi produk jadi, sehingga mendapatkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

"Karena pelarangan tersebut, akhirnya berbagai perusahaan besar dunia harus membangun pabrik pengolahan nikel di Indonesia. Salah satunya akan dilakukan oleh TSG GH," ujar Bamsoet usai menerima jajaran TSG GH, di Jakarta, Rabu (6/7/22).

Jajaran TSG GH yang hadir dalam pertemuan itu, antara lain: Chairman and CEO Rubar Sandi, Executive Vice President Russell Hugo, serta Chief Technology Office Kamran Atri. Hadir pula tokoh pengusaha nasional Setiawan Djodi.

Berdasarkan laporan Peluang Investasi Nikel Indonesia dari Kementerian ESDM, lanjut Bamsoet, jumlah izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) dan smelter nikel yang sudah beroperasi di Indonesia hingga tahun 2020 mencapai 323 izin. Tersebar di lima wilayah, seperti di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

"Dari kelima wilayah tersebut, sekitar 84% perizinan berada di Sulawesi, sehingga bisa dikatakan Sulawesi merupakan sentra nikel terbesar di Indonesia," ujar Bamsoet usai menerima jajaran TSG GH, di Jakarta, Rabu (6/7/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebelumnya pada tahun 2020, TSG GH bersama entitas bisnisnya, yaitu PT TSG Utama Indonesia dan Titan Global Capital Pte Ltd menggandeng 10 perusahaan Indonesia, termasuk BUMN, untuk berkolaborasi melakukan ekspansi bisnis ke Republik Demokratik Kongo, Afrika. Antara lain, bersama WIKA dan LEN, TSG GH akan mengerjakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 200 Megawatt (MW).

Bersama PT INKA, tambah Bamsoet, TSG GH akan menyiapkan pembangunan infrastruktur kereta sepanjang 1.700 km,

pembelian rolling stock, hingga Light Rail Transit (LRT) dari kota ke bandara di DRC, Kongo. “Bersama Merpati Nusantara Airlines, TSG akan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan penerbangan di Afrika, khususnya Republik Demokratik Kongo, untuk membuka rute pengangkutan kargo Indonesia-Afrika, termasuk kerjasama dalam hal maintenance repair and overhaul (MRO) dan training centre. Serta bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia untuk pembelian pesawat NC212i,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, menurut data LPEM FEB UI, yang diolah dari Nickel Institute pada 2021, Indonesia menjadi negara kedua setelah Australia dengan sumber daya nikel terbesar di dunia, yakni 33,3 juta ton atau 11%. Rusia di posisi keempat dengan 24,4 juta ton atau 8%. Sementara dalam cadangan nikel di dunia, Indonesia ada di urutan pertama dengan 21 juta ton atau 23,7%.

Dengan berbagai kekayaan sumber daya nikel tersebut, menurut Bamsoet, Indonesia tetap terbuka terhadap masuknya investor dari luar negeri. Terlebih keberadaan UU Cipta Kerja telah memberikan banyak kemudahan bagi para investor dalam mengelola sumber daya alam Indonesia.

“Dukungan para investor menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan sejumlah produk turunan nikel seperti baja, stainless steel, serta bahan baku baterai kendaraan listrik yang mengutamakan penggunaan material nikel,” pungkas Bamsoet. ❑

Terima Pengurus Yayasan Amanah Kita

Bamsoet Dukung Pembangunan Taman Miniatur 99 Masjid Dunia

Sebuah kawasan yang nantinya tidak hanya menampilkan sisi religiusitas masjid, melainkan juga aspek kebudayaan yang melekat pada setiap masjid.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendukung upaya Yayasan Amanah Kita yang sedang membangun kawasan wisata religi dan peradaban Islam terbesar, 99 World Mosque Miniature Park atau Taman Miniatur 99 Masjid Dunia. Di dalam satu kawasan seluas 215 hektar di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu hadirkan 99 miniatur masjid dari 86 negara dunia.

Miniatur masjid yang akan dibangun, antara lain Masjid Agung Demak dan Masjid Klungkung mewakili Indonesia, Masjid Sultan mewakili Singapura, Masjid Camii Tokyo mewakili Jepang, Masjid Sultan Ahmed dan Masjid Hagia Sophia mewakili Turki, Masjid Grand Rome mewakili Italia, Masjid Sheikh Sayed mewakili Uni Emirat Arab. Lalu Masjidil Haram, Nabawi, Quba, dan Qiblatain mewakili Saudi Arabia, serta Majid Al Aqsa mewakili Palestina,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Yayasan Amanah Kita, di Jakarta, Rabu (13/7/22).

Pengurus Yayasan Amanah Kita yang hadir, antara lain: Ketua Umum M. Hartono A Limin, Wakil Ketua Andi Lukman, serta anggota Dendi Gumilang, Laja Lapian, dan M. Gusni Putra.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain membawa misi meningkatkan kesalehan sosial, keberadaan 99 World Mosque Miniature Park juga membawa misi kebudayaan. Karena, kawasan ini nantinya, tidak hanya menampilkan sisi religiusitas masjid, melainkan juga aspek kebudayaan yang melekat pada setiap masjid. Karena itu, di depan taman miniatur masjid juga akan didukung perangkat kebudayaan dari negara asal masjid tersebut. Seperti peragaan tradisi dan budaya, termasuk menyajikan berbagai macam kuliner khas.

“Menjadi wujud konkret bahwa bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Indonesia turut menjaga dan melestarikan perjalanan panjang peradaban Islam dunia. Mengingat setiap masjid yang dibangun tidak lepas dari sejarah yang telah mewarnai kehidupan umat manusia sejak puluhan abad silam," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagai kawasan wisata religi, 99 World Mosque Miniature Park juga bisa mendatangkan banyak turis, baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga bisa memberikan multiplier effect economy yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai fasilitas umum pendukung juga akan dibangun di kawasan 99 World Mosque Miniature Park. Antara lain, Masjid Utama (Grand Mosque) berkapasitas 200.000 jamaah, lembaga pendidikan seperti pesantren dan universitas, perpustakaan, dan hotel. "Tidak menutup kemungkinan nantinya juga bisa digunakan untuk menyelenggarakan berbagai konferensi internasional, seperti Organisasi Konferensi Islam," pungkas Bamsoet. ❑

AKHLAK Award BUMN Tahun 2022

Bamsoet Apresiasi Transformasi Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian BUMN

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, nilai-nilai dasar AKHLAK yang menjadi pondasi budaya kerja ini harus menjadi visi bersama.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kesungguhan dan komitmen Kementerian BUMN, dalam mendorong transformasi budaya kerja di lingkungan Kementerian BUMN. Komitmen ini tercermin dari penyelenggaraan Award BUMN secara periodik setiap tahun yang diselenggarakan oleh ACT Consulting, sebuah lembaga konsultan yang kompeten dan kredibel, dengan menggunakan metode pemetaan dan pengukuran AKHLAK Culture Health Index.

"Hadirnya nilai-nilai dasar AKHLAK, yang merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, berangkat dari kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan budaya kerja, yang menjunjung tinggi profesionalisme, mengedepankan prinsip efisiensi, dan berorientasi pada capaian hasil yang berkualitas," ujar Bamsoet dalam acara AKHLAK Award BUMN Tahun 2022 yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Selasa (5/7/22).

Turut serta antara lain Wakil Presiden

Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron, serta Founder ACT Consulting Ary Ginanjar Agustian.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, nilai-nilai dasar AKHLAK yang menjadi pondasi budaya kerja ini harus menjadi visi bersama. Agar pada setiap proses bisnis, mulai dari hulu hingga ke hilir, menjadi proses dan mekanisme kerja yang terintegrasi. Di mana setiap pemangku kepentingan yang terlibat dapat saling mendukung dan saling berkontribusi dalam sebuah kohesi kinerja yang solid.

"Budaya kerja yang Amanah, melingkupi aspek kepercayaan, kejujuran, dan integritas. Budaya kerja yang Kompeten, merujuk pada kemampuan untuk memenuhi standar pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Budaya kerja yang Harmonis, mengamanatkan keterpaduan dan integrasi dalam menyikapi keberagaman dalam lintas unit organisasi," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, budaya kerja yang Loyal, meniscayakan sikap supportif pada setiap garis kebijakan, dan 'tegak lurus' pada visi-misi organisasi. Budaya kerja yang Adaptif, mendorong kemampuan untuk menyesuaikan diri dan menghadirkan inovasi untuk menjawab perubahan dan dinamika lingkungan. Budaya kerja yang Kolaboratif, mengedepankan prinsip 'kerjasama' dan 'kerja bersama', mengutamakan kerja kolektif dan inklusif, serta mengesampingkan ego sektoral.

"Tentu saja, sebagus apa pun nilai-nilai dasar kita formulasikan, hanya akan menjadi slogan dan jargon tanpa makna, jika tidak diimplementasikan secara nyata. Inilah pentingnya dilakukan review dan evaluasi secara periodik, untuk memastikan bahwa kita berada di jalur dan arah yang tepat, dalam mentransformasikan nilai-nilai AKHLAK tersebut menjadi budaya kerja. Karena muara dari transformasi budaya kerja, tentu pada akhirnya akan tercermin dari capaian dan hasil kinerja," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, hasil kinerja itulah yang dapat dilihat pada Kementerian BUMN. Dari aspek kinerja keuangan, pada tahun 2021 BUMN mencatatkan capaian yang luar biasa, dengan menghasilkan laba bersih Rp 126 triliun. Meningkat hampir 10 kali lipat dari capaian tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 13 Triliun.

"Gambaran di atas sangat paradoks dengan kenyatan bahwa pada tahun 2021, Kementerian BUMN mendapatkan dukungan anggaran minimalis sebesar Rp 197 miliar, lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran kementerian lain. Sedangkan total aset yang dikelola mencapai Rp 8.998 Triliun. Ini mengisyaratkan pesan penting, bahwa dukungan anggaran yang minimal, tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih kinerja yang optimal," pungkas Bamsoet. ❑

Kenaikan Harga BBM

Syarief Hasan: Pemerintah Mesti Bijak Memitigasi Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua MPR RI, Prof. Syarief Hasan, mengingatkan, kendaraan listrik adalah solusi jangka panjang yang mesti diupayakan berkesinambungan, namun di sisi lain penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil perlu juga diatensi.

WAKIL Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Prof. Syarief Hasan, menilai, penggunaan kendaraan listrik adalah langkah yang baik dalam memitigasi efek gas rumah kaca dan menjaga daya dukung lingkungan. Ini adalah kebijakan jangka panjang yang mesti didukung oleh semua pihak sebagai bentuk keberpihakan pada masa depan bumi. Namun, di sisi lain, politisi senior Partai Demokrat ini juga mengingatkan agar segala prasyarat bagi terwujudnya ekosistem kendaraan listrik dipenuhi.

"Pengggunaan kendaraan listrik tentu hal yang baik. Ini menjadi solusi jangka panjang agar daya dukung lingkungan terjaga.

Namun demikian, apa yang menjadi prasyaratnya, yakni kebutuhan bahan baku dan ekses penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, infrastruktur kelistrikan yang terjangkau, serta kebijakan yang terarah haruslah terjalin dengan baik. Ini menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga dan merawat bumi," ungkap Syarief.

Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menghimbau agar proporsional menempatkan prioritas. Bahwa penggunaan kendaraan listrik tidak mesti menisbikan penggunaan BBM. Kendaraan listrik adalah solusi jangka panjang yang mesti diupayakan berkesinambungan,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

namun di sisi lain penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil perlu juga diatensi. Dalam hal inilah kenaikan harga BBM menjadi isu publik yang juga perlu dicarikan solusinya.

"Harga BBM terus merangkak naik, padahal dampak penggandanya (multiplier effect) sangatlah besar terhadap perekonomian. Jika BBM naik, maka harga-harga akan ikut terkerek, daya beli rakyat melemah, angka inflasi juga makin tinggi. Dalam konteks inilah pemerintah mesti cermat dalam mengambil kebijakan. Energi adalah kebutuhan pokok rakyat yang sangat sensitif memengaruhi segala sendi kehidupan rakyat. Keekonomian harga mestilah sebanding dengan situasi yang dihadapi oleh rakyat, terutama UMKM," ungkap Syarief.

Menurut Syarief, sepanjang pemerintahan SBY, harga minyak mentah dunia pernah berkali-kali meroket. Berdasarkan data US Energy Information Administration, harga minyak mentah pada Juli tahun 2008 pernah mencapai US$ 128/barel, namun harga BBM subsidi (premium) saat itu ditetapkan sebesar Rp 6.000/liter. Kenaikan harga minyak mentah diatas US $100/barrel terjadi juga pada April 2011 sebesar US $108,8/ barel, Maret 2012 sebesar US $ 105,42/ barel, serta September 2013 mencapai US $ 102,32/ barel. Namun kenaikan BBM premium tertinggi hanya mencapai Rp 6.500/ liter.

Sepanjang 2014 - 2020, harga minyak mentah dunia tidak pernah menembus US $100/ barel, bahkan selalu di bawah US$ 70/ barel. Kenaikan tertinggi pernah di Oktober 2021 yang menembus angka US$ 78,51/ barel. Namun, di sisi lain, harga BBM premium juga tidak menurun signifikan, yang seharusnya sebanding sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia. Pada November 2014, harga premium bahkan menembus Rp 8.500/ liter dan sejak 2016 konsisten di angka Rp 6.450/ liter. "Kita perlu bijak dan proporsional dalam mengambil kebijakan, terutama sektor energi yang dampaknya pada kehidupan rakyat sangat nyata dan signifikan," tutup Syarief.

Atasi Penderitaan Rakyat Akibat Kebutuhan Pokok Naik

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, juga menyoroti soal kenaikan harga kebutuhan pokok. Syarief Hasan mengingatkan pemerintah agar melakukan upaya maksimal menjaga pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Menurut Syarif Hasan, krisis minyak goreng yang belum juga berakhir, karena penurunan harga Rp 14.000/liter hanya di kota2 besar, seiring dengan kenaikan harga ayam, daging, dan cabai yang meroket.

Jelang sepekan terakhir Idul Adha lalu, harga cabai bahkan menembus Rp 120 ribu/ kg. Harga daging juga mengalami kenaikan nyaris 50%, dari harga normal Rp 110 ribu/ kg menjadi Rp 160 ribu/ kg.

"Ini sangat disesalkan, karena diikuti banyak komoditas pokok rakyat yang naik di waktu yang nyaris bersamaan. Ini adalah tanggung jawab negara untuk memastikan kebutuhan rakyat terjamin. Saya telah berulang kali mengingatkan pemerintah agar merencanakan pasokan dan ketersediaan pangan rakyat ini dengan baik," ungkap Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini.

Menurut Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM ini, rakyat berpendapatan menengah ke bawah dan UMKM adalah kelompok yang paling terdampak krisis kebutuhan pokok yang berkepanjangan.

Maka, katanya, tidak aneh jika inflasi tahunan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Juni 2022 sebesar 4,35% adalah yang tertinggi sejak Juni 2017. Ini patut diwaspadai di tengah ketidakpastian global, melonjaknya harga komoditas dan energi.

Karena itu, tidak aneh jika survei Litbang Kompas pada April 2022 yang mengungkapkan, 66,3% rakyat tidak yakin pemerintahan Jokowi mampu mengendalikan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok adalah fakta sebenarnya. Bila dirinci, ada sebanyak 31,8% rakyat yang kesulitan membeli barang, karena mahal dan langka, 27,6% karena mahal, dan 11,6% kesulitan karena barangnya langka. Kondisi perekonomian Indonesia semakin hari semakin mencemaskan.

Menurut Syarief, ini perkara keberpihakan. Jika pemerintah maksimal melakukan upaya kemandirian pangan, saya kira kita mampu mencukupi kebutuhan domestik dengan baik. Kita mampu mengontrol dan menjaga stabilitas harga, serta ketersediaan bahan pokok.

Yang menjadi masalah, lanjut Syarief, jika pemerintah hanya mengandalkan impor, pemerintah sangat bergantung pasokan dari negara lain. "Seandainya pemerintah berani melakukan afirmasi dan pemberdayaan petani dan nelayan, saya percaya negeri ini mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya," katanya.

"Fungsi negara adalah memastikan kebutuhan pokok rakyatnya terjamin. Jika ada gejolak harga dan kelangkaan barang maka pemerintah harus melakukan intervensi sampai semua persoalan teratasi, bukan justru menyerahkannya pada mekanisme pasar. Inilah esensi negara kesejahteraan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Jadi, jika pemerintah lepas tangan, gagal fokus, dan tidak peduli dengan pemenuhan kebutuhan pokok warganya, sama saja artinya pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi dengan baik dan konsekuen. " tutup Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. ❑

Buku ‘Bung Karno, Islam dan Pancasila’

Dibahas Jajaran Perwira Menengah Polri Peserta Sespimti Polri

Dr. Ahmad Basarah, SH., MH., penulis buku “Bung Karno, Islam, dan Pancasila” yang juga Wakil Ketua MPR RI memuji Polri yang telah menetapkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi Polri.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

JAJARAN perwira menengah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tengah mengikuti jenjang pendidikan Sespimti Polri Tahun Akademik 2022 membahas buku: ‘’Bung Karno, Islam dan Pancasila’’ karya Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa (19/7/22).

Hadir dalam forum itu 75 perwira menengah Polri, bersama 45 peserta didik lain dari jajaran TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, serta perwakilan dari kejaksaan. Sebagai penulis buku, Ahmad Basarah tampil sebagai pembicara utama, didampingi Prof. Dr. Agus Mohammad Najib dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Islam Moderat.

Dalam uraiannya, Ahmad Basarah memuji Polri yang telah menetapkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi Polri. Untuk itu, ia menekankan agar kurikulum pendidikan Pancasila yang dijadikan rujukan dalam kurikulum itu haruslah berlandaskan sejarah yang sudah teruji secara akademis, bukan perdebatan politik yang didasarkan pada siapa yang berkuasa. Perdebatan tentang Pancasila di ruang politik itulah yang melatarbelakanginya maju ke ruang akademis dengan mengikuti program doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, awal 2014.

“Saya menulis disertasi dengan judul ‘Eksistensi Pancasila dalam Pengujian UU Terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan’. Disertasi saya secara ilmiah telah diuji oleh dua hakim Mahkamah Konstitusi dan tujuh Guru Besar lainnya dari berbagai Perguruan Tinggi. Setelah saya dinyatakan lulus dengan summa cumlaude, disertasi saya itu kemudian dijadikan buku yang berjudul “Bung Karno Islam dan Pancasila” yang sekarang kita bedah bersama,” jelas Dosen Universitas Islam Malang ini.

Selama ini, lanjut Ahmad Basarah, selalu muncul perdebatan yang bertujuan untuk melakukan distorsi dan mengaburkan sejarah Pancasila, mulai dari era Orde Baru sampai Orde Reformasi. Bahkan sampai hari ini masih ada perdebatan tentang hari lahir Pancasila hingga kemunculan ideologi transnasional, serta upaya membenturkan Pancasila dengan Islam di tengah masyarakat kita”.

“Bahkan ada individu-individu yang juga melakukan penafsiran terhadap sila-sila Pancasila seenak sendiri. Dia bisa menyatakan di ruang publik bahwa ateisme dibolehkan di Indonesia karena sila lain dalam Pancasila membolehkan ateisme itu, meski sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengatakan

bahwa roh Pancasila itu adalah NKRI Bersyariah, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa agama yang benar dan sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Esa hanyalah agama Islam. Realitas yang seperti itu harus diluruskan sekaligus dijaga oleh perwira-perwita TNI, Polri yang hadir di forum ini agar tidak terjadi bias pemamahan Pancasila di tengan masyarakat kita," tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Padahal, lanjut Ahmad Basarah, jika bicara tentang Pancasila dan makna yang terkandung di dalamnya menurut para pembentuk Pancasila maka sudah seharusnya mereka mengembalikan tafsir itu kepada para perumus Pancasila itu sendiri, yaitu para Pendiri Bangsa, khususnya Bung Karno yang jelas-jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan.

''Semua itu saya uraikan dalam buku yang bapak-bapak pegang. Jika pimpinan Polri membaca tuntas buku tersebut, saya yakin polisi dan perwira TNI di negara kita tercinta ini akan memiliki pegangan yang kokoh dalam menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara" tutur Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua Lakpesdam PBNU itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, sejak kelahirannya Polri memang disiapkan untuk menjadi alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri.

"Semua tugas tentu dilandasi nilai-nilai Pancasila. Apalagi moral Pancasila itu diperkuat oleh sumpah dan ikrar Anggota Polri dalam UU Polri dan Tri Brata yang berjanji akan menegakkan hukum NKRI berdasarkan Pancasila serta komitmen moral dalam Catur Prasetya yang di dalamnya Polri bertekad menjamin kepastian hukum dan menjadi garda terdepan dalam politik penegakan hukum dalam negara Pancasila," tegas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GM FKPPI Periode 2019-2024 itu.

Sementara itu, Agus Mohammad Najib menjelaskan bahwa Polri dan seluruh komponen bangsa hendaknya tidak lagi ragu dengan ajaran Bung Karno yang melahirkan Pancasila. Menurut dia, Bung Karno tidak saja menggali Pancasila dari nilai-nilai luhur dan tradisi yang berkembang sejak ratusan tahun di tanah Nusantara, tapi juga mengombinasikannya dengan pemikiran tokoh-tokoh dunia, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Syed Amir Ali, Muhammad Iqbal dari Pakistan, dan banyak pemikir Islam lainnya.

''Jadi, Pancasila yang dilahirkan oleh Bung Karno itu bukan karya main-main, melainkan hasil perenungan panjang yang digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang dan hasil pemikiran tokoh-tokoh dunia,'' jelas Agus Mohammad Najib.

Di bagian lain, Islah Bahrawi menjelaskan, jika Pancasila direnungi dengan baik, seharusnya tak ada satu pun warga Indonesia mempersoalkan religiusitas bangsa ini, apalagi mengangkat isu dibolehkannya ateisme di negeri ini. Justru berbekal keyakinan pada Ketuhanan yang Maha Esa, kata tenaga ahli bidang pencegahan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme Mabes Polri itu, masyarakat Indonesia menjadi rukun tanpa mempersoalkan agama-agama yang berbeda, sedangkan semua penegak hukumnya diharapkan selalu berpatokan pada ajaran agama-agama itu sendiri agar mereka tidak melawan hukum. ❑

Gerakan Literasi Nasional

Lestari Moerdijat: Butuh Dukungan Semua Pihak

Gerakan Literasi Nasional harus mendapat dukungan penuh semua pihak agar tercipta akselerasi pertumbuhan minat baca di seluruh Indonesia sejak dini.

BILA tidak segera melakukan langkah-langkah yang strategis dalam meningkatkan literasi anak bangsa, kita akan sulit bersaing di masa datang," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/7).

Berdasarkan survei dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kemendikbud Ristek, beberapa waktu lalu mengirimkan lebih dari 2,5 juta eksemplar buku pengayaan pendukung ke empat wilayah yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Empat wilayah itu masuk regional 4, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Pembagiannya terdiri atas 41 kabupaten/kota.

Namun, menurut Lestari, upaya pendistribusian jutaan buku oleh Pemerintah itu saja belum cukup untuk mengakselerasi peningkatan literasi anak bangsa.

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, bangsa ini butuh lebih banyak buku dan bahan bacaan, serta atmosfer membaca yang lebih kental lagi di lingkungan generasi muda.

Membangun budaya membaca, ujar Rerie, tidak bisa hanya berfokus pada ketersediaan buku dan bahan bacaan semata.

Lebih dari itu, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, diperlukan langkah yang konsisten dan terukur lewat penerapan program belajar yang mampu membangun budaya membaca sejak dini.

Selain itu, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam upaya perluasan pendistribusian buku dan bahan bacaan, keterlibatan masyarakat dan dunia usaha juga sangat diperlukan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bila pasokan buku dan bahan bacaan bagi generasi muda terjamin, serta pola pengajarannya mendukung peningkatan budaya membaca, Rerie menilai, yang dibutuhkan bangsa ini adalah konsistensi dalam menjamin keberlangsungan sejumlah upaya tersebut

Sehingga, tegas Rerie, sejumlah langkah untuk meningkatkan literasi anak bangsa bisa segera membuahkan hasil, demi mewujudkan daya saing bangsa di masa datang. ❑

Kurikulum Merdeka

Dalam Implementasinya Tidak Boleh Dipaksakan

Banyak pemangku kepentingan berada dalam posisi gamang atau bingung terhadap rencana penerapan Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, untuk implementasinya tak boleh dipaksakan.

ANGGOTA Komisi X DPR ini mengimbau, apabila ada tindakan yang sifatnya memaksakan sesuatu dalam dunia pendidikan agar melapor kepada Komisi X DPR. “DPR yang akan mengawasi,” tuturnya. Menurut Ferdiansyah, berdasarkan kesepakatan dalam rapat yang digelar di DPR bahwa kurikulum tidak boleh dipaksakan. DPR mengambil langkah demikian karena sudah tahu kondisi lapangan, selain juga mendapat informasi saat rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. “Juga berdasarkan informasi dan temuan di lapangan,” ungkapnya. Oleh karena itu DPR mengambil sikap Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan implementasinya di tahun ajaran baru.

Mantan aktivis Angkatan Muda Partai Golkar itu mengatakan, dia tidak alergi dengan perubahan. Ia mempersilahkan perubahan, namun harus dipersiapkan dengan baik. Langkah ini penting, jangan sampai guru dan siswa jadi korban. “Korban mungkin tidak terlihat sekarang, tetapi akan terlihat pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di MPR, Ferdiansyah, mengatakan, Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan. Hal demikian disampaikan saat diskusi Ngopi Seksi yang bertema: ‘Wajibkah Kurikulum Merdeka Diimplementasikan pada Tahun Ajaran Baru?,” 17 Juli 2022. Ferdiansyah menyebut, banyak catatan mengapa kurikulum tersebut tidak boleh dipaksakan.

Diskusi ini menghadirkan, antara lain: Ketua MGMP PPKn Kota Bandung, Dr, Ida Rohayani; Psikolog Pendidikan, Karina Adistiana; Ketua Umum Matematika Nusantara, Moch Fatkoer Rohman; Pakar Pendidikan Lingkungan Hidup, Aulia Wijiasih; dan Pendiri Ikatan Guru Indonesia, Ahmad Rizali.

Lebih lanjut, Ferdiansyah mengungkapkan, banyak pemangku kepentingan atau pihak terkait dalam posisi gamang atau bingung terhadap rencana Kurikulum Merdeka. “Sehingga Kurikulum Merdeka ini tidak boleh dipaksakan dan diimplementasikan,” ujarnya. “Bila dipaksakan hal demikian tidak baik, tidak elok,” tambahnya. Dia menegaskan, tidak semua bidang pendidikan harus dipaksakan.

Anggota Komisi X DPR ini mengimbau, apabila ada tindakan yang sifatnya memaksakan sesuatu dalam dunia pendidikan agar melapor kepada Komisi X DPR. “DPR yang akan mengawasi,” tuturnya. Menurut Ferdiansyah, berdasarkan kesepakatan dalam rapat yang digelar di DPR bahwa kurikulum tidak boleh dipaksakan. DPR mengambil langkah demikian karena sudah tahu kondisi lapangan, selain juga mendapat informasi saat rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. “Juga berdasarkan informasi dan temuan di lapangan,” ungkapnya. Oleh karena itu DPR mengambil sikap Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan implementasinya di tahun ajaran baru.

Mantan aktivis Angkatan Muda Partai Golkar itu mengatakan, dia tidak alergi dengan perubahan. Ia mempersilahkan perubahan, namun harus dipersiapkan dengan baik. Langkah ini penting, jangan sampai guru dan siswa jadi korban. “Korban mungkin tidak terlihat sekarang, tetapi akan terlihat pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Bentuk dari salah langkah itu, menurut Ferdiansyah, bisa membuat siswa tidak bisa melakukan apa-apa dan bingung. Apa yang sudah terjadi harus menjadi pelajaran bersama bahwa perubahan kurikulum ke kurikulum ternyata sudah membuktikan itu. “Perubahan kurikulum tidak bisa dilakukan cepat-cepat,” tegasnya. Perubahan harus dilakukan secara matang, perlahan tapi pasti, dengan tingkat presisi yang lebih baik.

Kurikulum Merdeka, jelas Ferdiansyah, juga membutuhkan anggaran. Dan, soal anggaran ini belum terjawab. Bila kurikulum ini hendak diimplementasikan maka harus mendapat anggaran yang sesuai. “Bila anggaran tidak sesuai membuat gagal,” ucapnya.

Untuk itu, dia menekankan, jangan sampai kebijakan ini terkesan tidak transparan dan akuntable. Dia mengajak kita semua untuk sama-sama megawasi dan menyampaikan masalah ini secara objektif supaya kebijakan di bidang edukasi harus ada persiapan dan kesiapan. “Yuk kita sama-sama mengawasi implementasi Kurikulum Merdeka supaya tidak timbul sesal di saat ini dan masa datang,” katanya. ❑

Kasus Pelecehan Seksual Anak

Yandri Susanto: Hak Hukum dan Masa Depan Korban Diperhatikan

Wakil Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., pelaku kasus pelecehan seksual di sebuah pesantren di Depok segera ditahan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt., menerima kunjungan kuasa hukum dan keluarga korban pelecehan anak di bawah umur, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Para korban yang hadir adalah sebagian dari 11 anak yang dilecehkan secara seksual oleh pengajar dan kakak kelasnya di sebuah pondok pesantren kawasan Beji, Depok, Jawa Barat.

Kedatangan mereka, menurut Megawati, salah satu kuasa hukum yang mendampingi keluarga korban, adalah bagian dari upaya keras para korban untuk mencari keadilan hukum atas kejadian memilukan yang menimpa mereka.

Kepada Yandri, Megawati mengungkapkan bahwa kedatangan mereka menghadap Pimpinan MPR untuk meminta saran dan dukungan, sebab sejak kasus ini bergulir sampai para pelaku ditetapkan sebagai tersangka, sampai hari ini belum ada tindak penahanan kepada mereka.

"Kami hanya berharap keadilan untuk para korban, tersangka harus dihukum. Kedatangan kami menghadap Bapak Yandri akan lebih menguatkan keinginan kami itu," katanya.

Merespon hal tersebut, Pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menegaskan, bahwa dia mengutuk keras perbuatan tidak bermoral yang dilakukan oleh beberapa pendidik itu, apalagi beberapa korbannya adalah anak yatim piatu.

"Kejahatan itu sangat tidak bisa ditolerir. Saya berharap agar para pelaku segera ditahan hari ini atau paling lambat besok," tegas Yandri. Selain itu, lanjut Yandri, para pelaku harus dijatuhi hukuman maksimal, dan para pelaku harus juga diberikan pemberatan hukuman.

Berkaca dari kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Bandung beberapa bulan lalu, menurut Yandri, para tersangka berhasil diringkus, dijatuhi hukuman dengan pemberatan. "Untuk kasus di Depok ini, saya

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berharap selain dijatuhi hukuman pidana biasa, mereka harus dihukum dengan pemberatan khusus, kalau bisa dihukum mati atau kebiri," paparnya.

Langkah keras itu, tegas Yandri, harus dilakukan untuk memperlihatkan betapa seriusnya hukum negara Indonesia dalam menangani kasus pelecehan kepada anak. Hukum yang keras juga bertujuan memberi pesan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi kejahatan yang sangat merusak diri dan masa depan anak yang menjadi korban.

Satu lagi yang harus diperhatikan, kata Yandri, selain terpenuhinya hak-hak hukumnya, para korban juga harus diperhatikan masa depannya. "Kejadian yang mereka alami tentu menimbulkan trauma mendalam dan itu pasti memengaruhi mereka dalam belajar. Bantuan konsultasi dan fasilitas belajar untuk mereka tentu sangat membantu," ujarnya.

Di tengah perbincangan, Yandri bertanya kepada salah seorang korban tentang kegiatan belajar di sekolahnya, yang dijawab korban bahwa dia sudah keluar dari sekolah tersebut. Yandri kemudian menawarkan untuk melanjutkan pendidikan di Ponpes yang dikelolanya.

"Tetap semangat ya, nanti kamu lanjutkan sekolahnya, untuk anak yatim piatu semua gratis. Kamu harus sekolah yang rajin agar ke depan bisa jadi sukses," ujar Yandri, yang dibalas anggukan kepala dan senyum lebar korban. ❑

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Kematian Ibu-Bayi, Stunting dan PPHN Pembangunan SDM

PROGRES pembangunan sumber daya manusia (SDM) masih jauh dari memuaskan. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kecenderungan yang sama juga terlihat pada jumlah kasus stunting atau gagal tumbuh ideal pada balita. Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) akan memberi penekanan khusus pada aspek ini, serta mewajibkan pemerintah pusat-daerah konsisten dengan program-program yang berkaitan dengan pembangunan SDM.

Selain indikator kematian ibu-bayi serta besarnya jumlah kasus stunting, fakta tentang puluhan ribu anak putus sekolah pun jangan sampai luput dari perhatian. Negara harus pro-aktif menunjukkan tanggung jawabnya. Demi masa depan mereka diperlukan intervensi pemerintah untuk mengembalikan puluhan ribu anak itu ke sekolah.

Progres pembangunan SDM dengan ragam permasalahan yang masih mengemuka ini menjadi perhatian khusus MPR RI dalam proses merumuskan PPHN. Melalui PPHN, MPR RI menyegarkan lagi dogma bahwa membangun manusia adalah keniscayaan bagi negara-bangsa. Progres pembangunan negara-bangsa tak boleh hanya diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, progres pembangunan nasional pun harus tercermin pada kesungguhan dan konsistensi membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Kesungguhan dan konsistensi itu hendaknya tercermin pada proses pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan seturut perkembangan dan perubahan zaman, dan mencakup semua aspek yang relevan, seperti aspek pemeliharaan kesehatan dan pendidikan. Selain membentuk pribadi yang nasionalis dan Pancasilais, tujuan utama lainnya dari membangun SDM Indonesia tak lain adalah menyiapkan semua elemen anak bangsa untuk memiliki kompetensi, agar dapat menjadi faktor penentu dalam proses pembangunan di segala sektor atau bidang. Dengan SDM yang kompeten di berbagai bidang, Indonesia dapat mewujudkan keunggulannya dalam persaingan global.

Fokus dan adaptasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan SDM memang menjadi proses tak terhindarkan. Namun, pembangunan sektor kesehatan sebagai pijakan harus juga diutamakan. Setiap pribadi anak bangsa yang sehat jasmani-rohani akan memiliki peluang untuk mengembangkan bakat atau minatnya melalui proses belajar pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena itulah PPHN akan mewajibkan negara-pemerintah untuk selalu menempatkan pembangunan kesehatan sebagai prioritas. Negara-pemerintah harus dan wajib mendorong setiap anak bangsa memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dewasa ini, ketika segenap komponen bangsa bergegas beradaptasi dengan perubahan zaman yang ditandai dengan digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan, sebagian anggota masyarakat yang lemah dan berkekurangan belum terjangkau

oleh program pembangunan SDM. Mereka masih harus bergulat untuk sekadar dapat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan.

Karena pembangunan SDM belum menjangkau semua elemen masyarakat, Indonesia masih mencatatkan angka kematian yang tinggi pada ibu-bayi. Tidak sedikit pula jumlah Balita (bayi di bawah lima tahun) yang gagal tumbuh ideal karena menderita kekurangan gizi kronis (stunting). Dan, dalam tahun-tahun terakhir ini, puluhan ribu anak berstatus putus sekolah karena beberapa alasan.

Pemerintah dan masyarakat pada umumnya tentu saja tidak boleh tutup mata terhadap rangkaian fakta ini. Fakta-fakta itu sekadar mengonfirmasi bahwa mereka yang lemah dan berkekurangan patut mendapatkan perhatian dan empati dari negara dan masyarakat. Untuk alasan itulah MPR RI menetapkan PPHN tentang pembangunan SDM sebagai agenda atau program prioritas.

Dalam beberapa kesempatan, pemerintah sudah dan sering mengonfirmasi bahwa angka kematian Ibu dan bayi di Indonesia terbilang masih tinggi. Pada November 2021, misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengingatkan bahwa angka kematian ibu dan bayi mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, dan kenaikannya sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Data dari Kementerian Kesehatan Tahun 2020 menyebutkan bahwa jumlah angka kematian ibu mengalami peningkatan 4.627 kasus.

Kecenderungan itu sepertinya terkonfirmasi di Jawa Timur. Pada Desember 2021 dilaporkan bahwa kematian ibu hamil dan bayi di Jawa Timur mencapai 1.127 kasus dari periode Januari hingga September 2021.

Selain itu, data Sampling Registration System (SRS) pada tahun 2018 melaporkan bahwa sekitar 76% kematian ibu terjadi di fase persalinan dan pasca persalinan. Dan, lebih dari 62% kematian ibu dan bayi terjadi di rumah sakit.

Tahun 2020, dilaporkan bahwa kematian bayi Balita mencapai 28.158 jiwa. Dari jumlah itu, 20.266 Balita (71,97%) meninggal dalam rentang usia 0-28 hari (neonatal). Sebanyak 5.386 balita (19,13%) meninggal dalam rentang usia 29 hari-11 bulan (post-neonatal). Dan, 2.506 balita (8,9%) meninggal dalam rentang usia 12-59 bulan. Sekitar 35,2% kematian Balita neonatal disebabkan berat badan terbilang rendah saat lahir.

Masih terkait kesehatan Balita adalah persoalan stunting atau kekurangan gizi yang menyebabkan bayi gagal tumbuh ideal. Menurut data hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting Indonesia masih di angka 24,4%.Meskipun angkanya cenderung turun dari tahun ke tahun, masalah ini hendaknya tidak disederhanakan.

Aspek lain dari pembangunan SDM yang harus segera ditangani adalah nasib puluhan ribu anak yang putus sekolah. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada 2021, tak kurang dari 75.303 orang anak putus sekolah.

Jumlah terbanyak anak putus sekolah tercatat di tingkat sekolah dasar (SD), mencapai 38.716 anak. Pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP), jumlah anak putus sekolah tercatat 15.042 anak. Dan, pada tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK), tercatat 12.063 anak putus sekolah.

Rangkaian masalah ini tersebar di berbagai daerah. Semua pemerintah daerah (Pemda) diharapkan peduli terhadap persoalan-persoalan itu. Jika setiap Pemda peduli, semua permasalahan itu bisa ditangani, karena Pemda memiliki sumber daya yang lebih dari cukup.

Keseluruhan aspek pembangunan SDM ini tidak pernah lagi boleh diabaikan. Untuk alasan inilah, PPHN akan mewajibkan pemerintah pusat-daerah konsisten dengan program-program yang berkaitan dengan pembangunan SDM. ❑

Konflik Ukraina - Rusia, Apa Peran Indonesia?

Dalam sejarah perdamaian dunia, Indonesia banyak berperan. Diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Soeharto memberi dampak yang sangat berarti bagi perdamaian di kawasan regional maupun internasional. Hal demikian membuat posisi Indonesia dikenal dan disegani banyak negara. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam ikut menyelesaikan sengketa Ukraina dan Rusia? Berikut pendapat wakil rakyat terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia.

Effendi Simbolon Anggota MPR Fraksi PDIP

Menjalankan Amanat Pembukaan UUD

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SAYA pernah mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Indonesia dalam forum rapat kerja agar Presiden Joko Widodo sebagai Presidensi G20 di dalam konflik Rusia-Ukraina berada dalam posisi untuk memberi solusi dan menengahi. Meski dalam rapat kerja itu banyak pertanyaan yang salah satunya apa urusan kita dengan perang Ukraina-Rusia, tapi saya tetap mendorong agar bangsa ini berperan seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno dalam ikut mendamaikan konflik di dunia.

Kalau ditanya efektif atau tidak diplomasi itu, ya mari kita lihat prosesnya. Saya bersyukur Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara bisa hadir dan datang di Kiev Ukraina. Itu merupakan suatu langkah yang extraordinary, luar biasa, sekaligus menunjukkan peran Indonesia, bukan hanya peran Presiden Joko Widodo namun juga peran Indonesia di kancah dunia. Tema pembicaraan seputar imbauan untuk menghentikan perang, gencatan senjata, berdialog seputar itu.

Ada beberapa hal sepertinya sulit untuk dimasukkan dalam solusi, yakni masalah kepastian tidak masuknya NATO serta Uni Eropa, juga terkait wilayah yang berbudaya dan berbahasa Rusia harus dilepas dari wilayah Ukraina. Menurut saya itu akan sulit.

Saya mendengar bahwa proses Presiden ke Kiev ini sangat diuntungkan, karena hasil pertemuan G-7 di Jerman sangat kondusif. Hanya dua negara, Canada dan Amerika Serikat, yang tidak memberikan persetujuan secara terbuka, tetapi lima negara yang menjadi G-7 dan partner mendorong dan tetap maju untuk melakukan terobosan. Saya kira satu langkah yang luar biasa dan diawali dengan pertemuan G-7 yang sukses, meski suasana pertemuan itu informal, namun mereka tidak melakukan katakanlah upaya untuk menghambat kunjungan ke Kiev dan Rusia.

Jadi pertemuan tersebut bukan hanya mendapat manfaat dari hubungan multilateral sebagai Presidensi G-20, namun kita juga mendapat manfaat dari hubungan bilateral, baik dari Perancis maupun Inggris seperti mendapatkan, misalnya, transfer teknologi dan food.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dalam diplomasi ini. Saya bagian dari yang ikut mendorong beliau ke Rusia dan Ukraina. Saya positif thinking. Beliau sangat tulus bahkan membawa Ibu Negara. Saya percaya, siapa tahu berkat tangan Tuhan, Rusia-Ukraina bisa berdamai karena ada pemimpin yang menjabat sebagai Presidensi G-20 dan sebagai Presiden yang menjalankan amanah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, konstitusi, yang mengamanatkan turut serta ikut menjaga perdamaian dunia. ❑

AWG

Dave Akbarshah Fikarno Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Diplomasi yang Mengambil Resiko Besar

KUNJUNGAN Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia memang sudah dirancang dan kelanjutan dari pertemuan G-7, juga dalam rangka menyukseskan pertemuan G-20 Tahun 2022 di Bali. Ini adalah satu beban yang luar biasa yang pikul dan Presiden berani ambil dan beresiko besar. Resiko yang besar itu bukan hanya masuk ke suatu wilayah medan tempur, akan tetapi dalam pertemuan G-7 diharapkan Presiden bisa menjadi juru damai.

Masalah Ukraina-Rusia tentu tidak mungkin diserahkan sepenuhya kepada Presiden. Juga dibutuhkan perubahan sikap dan kebijakan politik luar negeri dari negara-negara Barat, sebab pertempuran yang terjadi di Ukraina tidak terjadi dalam sekejap mata.

Faktor menyebab terjadinya konflik, diawali sekitar 15 tahun yang lalu saat negara-negara Barat mulai memprovokasi dengan melakukan kegiatan yang lebih aktif di Ukraina. Hal demikian diakui oleh Rusia bisa mengancam kedaulatan Rusia sehingga masalah semakin menumpuk hingga terjadinya perang.

Pertempuran yang sekarang terjadi di Ukraina tidak hanya berdampak kepada kedua Negara, namun juga mengganggu stabilitas tidak hanya kawasan, namun juga membawa kita ke krisis pangan dan krisis energi. Indonesia pun terkena dampak dari masalah ini. Jadi hal ini bukan hanya kepentingan segelintir elit, namun kepentingan dunia.

Jadi diplomasi yang dilakukan oleh Presiden adalah hal yang luar biasa dengan mengambil resiko sangat besar, dan bilamana perundingan gagal atau tidak mengalami proses yang berarti, juga bisa berdampak kepada posisi Indonesia di percaturan politik internasional.

Jadi, bila mana berhasil ini akan memberikan point luar biasa dan mungkin ke depan Presiden diberikan penghargaan ataupun minimal nominasi atau mendapatkan posisi yang lain di bilateral, seperti Sekjen PBB atau yang lain. Nah, semua bergantung bagaimana Indonesia bisa memainkan posisi kita. Bukan untuk menekan akan tetapi mengajak berunding untuk bisa mencari solusi yang bisa diterima semua pihak. ❑

AWG

Perbaiki Sistem Pendidikan

Cegah Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak

Perbaikan sistem pendidikan terkait pendidikan seks terhadap anak harus segera dilakukan, mengingat fenomena ancaman kekerasan seksual di lingkungan anak-anak mengemuka di tengah masyarakat.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/7), menyatakan, sistem pendidikan kita harus segera diperbaiki dengan memberi pendidikan seksual terhadap anak sesuai usianya, sehingga anak-anak kita terhindar dari tindak kekerasan seksual yang marak belakangan ini.

Lestari prihatin dengan peristiwa meninggalnya seorang anak 11 tahun, akibat depresi setelah dipaksa oleh teman-temannya memperkosa seekor kucing. Peristiwa itu, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera direspon dengan serius oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Derasnya arus informasi di era digitalisasi saat ini, menurut Rerie, harus diimbangi dengan pemahaman yang mumpuni sejak dini agar setiap warga negara memiliki pondasi yang kuat terkait pentingnya akhlak yang baik, saling menghormati, dan saling mengasihi antarmanusia.Termasuk pemahaman mengenai seksualitas.

Pendidikan dini akhlak dan seksual, ujar Rerie, penting untuk pondasi berpikir ketika dewasa. Karena, tambahnya, rekaman terbaik memori manusia terjadi pada usia dini.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali.

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong para pengelola lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun yang berbasis keagamaan, mempersiapkan tenaga pengajarnya dengan baik agar mampu memberi pemahaman kepada para peserta didik lewat pendidikan seks yang disesuaikan dengan usia para peserta didik.

Rerie berharap, pemberian pendidikan seks yang tepat kepada para peserta didik dapat mencegah anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual yang marak terjadi belakangan ini.

Selain itu, ujar Rerie, dukungan dari para orangtua dalam memberi pemahaman tentang seks terhadap anak-anaknya juga sangat diperlukan, agar anak-anak paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait alat reproduksi mereka.

Rerie mengajak semua pihak untuk bergandeng tangan segera mengambil langkah yang tepat untuk mencegah peristiwa terulang kembali. Karena, tegas Rerie, anak-anak adalah masa depan bangsa.

"Ancaman tindak kekerasan seksual terhadap anak akan membuat kesehatan fisik dan mental anak terganggu yang bisa berujung pada suramnya masa depan bangsa ini," pungkasnya.

Pada kesempatan menjadi pembicara kunci di seminar bertema 'Sinergi KPI dengan Elemen Masyarakat Menyongsong Masa Depan Penyiaran Indonesia' di Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Jumat (22/7), Lestari Moerdijat mengajak perguruan tinggi untuk aktif mengambil peran guna mempersiapkan masyarakat sejak dini agar melek literasi digital terkait konten.

Karena dengan berkembangnya teknologi, setiap orang bebas menciptakan ragam konten melalui platform yang tersedia, baik melalui video maupun media lainnya.

Peristiwa pembullian anak oleh anak dan disebarkan ke masyarakat lewat media sosial sehingga korban meninggal, ujarnya, adalah dampak dari tidak adanya pemahaman literasi terkait konten di dunia digital.

Dampaknya, tegas Rerie, banyak konten jauh dari nilai-nilai kehidupan budaya, budi pekerti, moral, berbangsa dan cenderung destruktif dalam kehidupan sosial.

Menurut Rerie, penyiaran memiliki kemampuan untuk meneguhkan konfigurasi nasionalisme, kedaulatan, dan kewarganegaran suatu bangsa lewat konten-konten yang mendidik.

Karena itu, tegasnya, ragam penyiaran yang diproduksi dalam berbagai konten mesti berlandaskan semangat untuk mengokohkan pilar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Konten penyiaran, tegas Rerie, harus mampu menjadi acuan masyarakat dalam rangka menyaring informasi yang tersebar bebas lewat sosial media. ❑

Lewat JIM
Mendamaikan Negara Tetangga

Lewat diplomasi yang panjang dan berjilid, Indonesia mampu mendamaikan konflik Kamboja dan Vietnam. Upaya yang dirintis oleh Indonesia mendapat respon positif dari dunia internasional sehingga mempercepat proses pemulihan dan stabilitas politik, pangan, dan keamanan di kawasan yang disebut Indochina. Langkah Indonesia dipuji banyak pemimpin dunia, di mana pada masa itu Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev menyebut Indonesia sebagai salah satu negara penting dalam perdamaian dunia.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Siem Reap

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ROMBONGAN wisatawan dari Indonesia itu tampak sangat bahagia ketika berada Siem Reap. Di salah satu provinsi negara Kamboja itu terdapat berbagai tempat wisata, mulai dari *night market*, pasar tradisional, bangunan tua peninggalan Perancis, serta yang sangat terkenal Angkor Wat. Di Siem Reap para wisatawan itu gelap mata terhadap souvenir yang ada. Mereka memborong oleh-oleh khas negeri itu, karena waktu itu, nilai rupiah lebih tinggi daripada mata uang lokal. Banyaknya wisatawan ke Siem Reap membuat pelaku wisata di sana mau menerima Dolar Amerika Serikat.

Selepas menikmati Siem Reap, rombongan wisatawan yang menggunakan bus itu melanjutkan perjalanannya ke Pnom Penh, Ibu Kota Kamboja, hingga akhirnya sampai Ho Chi Minh, Vietnam. Selama dalam perjalanan, mereka melihat Kamboja dan Vietnam negeri yang damai. Ladang dan sawah terhampar di kanan kiri jalan. Sesekali terlihat perkampungan penduduk.

Sebagai negara yang berpenduduk tidak sepadat Indonesia membuat lintasan yang ada relatif lengang, jauh disbanding kondisi jalan di Pantura. Di tambah dengan suhu yang sejuk, sehingga menambah kesan damai di Kamboja dan Vietnam.

Di antara puluhan wisatawan bisa jadi banyak yang tidak tahu bahwa kawasan dua negara itu dulu merupakan daerah konflik, peperangan, bahkan disebut ada genosida. Selepas Perang Dunia II, di berbagai belahan dunia terjadi pengutuban pada salah satu blok dunia, Blok Barat dan Blok Timur. Baik Barat maupun Timur berusaha keras untuk menarik negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, bahkan di Eropa sendiri untuk menjadi bagian dari dirinya. Hal demikian juga terjadi di Kamboja dan Vietnam.

Tarik menarik kutub tersebut terasa di Kamboja pada tahun 1970. Pada saat itu, kekuasaan sah dari Perdana Menteri

Ho Chi Minh

Pol Pot

Kamboja Norodom Sihanouk digulingkan oleh Jenderal Lon Nol. Penggulingan yang terjadi disebabkan ada anggapan Sihanouk cenderung ke garis politik Blok Timur. Entah karena kepentingan Amerika terhadap Kamboja maka disentuhlah Lon Nol yang pro Amerika untuk melakukan kudeta. Bukti Sihanouk lebih dekat ke Timur terbukti saat dirinya dikudeta, ia melarikan diri ke Cina dan Korea Utara.

Lon Nol pun memegang kekuasaan di Kamboja pada tahun 1970 hingga 1975. Atas perbuatan dirinya melakukan kudeta rupanya berbuah karma. Pada tahun 1975, dia dikudeta oleh Pol Pot. Perebutan kekuasaan dilakukan oleh pria yang terlahir dengan nama Saloth Sar itu berhasil, dan dia pun menduduki kursi Perdana Menteri.

Nah masalahnya, pria yang berideologi Marxis–Leninis dan nasionalis Khmer itu disebut oleh banyak pihak sangat bengis dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam *Wikipedia* diceritakan, ia mengubah sistem politik di negaranya dengan cukup satu partai. Ia pun menciptakan masyarakat sosialis agraria yang diyakini menjadi masyarakat komunis. Pol Pot secara paksa memindahkan masyarakat kota ke wilayah pedesaan untuk bekerja di pertanian kolektif. Demi mengupayakan kesetaraan penuh, uang dihapuskan dan seluruh warga negara diperintahkan untuk mengenakan busana hitam yang sama. Pembantaian terhadap para lawan pemerintahan, ditambah dengan malnutrisi dan layanan kesehatan yang buruk, menewaskan antara 1,5 hingga 2 juta orang, atau sekitar seperempat populasi Kamboja saat itu. Peristiwa tersebut kini dikenal dengan sebutan genosida Kamboja.

Disebut pula Pol Pot melakukan pemurnian terhadap ras Kamboja. Untuk itu, mereka yang berada di Kamboja, yang berdarah keturunan (Vietnam), mengalami nasib yang sama dengan mereka yang menjadi lawan dan korban kebijakan agraris Pol Pot, mati kelaparan atau dibantai.

Genosida kepada warga keturunan Vietnam inilah yang membuat Vietnam marah sehingga negara yang berhaluan sama dengan Pol Pot itu, komunis, melakukan operasi militer di Kamboja, daerah pebatasan. Pada tahun 1978, kali pertama terjadi bentrokan antara tentara Kamboja dan Vietnam.

Vietnam rupanya tidak main-main dalam masalah ini. Serbuan yang dilakukan di wilayah perbatasan akhirnya melaju lebih jauh hingga mampu menggulingkan kekuasaan Pol Pot pada tahun 1979. Agar genosida tidak terjadi lagi maka ditunjuklah Heng Samrin sebagai pengganti Pol Pot.

Ditunjuknya Heng Samrin sebagai pemimpin de facto Republik Rakyat Kamboja yang didukung Hanoi, menimbulkan reaksi keras dari kalangan nasionalis Kamboja. Mereka yang sebelumnya berselisih, bersatu untuk melawan pemerintahan yang disebutnya sebagai Boneka Vietnam. Mereka yang berasal dari organ *Front Uni National pour un Cambodge Independent Neutre Pacifique et Cooperatif* (FUNCINPEC) dan *Khmer People Liberation Front* (KPNLF) membentuk *Coalition Government of Democratic Kampuchea* (CGDK).

Konflik antara kaum nasionalis Kamboja, pemerintahan bentukan Vietnam di Kamboja, dan Vietnam rupanya menjadi panjang. Kawasan itu sejak tahun 1970 menjadi ladang konflik banyak pihak. Pastinya hal yang demikian sangat memprihatinkan, sebab merugikan rakyat dan kedaulatan kedua negara. Hal demikianlah yang menimbulkan kepedulian banyak pihak untuk ikut memikirkan bagaimana konflik yang terjadi bisa segera diselesaikan.

Meski Kamboja dan Vietnam saat itu belum menjadi anggota ASEAN, namun organisasi ini serius untuk menjadi penengah dari konflik yang terjadi. Saat pertemuan tingkat menteri ASEAN yang digelar pada Mei 1984 di Jakarta, agenda yang dibahas pada pertemuan itu adalah rekonsiliasi nasional dan pembahasan upaya penyelesaian konflik Kamboja melalui jalan damai. Sebagai negara besar, anggota ASEAN, dan sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, maka Indonesia tampil ke depan untuk menjadi penengah atau juru damai atas apa yang

terjadi di Kamboja dan Vietnam.

Bagi Indonesia menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah di Kamboja telah dirintis sejak Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja. Di masa-masa itulah konflik di sana terjadi dan memanas. Dalam *www.academia.edu//Makalah_Sejarah_Jakarta_Informal_Meeting,* disebut Mochtar Kusumaatmaja secara aktif menyusun berbagai strategi sebagai *interlocutor* guna mengupayakan penyelesaian konflik secara damai di Kamboja. Ia merintis perjuangan awal diplomasi Indonesia untuk mengundang para pihak terkait yang terlibat dalam pertikaian untuk duduk bersama di meja perundingan dan mengusulkan agar pertemuan yang dimaksud harus diadakan di tempat yang netral, seperti Indonesia agar pihak-pihak bertikai merasa bebas dalam membicarakan masalah Kamboja dan masa depannya.

Meski selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja tidak lagi menjadi pembantu Presiden Soeharto, namun proses perdamaian tetap berlanjut, diteruskan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Dalam web di atas disebutkan, Alatas sebagai tokoh kunci terhadap jalannya berbagai proses mediasi hingga tercapai suatu babak baru dalam lembaran sejarah perdamaian di Kamboja. Tahun 1988, Ali membuat kejutan dengan melakukan kunjungan perkenalan ke ibu kota negara-negara ASEAN dalam rangka menindaklanjuti usulan menteri sebelumnya untuk mengadakan pertemuan informal di Jakarta.

Upaya untuk melakukan pertemuan tidak resmi itu tentu bukan pekerjaan mudah. Sulit untuk menyakinkan kepada pihak dan negara bertikai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berbagai rintangan dan tantangan tersebut bisa dilalui dengan sukses, terbukti pihak dan negara yang bertikai mau menurunkan ego mereka sehingga bersedia untuk datang ke Jakarta.

Pada 25 sampai 28 Juli 1988 di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, digelarlah *Jakarta Informal Meeting* (JIM). Pada pertemuan itu hadir Norodom Sihanouk dari Koalisi Demokratik Kamboja, Hun Sen dari Republik Rakyat Kamboja, Nguyen Co Tach wakil pemerintah Vietnam, dan Indonesia sebagai penengah diwakili oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Dari JIM ini akhirya ada 3 kesepakatan yang disetujui oleh para perunding. *Ketiga kesepakatan tersebut adalah: pertama, gencatan senjata antara kedua belah pihak. Kedua, pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Ketiga, penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan.*

Haparan masalah di Kamboja dan Vietnam selesai dalam pertemuan tersebut rupanya belum tercapai. Meski demikian pertemuan tersebut membawa kemajuan yang sangat berarti. Pihak-pihak di luar ASEAN pun menaruh harapan pada perdamaian yang digagas di Indonesia.

Agar masalah di kawasan yang disebut Indochina itu selesai maka digelarlah kembali JIM. Pertemuan yang diadakan untuk kedua kalinya itu disebut JIM II. JIM II ini digelar pada 16 hingga 18 Februari 1989. Dalam JIM II yang diikuti oleh Perdana Menteri Australia Gareth Evans itu disepakati: *pertama, mendorong upaya gencatan senjata. Kedua, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik. Ketiga, mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan.*

Meski selepas pertemuan JIM II masalah di Kamboja dan Vietnam belum selesai, namun pertemuan itu semakin memancing perhatian dunia internasional. Dunia internasional semakin peduli atas upaya perdamaian di sana. Bukti dari semakin pedulinya internasional adalah hasil dari pertemuan JIM II ditindaklanjuti dalam pertemuan *Paris International Conference on Cambodia* (PICC).

Pertemuan yang digelar di Paris, Perancis, 23 Oktober 1991, yang diketuai bersama Indonesia dan Perancis itu menghasilkan *Paris Peace Agreement* (PPA) yang ditandatangani oleh 19 negara. Dalam *Kompas.com*, 17.03/2021, disebut PPA membawa dampak nyata bagi masa depan Kamboja. Setelah perjanjian itu, Vietnam menarik diri sepenuhnya tanpa syarat dari Kamboja. Semua tawanan perang dilepaskan, seluruh pasukan militer ditarik dari Kamboja. Pengaturan kedaulatan, teritorial, penyelesaian politik konflik, serta rekonstruksi dikembalikan ke Kamboja. Dari PPA itulah konflik internal serta perang antara Vietnam dan Kamboja selesai dan berakhir damai. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Bertarung Nyawa Demi Perdamaian di Bosnia

Program keterbukaan yang diluncurkan Mikhail Gorbachev membawa angin perubahan di kawasan Eropa Timur. Negara-negara besar runtuh. Upaya Bosnia memerdekan diri dari Jugoslavia tidak semudah seperti yang dilakukan Kroasia dan Slovenia. Konflik kemanusiaan yang terjadi mengundang perhatian Presiden Soeharto untuk melawan ke Bosnia. Di tengah perang yang hebat, Soeharto menyampaikan pesan perdamaian dan mendukung kemerdekaan Bosnia.

KEMATIAN Presiden Jugoslavia Josip Broz Tito pada 4 Mei 1980 membawa dampak yang sangat serius bagi negara yang berada di kawasan itu. Di bawah pria yang akrab disebut Tito, Jugoslavia merupakan salah satu negara di Eropa dan dunia yang disegani. Meski negaranya cenderung dan dekat, bahkan menjadi bagian dari Blok Timur yang komunis namun Tito bersama dengan Presiden Soekarno dari Indonesia, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir mendirikan gerakan yang tidak berada di Blok Timur dan Blok Barat, yakni Gerakan Non Blok (GNB).

Tegas sebagai presiden membuat Tito mampu mempersatukan berbagai etnis dan agama di Jugoslavia sehingga dirinya disebut sebagai Bapak Jugoslavia. Pemerintahan yang dikendalikan pun terbilang lama, 1953 hingga 1980. Sebelum ia menjadi presiden, banyak jabatan lain yang dipangkunya, seperti Menteri Pertahanan. Di saat menjabat sebagai Presiden, ia menyambi jabatan lain, misalnya Perdana Menteri dan Sekretaris Jenderal GNB.

Selepas Tito tutup usia, Jugoslavia mengalami banyak gonjangan politik hingga akhirnya bubar. Mereka terdiri dari berbagai etnis yang menempati wilayah Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Republik Makedonia, Kosovo, dan Vojvodina, mulai menuntut memisahkan diri dari Jugoslavia atau menuntut lebih otoritas dan otonomi wilayahnya.

Suasana di Jugoslavia semakin panas ketika dari Uni Soviet, sebagai pemimpin tertinggi Blok Timur, muncul arus politik yang disebut dengan *perestroika* dan *glasnost*. Gerakan yang membawa angin reformasi dan keterbukaan itu tidak hanya melanda di tubuh Partai Komunis Uni Soviet, namun juga

Josip Broz Tito

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

partai komunis di seluruh wilayah Eropa Timur dan masyarakat di sana.

Keterbukaan yang akhirnya membawa keruntuhan Blok Timur dan bubarnya Uni Soviet, di Jugosalvia ditandai dengan kekalahan Partai Komunis dalam pemilu pertama yang diikuti oleh banyak partai. Partai Komunis hanya menang di Serbia dan Montenegro. Di Kroasia, Slovenia, Bosnia, Makedonia, Kosovo, dan Vojvodina, Partai Komunis kalah dengan partai-partai yang berhaluan nasionalis. Pemilu Raya multi partai itu dilakukan pada tahun 1990.

Pemilu yang digelar rupanya juga membangkitkan sikap keetnisan wilayah-wilayah di Jugoslavia. Hal ini diawali oleh Kroasia dan Slovenia. Dua wilayah itu memproklamasikan memisahkan diri dari negara induk dan menyatakan merdeka pada 15 Juni 1991. Kroasia dan Slovenia merdeka didukung oleh masyarakat Eropa, terutama negara-negara yang masuk dalam Blok Barat. Kroasia dan Slovenia merdeka juga memancing keinginan wilayah yang lain, seperti Bosnia untuk melakukan hal yang sama, lepas dari Jugoslavia.

Keinginan untuk melepaskan diri dari banyak wilayah di Jugoslavia rupanya tidak diinginkan oleh pemimpin Serbia. Mereka tetap ingin agar Jugoslavia utuh. Dari sinilah muncul konflik kemanusiaan, terjadi peperangan antara Serbia dengan negara-negara yang ingin memisahkan diri. Masalah antara Serbia dan Kroasia serta Slovenia cepat terselesaikan karena masyarakat Eropa berada di belakang kedua negara itu.

Ketika Kroasia dan Slovenia sudah menjadi negara berdaulat, lain halnya dialami Bosnia. Di wilayah ini masalah kemanusian muncul dan mengundang keprihatinan, terutama bagi negara-negara Muslim sebab di sana mayoritas etnis yang ada adalah kaum Muslim.

Apa yang terjadi di Bosnia menjadi perhatian Presiden Indonesia Soeharto. Dengan kapasitas sebagai Ketua GNB, Soeharto ingin melakukan lawatan ke Bosnia. Diceritakan di banyak media, keinginan

Soeharto untuk melawat ke Bosnia ditentang oleh PBB. Alasannya, di kawasan itu masih terjadi perang. Perang yang terjadi tidak hanya membunuh tentara kedua belah pihak dan masyarakat sipil Bosnia, namun juga menewaskan pihak-pihak yang ingin menyelesaikan peperangan. Pada 11 Maret 1995, pesawat yang mengangkut utusan PBB ditembak jatuh saat berada di wilayah Bosnia.

Cerita horor itu tidak membuat Soeharto ciut nyali. Ia tetap bergeming untuk tetap melawat ke Bosnia. PBB pun akhirnya menyerah dengan kemauan itu sehingga diizinkanlah presiden kedua Indonesia itu menuju ke Bosnia, namun dengan syarat menandatangani surat yang isinya bila terjadi apa-apa atas keselamatan dirinya, PBB tidak bertanggungjawab. Perang bagi Soeharto bisa jadi adalah masalah yang biasa, sebab dirinya kerap berada dalam situasi seperti itu, seperti dalam Peristiwa Serangan Kilat di Yogyakarta, dan sebagai Komando Mandala untuk merebut Irian Jaya (Papua) dari Belanda.

Sebelum ke Bonsia, Soeharto lebih dahulu melakukan lawatan ke Kroasia. Di negara ini, ia bertemu dengan Presiden Franjo Tudjman. Setelah mengadakan diplomasi dengan negara yang berbatasan dengan Bosnia, selanjutnya pada 13 Maret 1995 menuju ke Sarajevo, Ibu Kota Bosnia. Dalam pesawat

carteran menuju ke Sarajevo, hanya ada 15 orang, selain dirinya ada Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, Menteri Luar Negeri Ali Alatas, diplomat senior Nana Sutresna, ajudan presiden Kolonel Soegijono, Komandan Grup A Paspampres Kolonel Sjafrie Sjamsoeddin, juru foto kepresidenan Saidi, wartawan, utusan PBB, dan beberapa orang yang lainnya.

Dalam penerbangan, detik-detik menegangkan terjadi. Menurut Sjafrie, seperti yang ada dalam buku *Pak Harto: The Untold Storeis*, dirinya yang duduk di belakang Soeharto meminta agar helm dan rompi anti peluru dikenakan. Saran itu rupanya ditolak oleh Soeharto. Rompi anti peluru seberat 12 kg itu rupanya disuruh dibawa saja. “Eh, Sjafrie, itu rompi itu kamu *cangking* (bawa) saja. Kamu *cangking* saja,” ujar Soeharto.

Setelah mendarat di Serajevo, ketegangan yang lebih mengerikan terjadi. Lapangan terbang yang ada dalam kondisi gawat, baik tentara Serbia maupun Bosnia menguasainya. Serbia menguasai landasan dari ujung ke ujung. Sedang kiri-kanan landasan dikuasai Bosnia. Sjafrie pun melihat senjata 12,7 mm, di mana senjata itu mampu menjatuhkan pesawat.

Ketegangan belum selesai. Rombongan harus melewati wilayah yang disebut dengan *Sniper Valley*. Daerah ini merupakan medan pertempuran para penembak runduk dari Serbia dan Bosnia. Pengamanan pun dilakukan, selain menggunakan angkutan anti bom dan peluru, Panser VAB, Sjafrie juga melakukan kamuflase untuk mengelabui para penembak yang ingin mencelakai Soeharto. Sjafrie pada saat itu berdandan seperti pakaian yang digunakan Soeharto, yakni menggunakan kopiah dan mantel panjang. Ini dilakukan agar dirinya mirip orang nomer satu di Indonesia itu sebagai upaya untuk mengelabui penembak jitu.

Akhir dari perjalanan membawa Soeharto tiba di Istana Presiden Bosnia, dan di sana mengadakan pertemuan dengan Presiden Bosnia Alija Izetbegovic. Meski berada di istana namun tak jauh darinya, radius 3 km, masih terdengar suara tembakan meriam. Tak hanya terdengar tembakan, sesuatu yang memprihatinkan juga terasa di sana, yakni untuk mendapat air bersih sulit. Sebagai bangunan yang berada di Sarajevo, istana dan wilayah kota lainnya mengalami porak poranda akibat peperangan yang terjadi.

Dalam buku *Pak Harto: The Untold Storeis,* Sjafrie bertanya pada Presiden Soeharto, mengapa berani mengunjungi Bosnia yang masih dalam kondisi peperangan hebat dan berani bertarung nyawa. Pertanyaan itu dijawab oleh Seharto dengan mengatakan: “Ya kita kan tidak punya uang. Kita ini pemimpin Negara Non Blok tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang ya kita datang saja. Kita tengok”. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Mencari Jalan Damai di Ukraina – Rusia

Dengan kapasitas sebagai Presidensi G20, Indonesia ikut aktif mendamaikan Perang Ukraina-Rusia. Kehadiran Joko Widodo di Ukraina dan Rusia langsung disambut oleh Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin. Oleh pengamat dalam negeri, langkah Joko Widodo disebut juga mempertegas posisi politik Indonesia yang Non Blok dan bebas aktif.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SELEPAS Perang Dunia II, konflik bersenjata bukan menjadi pilihan bagi bangsa-bangsa di Eropa. Pengalaman Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang menelan jutaan korban manusia dan hancurnya kota-kota yang ada menjadi trauma bagi mereka. Pengalaman yang demikian menjadikan bangsa Eropa lebih memilih jalan damai bila terjadi sengketa.

Perang bukan suatu pilihan untuk memaksakan kehendak rupanya gagal dijaga oleh bangsa-bangsa di Eropa, buktinya pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi militer ke Ukraina. Bukan tanpa sebab Rusia melakukan hal yang demikian. Sebagai tetangga bahkan sesama pengguna bahasa dan budaya, Rusia melakukan pengerahan pasukan besar-besaran untuk menundukkan Ukraina guna suatu alasan menjaga kedaulatan dan wibawa, negara, bahasa, dan budaya Rusia. Perang tidak akan terjadi bila NATO tidak mengiming-iming negara-negara pecahan Uni Soviet dan Blok Timur, terutama Ukraina, untuk menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu.

Perang yang terjadi pada 24 Februari 2022 hingga tulisan ini dibuat masih terjadi. Perang demikian masifnya sehingga membuat ribuan orang Ukraina mengungsi ke berbagai negara Eropa. Kota-kota hancur dan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berbagai aktivitas di Kota Kiev serta tempat-tempat lain di Ukraina terhenti, bahkan mati meski dalam perjalanan selanjutnya kehidupan di Kiev kembali normal.

Melihat hal yang demikian, berbagai negara dan badan-badan dunia, seperti PBB, EU, NATO, mencari jalan agar perang segera selesai dan masalah antara Rusia dan Ukraina bisa diselesaikan. Indonesia sebagai negara yang letaknya jauh dari kedua negara itu juga ikut prihatin atas apa yang terjadi. Sebagai negara yang kerap berpartisipasi dalam perdamaian dunia, bangsa ini juga berpikir bagaimana konflik senjata yang terjadi segera disudahi.

Dengan kapasitas sebagai Presidensi G20, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Kunjungan dilakukan sebagai upaya ikut aktif mendamaikan dan mencari solusi terbaik bagi masalah yang ada. Selepas melakukan Pertemuan G7 di Jerman pada 26 - 28 Juli 2022, Joko Widodo melakukan misi itu. Diawali kunjungan ke Kiev hingga Moscow.

Misi perdamaian Joko Widodo, menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (HI) Hikmahanto Juwana, dalam *Kompas.com - 05/07/2022,* merupakan langkah yang sangat positif sehingga diharapkan dapat menghasilkan genjatan senjata, terutama serangan Rusia. “Tentu gencatan senjata tidak akan dirasakan langsung tetapi perlahan-lahan akan berkurang”, ujarnya dalam media itu.

Lebih lanjut dikatakan, agenda kunjungan yang dilakukan sangat cerdas, khususnya dengan membawa gambaran krisis pangan di negara-negara berkembang akibat perang yang tidak berkesudahan. Menurutnya, Joko Widodo menyampaikan terlepas dari alasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya, bahwa perang akan membawa penderitaan pada rakyat banyak di negara berkembang.

Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. DW Tadeus, dalam *Kompas.com - 01/07/2022*, menilai, kunjungan Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina mempertegas posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Indonesia disebut mempertegas *standing position* dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina, yaitu prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kunjungan itu disebut menunjukkan Indonesia tidak bisa diintervensi dalam mengambil keputusan politik. Indonesia bebas menentukan sikap berkunjung ke kedua negara tanpa harus berada di sisi Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengecam atau menyalahkan Rusia.

Dengan kunjungan itu, baik Ukraina maupun Rusia tetap menganggap Indonesia sebagai teman sehingga Indonesia mudah mengambil peran untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam media yang sama, pengamat Militer Connie Rahakundini mengatakan, kunjungan Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia mempertegas posisi Indonesia dalam merespons perang Rusia-Ukraina dengan tidak berpihak ke mana pun atau bertahan sebagai negara Non Blok. “Joko Widodo meluruskan bahwa Indonesia tidak berpihak ke mana pun, tapi berpihak pada keputusan *non-aligned movement*”, ujarnya. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Ustaz Arif Kurniawan

DKM Masjid Al-Karom Pacitan

Kepedulian Terhadap Sesama, Pererat Persatuan

SAYA orang daerah merasa awalnya kaget dan tidak percaya ketika ada seorang pejabat Negara, Pimpinan MPR RI, dari Jakarta berniat menyambangi warga desa kami, sekaligus salat Jumat bersama di masjid kami yang sederhana.

Usai salat Jumat, kami berbincang tentang segala hal, terutama soal kebangsaan dan persatuan bangsa. Kepedulian yang ditunjukannya itu, menurut saya, sangat baik dan rakyat seperti tidak dijauhi. Walaupun berada jauh dari pusat, namun kepedulian itu ada.

Mumpung ada pimpinan lembaga tinggi Negara, kamipun punya kesempatan untuk berdialog, menyampaikan keluh kesah, curhat, atau buah pikiran kami untuk bangsa dan negara. Kami berharap, dialog murni bersama rakyat ini harus terus dilakukan bahkan hingga ke pelosok terpencil. Karena kepeduliaa terhadap sesama warga bangsa Indonesia akan semakin mempererat persatuan.

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan MPR, Syariefuddin Hasan, atas segala kepeduliannya kepada warga desa kami, semoga akan berujung kebaikan untuk semua. ❑

DER

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa

Rektor Unhas Makassar

Kampus Bermutu Nasional dan Internasional Harus Merata di Indonesia

DUNIA pendidikan Indonesia, terutana perguruan tinggi, saat ini sudah banyak mendapat kepercayaan dan pengakuan dari sisi mutu oleh akademisi dunia. Seperti Unhas ini mendapatkan kepercayaan untuk diajak bergabung, bekerjasama dalam konsorsium UKICIS, sebuah konsorsium dunia yang dibentuk para ilmuwan dan akademisi dari berbagai kampus, antara lain ITB, IPB, UGM, UI, University of Nottingham UK, University of Warwick.

Kerja sama tersebut dalam bentuk riset tentang teknologi, terutama teknlogi energi baru terbarukan. Sebelumnya Unhas juga melakukan penjajakan kerjasama riset teknologi dengan konsorsium riset Australia.

Kerjasama riset dengan ilmuwan dunia tersebut, saya rasa, jangan disia-siakan, hal itu untuk menambah wawasan pengetahuan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Saya berharap, pemerintah memberikan dukungan penuh untuk terus membuka lebih banyak lagi kerja sama riset teknologi dari komunitas riset negara -negara lain.

Kami sendiri juga memiliki mimpi besar untuk membangun konsorsium riset seluruh perguruan tinggi di Timur Indonesia yang kemudian bersinergi denbgan perguruan tinggi di Barat Indonesia. Mudah-mudahan terwujud. ❑

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Daim

Kalpataru Buat Penyelamat Kaki Gunung Lamongan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

TIGAPULUH tahun lalu, kawasan hutan di Kaki Gunung Lamongan, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, terlihat layu dan meranggas. Wilayah tersebut tampak bak rumah tua, rapuh, reyot, dan ringkih. Bagaimana tidak, tak pepohonan tumbuh subur, lebat, dan menghijau di wilayah kaki Gunung Lamongan. Dominan tumbuh di sana adalah tumbuhan gulma, seperti ilalang dan tanaman perdu lainnya. Di musim kemarau tanaman ini mudah sekali terbakar.

Itu gambaran kawasan hutan di Kaki Gunung Lamongan tiga dasa warsa yang lalu. Di mana, saat itu, kondisi kritis, gersang, dan kekeringan sering melanda kawasan itu. Akibatnya, flora dan fauna pun enggan bertahan hidup di kawasan itu. Dan, lebih parah lagi, kondisi itu berimbas pada mengeringnya sumber air untuk kebutuhan hidup masyarakat di kawasan itu.

Tapi itu dulu, tigapuluh tahun lalu. Kini, kondisi kegersangan itu sudah tidak ditemukan lagi. Wilayah kaki Gunung Lamongan kini ibarat ular berganti kulit. Wilayah tersebut kini tampak *ijo royo-royo* (hijau dan subur). Saat ini, di wilayah tersebut ditumbuhi banyak tanaman pinang seluas mata memandang, dan suasana pun terasa nyaman.

Perubahan menyolok terjadi di kaki Gunung Lamongan itu tak bisa dilepaskan dari kiprah seorang Daim, warga Dusun Berca, Desa Sumberpetung, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Berkat kerja kerasnya, selama lebih dari duapuluh tahun menghijaukan kembali wilayah kaki Gunung Lamongan, membuat Daim diganjar penghargaan Kalpataru Tahun 2022, dengan kategori Perintis Lingkungan.

Daim mengaku, tidak pernah membayang-

kan, apalagi berharap, bakal memperoleh penghargaan dari upayanya melakukan reboisasi Kawasan Kaki Gunung Lamongan. Dalam benaknya, Ia hanya mau menanam agar kawasan kaki Gunung Lamongan tidak menjadi lahan yang semakin kritis. Ia juga tidak ingin anak cucunya mendapati hutan dalam kondisi gundul. Daim juga tidak rela, jika keberadaan kaki Gunung Lemongan senantiasa memberikan ancaman longsor pada saat musim penghujan tiba. Karena itu, tekadnya hanya satu, menanam dan terus menanam lagi.

Dianggap Gila

Daim memulai upayanya menghijaukan kembali kawasam kaki Gunung Lamongan pada 1996. Ia memilih jenis pohon pinang, karena tanaman itu banyak ditemukan di sekitar rumahnya. Setiap hari ia menanam satu persatu pohon pinang dan merawatnya hingga besar. Saat ini lebih dari duabelas ribu batang pohon pinang berhasil ditanamnya.

Pada awal kegiatannya melakukan reboisasi, banyak tetangganya menganggap Daim orang gila. Daim dianggap melakukan pekerjaan sia-sia. Mereka menganggap apa yang dikerjakan Daim itu

tidak ada hasil dan tak ada gunanya. Apalagi, mereka melihat Daim, hampir setiap tinggal berlama-lama di dalam hutan. Dia memang menghabiskan waktunya di dalam hutan untuk merawat pohon-pohon pinang dan tanaman sayur-mayur.

Bahkan, untuk memudahkan Daim keluar masuk kawasan hutan, dia pun merintis dan membuat jalan yang membelah kawasan hutan. Kini, jalan itu bukan hanya untuk kebutuhan Daim keluar masuk hutan merawat tanamannya, tapi masyarakat sekitar yang sebelum merasa tak membutuhkan jalan itu, akhirnya ikut juga memanfaatkan jalan itu.

Kini, setelah pohon pinang yang ditanam Daim tumbuh menjulang, tingginya sudah mencapai belasan meter. Dan, pohon-pohon pinang itu juga sudah sejak lama memberikan hasil, tentu saja buah pinang. Ternyata, bukan hanya Daim dan keluarganya yang memetik buah pinang itu,tetapi banyak warga Dusun Berca, Desa Sumberpetung, juga ikut memetik buah pinang.

Tidak itu saja, warga juga ikut memetik sayur-mayur yang ditanam Daim di dalam hutan. Bahkan, ada beberapa warga di sana juga mengikuti jejak Daim, ikut serta menanam dan memberdayakan hutan di kaki Gunung

PIAGAM PENGHARGAAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

memberikan penghargaan kepada

Daim

Desa Sumberpetung, Kecamatan Ranuyoso,
Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

sebagai nominasi penerima penghargaan KALPATARU 2021
kategori

Perintis Lingkungan

Jakarta, 10 Agustus 2021

Lamongan tersebut. Dalam merawat dan menjaga tanaman pinangnya, Daim dibantu oleh dua anaknya.

Kiprah Daim menghijaukan kembali hutan di kaki Gunung Lamongan ini mendapat banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Mulai dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Lumajang, Bupati Lumajang, hingga Presiden Joko Widodo. Maka, wajar kalau Daim memperoleh perhargaan sebagai penghormatan atas kerja kerasnya itu.

Begitu pula, masyarakat sekitar hutan kaki Gunung Lamongan – maaf, mungkin sebelumnya ada yang menganggap Daim gila – kini harus berterima kasih kepada Daim. Karena, sejak program penghijaun yang dilakukan Daim memberi hasil, kehidupan mereka semakin membaik. Mereka tidak lagi melihat kaki Gunung Lamongan gersang dan terancam bahaya. Sebaliknya, kini, masyarakat selalu disuguhi hutan hijau yang memberikan manfaat besar bagi warga sekitar.

Sedangkan Daim sendiri merasa bersyukur, atas jerih payahnya selama 26 tahun terakhir sudah membuahkan hasil. Bukan hanya pemandangan yang menghijau dan udara bersih, tetapi juga di wilayah itu bebas dari bahaya longsor dan kekeringan. Dan, pada saat musim panen buah pinang tiba, Daim pun mendapatkan hasil yang berlimpah. Karena dalam sekali panen, Daim bisa mendapatkan 8 ton buah pinang dengan harga Rp 11.000/kg. Sengsara membawa nikmat. ❑

MBO

Terima Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat

Bamsoet Dorong Investor Amerika Serikat Investasi di Indonesia

Ketika menerima Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roeslani, Rabu (27/7/22), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berpesan, salah satu peluang pasar Amerika Serikat yang bisa ditingkatkan, pada sektor gastrodiplomasi kuliner, berupa produk rempah-rempah Indonesia.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, berharap, di bawah kepemimpinan Duta Besar Rosan Roeslani, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC, Amerika Serikat, bisa meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Latar belakang Duta Besar Rosan Roeslani sebagai pengusaha juga memberikan nilai lebih agar KBRI di Washington Amerika Serikat bisa menarik sebanyak mungkin investor dari Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia.

"Peluang investasi di Indonesia, antara lain pada industri kesehatan, teknologi finansial, dan teknologi ramah lingkungan. Serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya pembangkit listrik yang bersumber dari panas bumi dan angina," ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani, di Jakarta, Rabu (27/7/22).

Dalam mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi bagi Amerika Serikat, lanjut Bamsoet, Duta Besar Rosan Roeslani bisa memanfaatkan forum US Chamber of Commerce dan US-ASEAN Business Council yang didalamnya berisi ratusan pengusaha Amerika Serikat.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini, menjelaskan, selain mendatangkan investasi, KBRI di Washington DC, Amerika Serikat, juga harus bisa menciptakan diferensiasi pasar bagi berbagai produk Indonesia agar bisa masuk ke Amerika. Salah satu peluang yang bisa ditingkatkan, yakni pada sektor gastrodiplomasi kuliner, yakni berupa produk rempah-rempah Indonesia.

"Nilai ekspor rempah-rempah Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2020 mencapai US$ 175 juta. Pada periode Januari-Juni 2021, meningkat 1,22% menjadi US$ 83,25 juta. Menunjukkan bahwa peluang pasar Amerika Serikat untuk produk rempah-rempah Indonesia masih sangat tinggi," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,

Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pada November 2020, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai US$ 750 juta. Serta penandatanganan Letter of Interest (LoI) dari United States International Development Finance Corporation (DFC) yang akan menginvestasikan US$ 2 miliar (setara Rp 28,3 triliun) untuk Sovereign Wealth Fund/SWF (Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia).

"Kedua perjanjian tersebut ditandatangani di akhir periode pemerintahan Presiden Trump. KBRI Washington perlu mengawal agar di masa pemerintahan Presiden Joe Biden, kedua kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut bisa tetap bisa terealisasi," pungkas Bamsoet. ❑

Hadapi Ancaman Global

Tumbuhkan Nasionalisme Anak Bangsa untuk Perkuat Perekonomian

Dorong terus penguatan ekonomi domestik dengan berbagai upaya untuk mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global. Nasionalisme anak bangsa harus terus ditumbuhkan.

PENGUATAN ekonomi domestik harus terus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi yang kita miliki agar semangat berusaha masyarakat terus tumbuh dan ekonomi terus bergerak," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/7).

Rabu lalu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar berharap, kondisi domestik yang cukup baik saat ini mampu menghindarkan Indonesia dari risiko terbesar stagflasi yang membayangi dunia.

Stagflasi adalah periode terjadinya inflasi yang dikombinasikan dengan penurunan produk domestik bruto (PDB). Sejumlah ekonom menilai, stagflasi berpotensi dialami Indonesia jika negara-negara mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat mengalami stagflasi.

Menurut Lestari, pelemahan perekonomian global dan peningkatan harga komoditas harus mampu diantisipasi dengan langkah yang tepat dan bijaksana.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkolaborasi dengan baik membangun sistem keuangan yang mampu mengakselerasi pertumbuhan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ekonomi domestik lewat kebijakan yang ramah terhadap dunia usaha, utamanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Momentum memperkuat ekonomi domestik ini, ujar Rerie, merupakan saat yang tepat bagi setiap anak bangsa untuk mempraktikkan semangat nasionalisme mereka.

"Inilah saatnya kita sebagai anak bangsa merealisasikan bela negara lewat berbagai upaya memperkuat sektor ekonomi untuk melindungi bangsa ini dari ancaman krisis ekonomi global," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Rerie menilai, masih banyak potensi negeri ini yang belum tergali menunggu kreativitas anak bangsa menumbuhkembangkan berbagai potensi itu.

Para pemangku kepentingan lewat sejumlah kebijakan, ujar Rerie, juga harus mampu melihat berbagai potensi itu di setiap daerah agar bisa mengakselerasi tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di tanah air.

Dengan semangat dan gerak bersama untuk memperkuat daya tahan negeri ini, Rerie optimistis, bangsa ini mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.❑

Penggantian Antar Waktu Anggota MPR RI

Bamsoet Ajak Seluruh Anggota MPR Dukung Hadirkan PPHN

Hadirnya Konvensi Ketatanegaraan menjadi terobosan penting untuk menghadirkan PPHN dengan bentuk hukum Ketetapan MPR. Sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar MPR RI.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, memandu pengucapan sumpah Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu masa bakti 2019-2024, Herry Erfian, dari Kelompok DPD daerah pemilihan Provinsi Bangka Belitung. Pada kesempatan itu, Bamsoet kembali mengingatkan, setiap anggota MPR RI harus turut menyukseskan berbagai agenda penting MPR RI, khususnya dalam menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sehingga MPR RI periode ini (2019-2024) bisa menuntaskan Rekomendasi MPR RI tentang PPHN yang telah melewati dua periode keanggotaan MPR RI (2009-2014 dan 2014-2019).

Bamsoet menjelaskan, Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD pada 25 Juli 2022 menyimpulkan, idealnya PPHN diatur dalam Ketetapan MPR RI dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terbatas terhadap konstitusi. Namun, melihat dinamika politik, perubahan terbatas tersebut sulit direalisasikan, sehingga Rapat Gabungan menyepakati menghadirkan PPHN tanpa melakukan perubahan terbatas terhadap konstitusi, melainkan melalui Konvensi Ketatanegaraan.

Acara pengucapan sumpah Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu masa bakti 2019-2024, Herry Erfian, dari Kelompok DPD daerah pemilihan Provinsi Bangka Belitung itu berlangsung Kamis (28/7/2022) di Kompleks MPR RI, Jakarta. Turut hadir, antara lain Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Fadel Muhammad, serta Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini lebih lanjut menjelaskan, sebagai tindak lanjut atas hasil rapat gabungan tersebut, MPR RI akan menggelar sidang paripurna pada awal September 2022. Sidang Paripurna MPR itu dengan agenda membentuk Panitia Ad Hoc, setelah terlebih dahulu mendengarkan pandangan umum fraksi dan kelompok DPD di MPR. Panitia Ad Hoc bertugas menyusun rumusan bentuk hukum PPHN, termasuk mengkaji lebih lanjut peluang digunakannya Konvensi Ketatanegaraan sebagai terobosan menghadirkan PPHN tanpa amandemen konstitusi.

"Jadi, ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tanpa mempelajari dan mendalami terlebih dahulu hasil kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, yang telah diselesaikan oleh Badan Pengkajian MPR, yang keanggotannya merupakan representasi dari semua Fraksi / Partai Politik di MPR dan Kelompok DPD," ujar Bamsoet.

Seperti diketahui, pimpinan Badan Pengkajian MPR RI terdiri dari para politisi senior yang dipimpin oleh Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua (dari unsur Fraksi PDI Perjuangan), Agun Gunandjar Sudarsa selaku Wakil Ketua (Fraksi Partai Gokar), Benny K. Harman selaku Wakil Ketua (Fraksi Partai Demokrat), Tifatul Sembiring selaku Wakil Ketua (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan Tamsil Linrung selaku Wakil Ketua (Kelompok DPD).

"Kami menyampaikan apresiasi kepada segenap Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian, yang meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan di tengah pandemi Covid-19, tetap berkomitmen melaksanakan

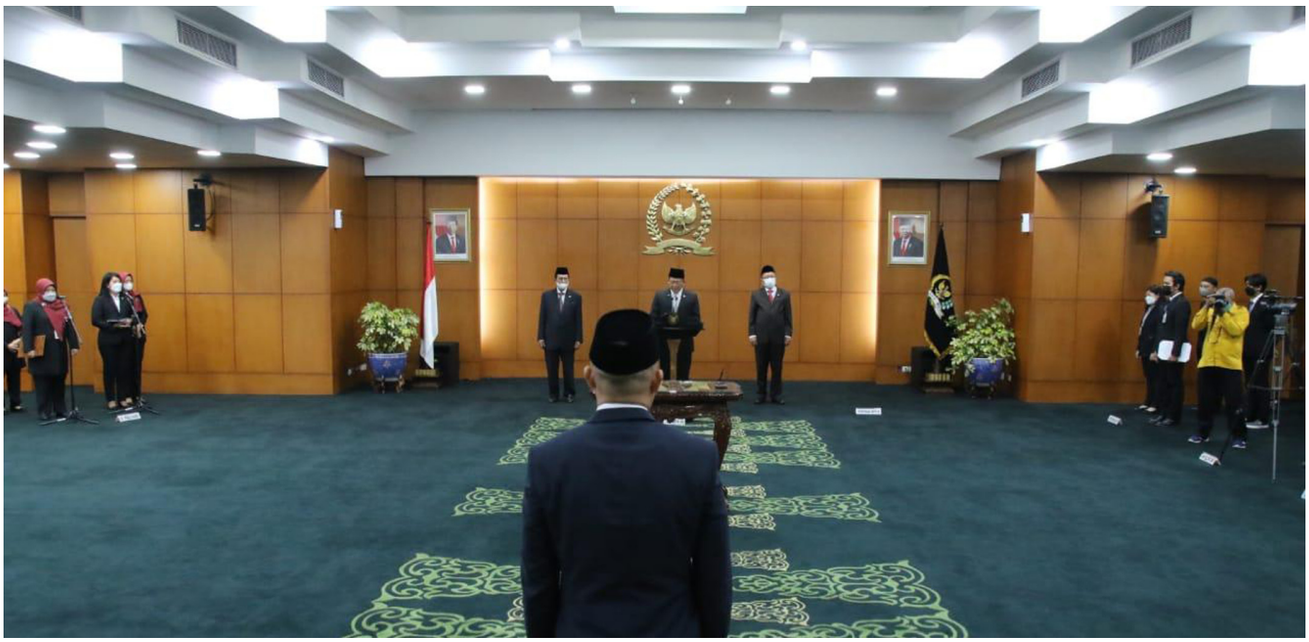

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tugas-tugas yang diamanatkan, selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan (sejak dibentuk pada Oktober 2019). Badan Pengkajian telah melaksanakan beragam metoda kajian, baik berupa rapat-rapat pembahasan, diskusi, seminar, focus group discussion, dan penyerapan aspirasi masyarakat, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan melibatkan para pakar/ ahli, praktisi, serta akademisi," papar Bamsoet.

Bamsoet mengakui, tentunya masih terlalu prematur dan terlalu "kesusu" untuk serta merta disikapi, karena mekakismenya pun masih memerlukan beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum keputusan diambil, sesuai dengan keputusan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD pada 25 Juli yang lalu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanam KADIN Indonesia ini menerangkan, upaya menghadirkan PPHN tanpa melalui perubahan konstitusi diharapkan bisa menghapus kecurigaan masyarakat yang selama ini mengkhawatirkan perubahan konstitusi digunakan sebagai alasan untuk mengubah pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar. Seperti perpanjangan masa jabatan kepresidenan maupun penambahan masa periodesasi jabatan kepresidenan.

"Hadirnya Konvensi Ketatanegaraan juga menjadi terobosan penting untuk menghadirkan PPHN dengan bentuk hukum Ketetapan MPR. Sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar MPR RI, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Ayat 2 Tata Tertib MPR RI," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, hadirnya PPHN sebagai peta jalan pembangunan, yang memberi arah pencapaian tujuan negara, dengan mempertemukan nilai-nilai Pancasila dengan aturan dasar yang diatur dalam konstitusi, dapat memberikan jaminan kesinambungan pembangunan. Tidak hanya antarperiode pemerintahan kepresidenan, hadirnya PPPH juga menjamin keselarasan dan konsistensi pembangunan antara pusat dan daerah.

"Karena siapapun yang menjadi presiden - wakil presiden maupun kepala daerah, dari mulai gubernur, bupati/walikota, akan terikat dengan PPHN. Mengingat dalam proses politik lima tahunan Pemilu maupun Pilkada, setiap calon presiden maupun calon kepala daerah, terikat dengan PPHN dalam menyusun visi dan misinya," pungkas Bamsoet. ❑

Sosialisasi Empat Pilar di Puri Ageng Blahbatuh Bali

Bamsoet Ajak Elemen Bangsa Perkuat Ketahanan Budaya Bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar menuturkan, keragaman budaya di Indonesia adalah fitrah kebangsaan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, Indonesia memiliki tingkat heterogenitas sangat tinggi, dengan 1.340 suku, 733 bahasa, 6 agama, dan puluhan aliran kepercayaan.

"Tingginya tingkat kemajemukan ini, di satu sisi menempatkan kita dalam posisi rentan terhadap ancaman perpecahan. Jika tidak disikapi dengan bijaksana, kesalahan dalam mengelola kemajemukan dapat berujung pada lunturnya kohesi kebangsaan yang dapat bermuara pada disintegrasi bangsa," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang juga di hadiri para penglisir (Raja) Puri se-Bali di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Bali, Senin (18/7/22).

Turut hadir, antara lain Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut Laksma TNI Suradi Agung Slamet, Penglingsir Puri Ageng Blahbatuh Anak Agung Ngurah Alit Kakarsana beserta para Penglingsir Puri se-Bali.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menuturkan, jika merujuk pada konstitusi, amanat untuk membangun ketahanan budaya memiliki landasan yuridis yang sangat fundamental, khususnya pada Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945. Setidaknya, menyiratkan dua prinsip dasar: *Pertama*, penegasan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh Negara; *Kedua*, amanat kepada negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

"Dalam konteks pemajuan kebudayaan, globalisasi seharusnya tidak semata-mata dipandang sebagai ancaman. Tetapi, justru harus kita manfaatkan sebagai peluang bagi budaya Indonesia untuk dapat memberi kontribusi terhadap pembentukan peradaban dunia," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, keragaman budaya dapat dimaknai sebagai kekayaan yang justru saling melengkapi satu sama lain. Meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, tidak lantas dimaknai bahwa keragaman budaya tersebut harus diseragamkan, tetapi diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai khazanah kekayaan bangsa.

"Dengan demikian, prinsip dan visi kebangsaan yang kita bangun

harus mampu mempertemukan kemajemukan dan ketahanan budaya dalam semangat kebersamaan. Paradigma inilah yang dibangun oleh Puri Ageng Blahbatuh, yang memprakarsai untuk menghadirkan narasi-narasi kbangsaan dengan melibatkan tokoh-tokoh dan lembaga lembaga adat, melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI," urai Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Keluarga Besar Olahraga Tarung Derajat ini juga mengingatkan ancaman terhadap eksistensi budaya bangsa, tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal. Dari faktor internal, kurangnya upaya untuk secara intens dan serius menghadirkan diskursus kebudayaan, turut menjadi penyebab 'menjauhnya' kebudayaan dari ruang publik.

"Kita pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan ketika budaya kita coba diakui sebagai budaya milik negara lain. Antara lain, alat musik Sasando dari Nusa Tenggara Timur, wayang kulit dan batik dari Jawa Tengah, lagu Rasa Sayange dari Maluku, angklung dari Jawa Barat, makanan Rendang dari Sumatera Barat, termasuk juga Tari Pendet dari Bali. Dalam konteks inilah, keberadaan lembaga adat seperti halnya puri-puri di Bali memiliki kontribusi penting sebagai pusat pengembangan kebudayaan daerah, sekaligus sebagai benteng ketahanan dan kedaulatan budaya nasional," pungkas Bamsoet. ❑

Seminar Nasional dan Call For Papers UMS

Pentingnya Reaktualisasi Pancasila Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, LC., MA., mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama ini menegaskan kembali penolakan terhadap perkawinan beda agama. Sikap penolakan terhadap perkawinan beda agama juga disampaikan oleh Pemerintah melalui wakilnya dalam persidangan di MK, yaitu Menkumham dan Menteri Agama.

Penyikapan MK dan Pemerintah itu sesuai dengan Pancasila pasca Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang menegaskan keyakinannya bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 45 dan merupakan kesatuan tak terpisahkan dari Konstitusi. Sikap penolakan Pemerintah dan MK itu juga sesuai prinsip HAM yang diatur dalam Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28 B ayat 1 dan Pasal 28J ayat 2.

"Soal pengajuan peninjauan kembali tentang ketentuan pernikahan beda agama ke MK hanyalah salah satu contoh betapa pentingnya Pancasila pasca Dekrit 5 Juli 1945 direaktualisasikan dalam bentuk yang benar. Agar rumah bangsa Indonesia ini selalu mendapatkan solusi yang konstitusional sesuai dengan ideologi Bangsa dan Negara. Yaitu, Pancasila," kata HNW, begotu Hidayat Nur Wahid biasa disapa.

Pernyataan itu disampaikan HNW saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional dan Call For Papers, diselenggrakan Setjen MPR RI bekerjasama dengan Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah, dan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial. Seminar yang membahas tema: 'Aktualisasi Pancasila Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Konstitusional Indonesia,' berlangsung di Surakarta, Selasa (5/7/2022).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua MPR melakukan pemukulan gong sebagai penanda dimulainya Seminar Nasional. Dalam kesempatan itu, HNW juga menyaksikan penandatangan kesepahaman dan kerjasama antara MPR dengan UMS, yang masing-masing dilakukan oleh Sesjen MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., dan Rektor UMS Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.

Ada lima narasumber yang menyampaikan makalahnya pada acara tersebut, yaitu: Prof. Dr. M. Din Syamsuddin., MA.; Prof. Sofyan Effendi, MPA., PhD.; Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.; Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.; serta Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

HNW mengingatkan bahwa 5 Juli bertepatan dengan hari digelarnya Seminar Nasional, memang memiliki arti penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena pada 5 Juli 1959, Presiden pertama Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit tersebut, antara lain berisi tidak berlakunya UUDS 1950, serta berlakunya kembali UUD 1945.

"Sekalipun Seminar ini diselenggarakan pada 5 Juli, bertepatan dengan peristiwa Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, yang isinya kembali kepada UUD 45, bukan berarti seminar ini mengajak Pemerintah untuk kembali kepada UUD 45 yang asli. Sebab, selain kondisi politik dan sosialnya sangat berbeda, juga pastilah kalangan akademis yang paham Konstistusi secara baik dan benar, tidak mau melakukan hal yang inkonstitusional. Karena UUD 45 yang asli, tidak mengenal adanya Pemilu 5 tahun sekali, juga tidak mengenal pembatasan masa jabatan

Presiden

Kalau saat ini isunya dibawa kepada kembali ke UUD 45 yang asli, menurut HNW, hal itu akan mudah ditunggangi oleh kepentingan politik jangka pendek untuk perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode atau bahkan hingga tanpa batas sebagaimana yang ada dalam UUD 45 yang asli itu. Ini tidak sesuai dengan ketentuan baru dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen.

Karena itu HNW berharap, justru dipilihnya tanggal 5 Juli untuk seminar nasional ini untuk mengingatkan hikmah dari peristiwa Dekrit 5 Juli 1945. Antara lain untuk menemukan solusi berbangsa dan bernegara agar keluar dari deadlock, dan agar kita teguh dengan kesepakatan cita-cita Indonesia Merdeka dengan Pancasila sebagai dasar Negara.

"Sebagaimana kesepakatan Bapak-Bapak Bangsa yang berkompromi menyepakati hadirnya gentlement agreement, atau Piagam Jakarta yang juga disebut sebagai Pembukaan UUD 1945," kata HNW.

Karenanya, HNW menegaskan bahwa pelaksanaan seminar nasional pada 5 Juli bertepatan dengan lahirnya Dekrit Presiden Soekarno, bukan berarti ingin membangkitkan kembali peristiwa bersejarah untuk ditunggangi dengan wacana sebagian kelompok yang mengampanyekan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024, dan juga wacana presiden tiga periode.

Apalagi, menurut HNW, saat ini Pimpinan MPR tidak mempunyai agenda amandemen UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Pada saat berbarengan, Badan Pengkajian MPR menyepakati untuk tidak melanjutkan usulan amandemen terbatas guna hadirkan PPHN, agar tidak ditunggangi kepentingan perubahan Konstitusi untuk perpanjang masa jabatan Presiden. Dengan demikian makin tidak relevan lagi menjadikan peringatan Dekrit Presiden 5 Juli untuk mengulangi Presiden tanpa batas masa jabatan, sekalipun dibungkus dengan dalih kembali ke UUD 45 yang asli yang memang tidak membatasi masa jabatan Presiden itu.

Seminar ini, lanjut HNW, hendaknya menggali hikmah dan sisi-sisi yang relevan dari dekrit itu untuk aktualisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam semangat keyakinan Presiden RI. Yaitu, keyakinan Bung Karno bahwa Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila yang disepakati oleh BPUPK, dan disepakati oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dalam rumusan finalnya sebagai dasar dan ideologi Negara. Agar kehidupan demokrasi berdasarkan konstitusi dan UU, sesuai dengan semangat Pancasila yang dijiwai oleh Piagam Jakarta sebagaimana Dekrit Presiden 5 Juli 1945 yang mendapatkan persetujuan secara aklamasi oleh seluruh anggota DPR hasil Pemilu tahun 1955 yang dinilai sebagai Pemilu yang paling bersih dan jujur.

"Agar, laku demokrasi konstitusional di Indonesia mencerminkan kesungguhan kejujuran melaksanakan semua sila dari Pancasila.. Sehingga hadirlah demokrasi konstitusional dan solutif untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi dan Reformasi. Ketentuan ini jadi penting untuk terus dikaji dan disosialisasikan, apalagi MPR pada era Reformasi juga sudah memutuskan bahwa Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya ada rumusan Pancasila tidak bisa dilakukan perubahan. Itu artinya dengan berlakunya Dekrit 5 Juli 1945 maka Pancasila yang menjiwai UUD 45 dan bagian tak terpisahkan dari Konstitusi harus menjadi acuan saat ingin mempraktikkan demokrasi konstitusonal di Indonesia," pungkasnya. ❑

Sarasehan Kehumasan MPR di UIN Maliki Malang

Siti Fauziah: Kuatkan Peran MPR sebagai Rumah Kebangsaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SARASEHAN Kehumasan MPR bertajuk: 'Menyapa Sahabat Kebangsaan' yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Kota Malang, Jawa Timur, merupakan aktivitas untuk menyapa civitas akademika. MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan memiliki makna bahwa semua yang hadir merupakan sahabat kebangsaan. Sahabat itu memiliki arti yang lebih mendalam daripada teman.

Hal demikian dikatakan Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah SE., MM., di hadapan mahasiswa dari berbagai jurusan dan dosen UIN Maliki di Auditorium Fakultas Humaniora dan Budaya, Gedung KH. Oesman Mansoer, UIN Maliki, Kota Malang, Jawa Timur, 8 Juli 2022.

Hadir dalam acara itu Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar-lembaga Setjen MPR Budi Muliawan SH., MH.; Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Dr. Marno, M.Ag.; dan Kasubag Humas, Dokumentasi, dan Publikasi Fathul Ulum S.Pdl.

Kegiatan itu dikatakan oleh perempuan yang akrab disapa Bu Titi itu merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. "Alhamduliilah di Tahun 2022 Sarasehan Kehumasan sudah terlaksana sebanyak 4 kali," ujarnya. Disebut sebelum di UIN Maliki, acara itu telah diadakan di Universitas Negeri Semarang, Universitas Djuanda Bogor, dan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Perempuan asal Kota Bandung, Jawa Barat, itu berharap, semua yang hadir pada hari ini (8 Juli-red) menjadi sahabat kebangsaan dari MPR. Dengan mengenal lebih dekat MPR, lebih mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan wewenang lembaga MPR, maka semua sahabat kebangsaan yang ada akan berjalan beriringan dengan MPR untuk mengukuhkan peran MPR sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.

Tema dalam sarasehan di UIN Maliki adalah 'Peran Mahasiswa dalam Mengisi Kemerdekaan.' Tema ini diangkat, sebab para mahasiswa memiliki peran dalam konteks pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Siti Fauziah menegaskan, Setjen MPR hadir di kampus bukan untuk menggurui namun untuk me-refresh memori kebangsaan bahwa dari zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, para pemuda dan mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

negara Indonesia.

Di hadapan para mahasiswa yang mengenakan jaket almamater biru itu dia memaparkan bahwa tahun 1928 para pemuda berkumpul untuk mengikrarkan apa yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Lalu, tahun 1945 para pemuda juga mendorong agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Kemudian setelah kemerdekaan sejarah mencatat bagaimana peran mahasiswa pada tahun 1965 serta reformasi tahun 1998.

Lebih lanjut disampaikan, tantangan pemuda dan mahasiswa dari setiap generasi berbeda. "Kita mengenal adanya generasi baby boomer, generasi X, generasi millenial, generasi Z, serta yang terbaru adanya generasi Alpha," ungkapnya. Masing-masing generasi tentu memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda, perkembangan teknologi sedikit banyak memengaruhi hal tersebut.

Kalau dahulu, lanjut Siti Fauziah, zaman generasi baby boomers belum ada teknologi digital seperti hari ini, sedangan generasi alpha yang baru lahir, dari usia dini sudah terbiasa dengan teknologi digital. "Menarik tentunya untuk dibahas, para mahasiswa saat ini yang masuk dalam kategori generasi Z berperan mengisi kemerdekaan dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Undang Mahasiswa ke MPR

Dalam kesempatan itu, Siti Fauziah juga mengundang mahasiswa dan dosen untuk datang ke Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta. "Kami menyambut baik apabila ada dosen dan mahasiswa yang ingin berkunjung ke MPR, atau datang dan melihat langsung Gedung MPR," tuturnya. Prosedurnya cukup berkirim surat, dan nanti penerimaannya akan diagendakan oleh Biro Humas dan Sistem Informasi MPR.

Di MPR, menurut Siti Fauziah, mahasiswa dan dosen tak hanya bisa melihat dari dekat gedung wakil rakyat yang penuh sejarah itu, namun juga menikmati berbagai fasilitas yang ada. MPR memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap.

"Apablia berkunjung ke MPR para mahasiswa ataupun dosen bisa sekalian melihat koleksi perpustakaan, siapa tahu ada buku yang dibutuhkan bagi mahasiswa dan dosen," ujarnya. "Kalau ada hasil skripsi, tesis atau desertasi mahasiswa yang ingin disumbangkan ke Perpustakaan MPR kami juga sangat terbuka menerima hal tersebut," tambahnya.

Perpustakaan MPR, menurut Siti Fauziah, mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi. Perpustakan MPR sudah melakukan digitalisasi layanan melalui aplikasi Buku Digital MPR RI. "Silahkan di-download di google play store buku digital MPR," ungkapnya. Di aplikasi itu tersedia majalah *Majelis* MPR, jurnal, hasil kajian, dan banyak produk-produk MPR lainnya. "Sampai dengan hari ini tersedia di platform Android, mudah-mudahan ke depan bisa juga di download di platform IOS," ungkapnya. ❑

Sarasehan di UIN Malang

Budi Muliawan Ajak Mahasiswa Gelorakan Semangat Kebangsaan lewat Medsos

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PERKEMBANGAN teknologi informasi begitu cepat. Saat ini, hampir tidak ada lini kehidupan yang lepas dari teknologi informasi, terutama di kalangan anak muda. Sayangnya, belum semua kalangan muda, termasuk mahasiswa, menjadikan teknologi informasi dan media sosial (medsos) untuk hal-hal yang positif. Untuk itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR, Budi Muliawan SH., MH., mengajak para mahasiswa untuk memanfaatkan medsos untuk aktivitas yang memberikan nilai tambah. Salah satunya untuk menggelorakan kembali semangat dan nilai-nilai kebangsaan.

"Mari kita gunakan media sosial untuk menggelorakan nilai-nilai kebangsaan, seperti persatuan, gotong royong, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila," ujar Budi Muliawan di hadapan ratusan mahasiswa yang mengikuti Sarasehan Kehumasan MPR bertajuk: 'Menyapa Sahabat Kebangsaan' di Auditorium Fakultas Humaniora dan Budaya, Gedung KH. Oesman Mansoer, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki), Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (8/7/2022).

Hadir dalam sarasehan bertema 'Peran Mahasiswa dalam Mengisi Kemerdekaan itu,' adalah: Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Dr. Marno, M.Ag.; Kasubag Humas, Dokumentasi, dan Publikasi Fathul Ulum S.Pd.I, serta ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan.

Dikatakan Budi Muliawan, mahasiswa harus bisa menjadikan Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, Youtube atau platform lainnya untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa. Sebab, mahasiswa merupakan agen perubahan yang memiliki tantangan sesuai dengan zamannya.

Menurutnya, peran mahasiswa dalam sejarah bangsa terjadi sejak 1908, tepatnya pada 20 Mei dengan berdirinya organisasi pemuda, Budi Utomo. Organisasi ini didirikan mahasiswa STOVIA sebagai awal dari Kebangkitan Nasional. "Perjuangan yang awalnya mengandalkan perlawanan fisik, kemudian melibatkan politik diplomasi," ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Semangat dari pemuda dan mahasiswa pada 1908 berlanjut pada 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Organisasi-organisasi pemuda dari berbagai suku dan agama berikrar: bertumpah darah, berbahasa, dan berbangsa yang satu Indonesia.

Pada masa menjelang kemerdekaan, pemuda juga mempunyai peran yang besar dalam mendorong percepatan Proklamasi Kemerdekaan. Dan, peran pemuda dan mahasiswa terus berlanjut dan menjadi pendorong utama terjadinya pada perubahan di tahun 1966 dan 1998.

Dari sejarah perjalanan bangsa, Budi Muliawan menyebut, mahasiswa memiliki banyak peran, tidak hanya meletakkan pondasi persatuan bangsa, namun juga pada peran-peran lain di tengah masyarakat sebagai moral force, social control, agent of change, iron stock, dan guardian of value. "Dari lima peran itu, kalau dipersingkat, artinya mahasiswa adalah calon penerus bangsa yang tetap bisa menyuarakan yang benar di masyarakat," ujarnya.

Kemudian, mahasiswa juga dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

"Mahasiswa mempunyai ruang untuk menyampaikan sesuatu yang benar dan baik," tuturnya. Suara mahasiswa disebut lebih lantang dibanding kelompok yang lain.

Nah, di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, mahasiswa harus ikut mengambil peran untuk menjawab tantangan era digital. Mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan tidak terseret arus perkembangan zaman, melakukan inovasi yang bermanfaat, memberikan edukasi dan ajakan positif melalui sosial media, dan melawan berita bohong (hoax).

Jika mahasiswa tidak melakukan inovasi, kata Budi Muliawan, akan menciptakan generasi mageran alias malas bergerak. "Kemajuan teknologi membuat banyak kemudahan dalam kehidupan, seperti kuliah bisa dilakukan lewat online, pesan makanan bisa langsung lewat aplikasi, dan bersosialisasi lewat medsos, seperti WA tanpa ada pembatasan ruang dan waktu. Namun hal ini membawa dampak mageran dan kurang bersosialisasi," tuturnya.Budi Muliawan.

Budi Muliawan juga mengingatkan bahwa di era disrupsi ini terjadi inovasi dan perubahan secara masif yang bersifat fundamental, mengubah berbagai sistem dan tatanan ke cara yang baru. Ciri-ciri era disrupsi ditandai dengan perubahan yang cepat dengan pola yang sulit ditebak, sehingga menyebabkan ketidakpastian, kompleksitas hubungan antarfaktor penyebab perubahan, dan kekurangjelasan arah perubahan yang menyebabkan ambiguitas. "Cara menghadapi era disrupsi ini, mari kita tingkatkan kualitas SDM, lakukan transformasi digital, dan jangan berhenti berinovasi," ujarnya. ❑

Sarasehan di Universitas Kuningan

Budi Muliawan: Mahasiswa Harus Persiapkan Diri Sebagai Calon Pemimpin

KEPALA Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Sekretariat Jenderal MPR, Budi Muliawan, SH., MH., mengatakan, para mahasiswa harus mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin bangsa. Sebab, estafet kepemimpinan di setiap tingkatan, baik kepemimpinan nasional maupun daerah, akan diserahkan kepada para pemuda dan mahasiswa sebagai penerus bangsa.

"Mahasiswa itu dipersiapkan menjadi calon pemimpin bangsa sehingga mahasiswa mempunyai tanggung jawab, tugas, dan peran menjadi pemimpin. Peran perguruan tinggi juga ikut mempersiapkan calon pemimpin bangsa," kata Budi Muliawan dalam Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Gedung Student Center Iman Hidayat Universitas Kuningan (Uniku), Jawa Barat, Kamis (14/7/2022).

Dialog Sarasehan Kehumasan MPR RI bertema "Peran Mahasiswa dalam Mengisi Kemerdekaan" juga menghadirkan narasumber Rektor Uniku Dr. H. Dikdik Harjadi SE, MSi.

Menurut Budi Muliawan, mahasiswa harus memiliki kebanggaan dengan atribut sebagai mahasiswa. Sebab, mahasiswa dan pemuda berperan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1908, berdiri organisasi pergerakan Boedi Oetomo yang didirikan mahasiswa dari Stovia. Kemudian pada tahun 1928, lahir Sumpah Pemuda yang juga dimotori para pemuda dan mahasiswa. Kemudian pada tahun 1945, para pemuda juga berperan dalam mendorong Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perubahan struktur politik pada tahun 1966 juga karena gerakan mahasiswa. Kemudian, gerakan mahasiswa berperan penting pada awal Era Reformasi tahun 1998. "Jadi, mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Karena itu, mahasiswa harus memiliki kebanggaan. Tidak semua orang mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Kami hadir di sini untuk mengingatkan dan me-*refresh* peran mahasiswa," imbuh alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, ini.

Budi Muliawan mengungkapkan, fungsi

dan peran mahasiswa di masyarakat adalah sebagai agent of change, moral force, iron stock, dan guardian of value. “Dari peran tersebut, mahasiswa harus mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin bangsa. Sebab, estafet kepemimpinan nasional di setiap tingkatan, baik kepemimpinan nasional mupun di daerah, pada Indonesia Emas tahun 2045 akan diisi oleh para mahasiswa saat ini sebagai penerus bangsa,” tandasnya.

Indonesia Emas atau seratus tahun Indonesia merdeka jatuh pada tahun 2045. Usia mahasiswa saat ini sekitar 18-23 tahun. Pada tahun 2045, mereka akan berusia 41-46 tahun. “Usia ini adalah usia emas atau usia produktif. Seorang yang berusia 40 tahun bisa dikatakan matang. Pada usia itulah mereka menjadi pemimpin bangsa dan negara,” katanya.

“Mahasiswa itu dipersiapkan menjadi calon pemimpin bangsa sehingga mahasiswa mempunyai tanggungjawab, tugas, dan peran menjadi pemimpin. Peran perguruan tinggi melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebenarnya ikut mempersiapkan mahasiswa menjadi calon pemimpin bangsa,” imbuhnya.

Di setiap era, lanjut Budi Muliawan, mahasiswa memiliki tantangan tersendiri. Begitu pula pada era disrupsi saat ini. Era disrupsi ini ditandai dengan berkembangnya kecerdasan buatan (artificial intelligence), teknologi nano, dan rekyasa genetika.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Lalu, bagaimana beradaptasi dengan era disrupsi ini? *Pertama*, jelas Budi Muliawan, harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia; *Kedua*, melakukan transformasi digital; dan, *ketiga*, kita tidak berhenti untuk melakukan inovasi. Tapi, paling utama adalah bagaimana mahasiswa mempersiapkan diri meneruskan tongkat estafet kepemimpinan,” tuturnya.

Sementara itu, Rektor Uniku, Dikdik Harjadi, mengungkapkan, beberapa poin peran mahasiswa dalam mengisi kemerdekaan. Pertama, peran pengabdian pada masyarakat dengan terlibat dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat. “Ini merupakan salah satu cara yang kini banyak dilakukan pemuda dan mahasiswa,” katanya.

Kedua, peran mahasiswa dalam mendukung perkembangan produk dalam negeri. “Jika generasi muda bangga dengan produk dalam negeri maka akan mendukung perkembangan brand tersebut, dan bahkan bisa mendorong agar dikenal oleh masyarakat dunia,” ujarnya.

Peran ketiga, lanjut Dikdik, adalah terlibat dalam memajukan sektor pendidikan. Berikutnya, mahasiswa bisa berperan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Dan, keempat (terakhir), mahasiswa berperan dalam mengisi kemerdekaan dengan saling menghormati dan berbagi. “Jika perbedaan dalam masyarakat tidak disikapi dengan rasa saling menghomati, maka tidak akan terjadi kemerdekaan yang sepenuhnya,” pungkasnya. ❑

Seminar Nasional UMS

Ma'ruf Cahyono: Demokrasi Pancasila, Menjamin Rasa Aman, Keadilan dan Kesejahteraan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN Civitas Akademika Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah, dan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu ilmu sosial, Sekretaris Jenderal MPR RI, Dr. Maruf Cahyono, SH., MH., mengatakan, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh desa di Indonesia merupakan satu indikasi bahwa praktik demokrasi Pancasila masih berlangsung. Karena permusyawaratan yang dipraktikkan untuk merencanakan dan menentukan program dan kebijakan pembangunan adalah ciri adanya praktik Demokrasi Pancasila. Permusyawaratan juga menjadi karakter bangsa Indonesia yang harus ditumbuhsuburkan di Bumi Nusantara

"Sayangnya praktik demokrasi di desa juga kadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan BPD. Pemilihan RT/RW tidak jarang juga menggunakan sistem suara terbanyak atau voting. Dan, itu mereduksi fungsi permusyawaratan yang telah melekat pada BPD. Padahal, keberadaan BPD mampu memberikan citra positif, pentingnya perencanaan pembangunan dari bawah (buttom up), dengan sistem permusyawaratan melalui Musrenbangdes hingga Musrenbangnas, " ujar Ma'ruf Cahyono.

Pernyataan itu disampaikan Sesjen MPR saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional dan Call For Papers, dengan tema 'Aktualisasi Pancasila Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Konstitusional Indonesia.' Seminar Nasional, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerjsama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berlangsung di Surakarta, Selasa (5/7/2022).

Selain Ma'ruf Cahyono, ada empat pembicara lain yang ikut menyampaikan makalahnya, yaitu: Prof. Dr. M. Din Syamsuddin., MA., Prof. Sofyan Effendi, MPA., PhD., Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., dan Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

Penerapan permusyawaratan seperti yang dilakukan BPD, kata Ma'ruf, adalah bentuk aktualisasi nilai nilai Pancasila secara berjenjang dari bawah sampai ke atas, untuk mewujudkan tertib nasional, menuju tercapainya keinginan bersama. Yaitu, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

"Setidaknya ada tiga syarat terwujudnya Demokrasi Pancasila, yaitu: kerakyatan, musyawarah, dan khidmat kebijaksanaan. Ini sesuai dengan esensi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilam," papar Ma'ruf Cahyono.

Sistem Demokrasi Pancasila yang berjalan dengan benar, menurut Ma'ruf Cahyono, akan berdampak pada sistem politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan dan keamanan yang juga berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga tidak ada lagi perpecahan, dan sebagai gantinya adalah hadirnya persatuan dan kesejahteraan.

"Seluruh rakyat harusnya ikut merasakan keamanan, bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang, kelompok dan golongan tertentu saja. Demikian juga dalam hal pelaksanaan peribadatan semua agama, berlangsung dengan baik dan saling toleran. Tidak ada hambatan soal mayoritas dan minoritas, karena satu untuk semua, semua untuk satu dan semua untuk semua. Serta bertambahnya nasionalisme dan keadilan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia, bukan kalangan tertentu saja," tegas Ma'ruf Cahyono. ❑

Pustaka Akademik MPR

Bedah Karya Ilmiah "Tridharma dan Kebangsaan Budaya Epistemik"

PELAKSANA Tugas Deputi Administrasi Sekretaris Jendral MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., mengatakan, Sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan MPR tidak melulu menggunakan metode yang serius, seperti seminar, diskusi, atau pun ceramah. Tetapi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI juga dilakukam dengan metode yang ringan dan menghibur. Antara lain, menggunakan novel dan komik bagi remaja dan mahasiswa serta anak-anak.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, kami memiliki berbagai metode, menyesuaikan dengan audience-nya, agar mudah dipahami dan lebih mengena," kata Siti Fauziah.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pernyataan itu disampaikan Bu Titik, panggilan akrab Siti Fauziah, saat memberi sambutan dan membuka Pustaka Akademik dengan tema Bedah Karya Ilmiah "Tridharma dan Kebangsaan Budaya Epistemik" di Perguruan Tinggi dan Parlemen. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Gedung E lantai 10 Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Malang Jawa Timur, Kamis (28/7/2022).

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perpustakaan MPR RI dan Fakultas Ilmu Administrasi UB. Penandatanganan dilakukan oleh Siti Fauziah selaku wakil dari pihak MPR RI dan Arik Prasetya S.Sos., MSi., Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik mewakili FIA Universitas Brawijaya.

Tiga narasumber menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan Pustaka Akademik tersebut, yaitu: Ir. H.M. Ridwan Hisjam (Anggota Fraksi Partai Golkar MPR RI); Dr. Sarwono, M.Si., dosen senior dan Ketua Laboratorium Perpustakaan dan Arsip FIA UB. Serta, M. Rosyihan Hendrawan S.IP., M.Hum., pengurus Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia

Pada kesempatan itu, Bu Titik tak lupa mengundang civitas akademika FIA UB untuk berkunjung ke perpustakaan MPR. Karena, di Perpustakaan MPR banyak koleksi buku-buku yang tidak diperjualbelikan dan tidak ada di tempat lain.

"Tetapi, kalau belum ada kesempatan berkunjung ke MPR, buku-buku tersebut bisa diakses melalui buku digital dengan mendownload terlebih dahulu di AppStore," pungkas Siti Fauziah.

Sementara itu, Ir. H. M. Ridwan Hisjam, Anggota Fraksi Partai Golkar MPR RI, saat menyampaikan makalahnya, antara lain mengatakan bahwa budaya epistemik harus menjadi dasar bagi eksekutif dalam perencanaan danpelaksanaan program pembangunan. Seperti halnya Tri Dharma yang selalu dipegang dan diperjuangkan civitas akademika.

"Nenek moyang kita meninggalkan budaya gotong royong, bersama-sama saling bantu meringankan beban orang lain. Demikian pula hendaknya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah harus bisa menjamin lahirnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua, bukan hanya masyarakat tertentu saja," kata Ridwan Hisjam.

Sayangnya, kata Ridwan Hisjam, perpustakaan sebagai salah satu tempat menyimpan hasil budaya epistemik kurang mendapat perhatian. Banyak perpustakaan, baik di perguruan tinggi maupun lembaga dibiarkan begitu saja. Bahkan, banyak akademisi yang tidak akrab dengan perpustakaan, apalagi dari kalangan politisi.

"Kita memiliki banyak sekali hasil kajian, tapi sebagian besar di antaranya hanya disimpan dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat, kecuali menambah panjang daftar curiculum vitae para penelitinya," kata Ridwan lagi.

Pernyataan lain disampaikan Dr. Sarwono M., Si., dosen senior dan Ketua Laboratorium Perpustakaan dan Arsip FIA UB ini mengatakan, budaya adalah tradisi lama yang sudah mendarah daging. Sedangkan epistemik merupakan cara berfikir akademik. Budaya epistemic, kata Sarwono, mestinya sanggup membawa kebenaran dan kemaslahatan bagi orang banyak. Sayangnya banyak penelitian dilakukan sesuai budaya epistemic, tetapi nanya berhenti pada tataran ilmiah. Belum bisa memberi manfaat bagi masyarakat.

"Banyak teori baru lahir dari budaya epistemik tapi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga tidak bisa berkontribusi bagi masyarakat. Sedangkan di perlemen budaya epistemik itu belum dilakukan secara maksimal, tetapi di parlemen itu yang dibutuhkan adalah manfaatnya bagi masyarakat, bukan pada penerapan budaya epistemiknya," ujar Sarwono. ❑

Sarasehan di UIN Suka Yogyakarta

Siti Fauziah Ajak Generasi Z Warnai Medsos dengan Nilai-nilai Luhur Bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PLT. DEPUTI Administrasi Setjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., mengungkapkan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa, terutama di era perjuangan, kiprah generasi muda memiliki peran yang sangat besar hingga kemerdekaan berhasil diraih.

Kini, tongkat estafet perjuangan dalam mengisi kemerdekaan berada di pundak pemuda yang disebut sebagai generasi Z. Siti Fauziah yang akrab di sapa Ibu Titi ini mengingatkan, peran generasi Z dihadapkan pada tantangan era modernisasi dan kecanggihan teknologi informasi, seperti media sosial/medsos (YouTube, Instagram, Twitter, Tiktok).

"Tidak dipungkiri, kemajuan teknologi tersebut memang mempermudah kehidupan. Antara lain, komunikasi makin mudah, hiburan makin beragam, belanja tidak harus ke toko konvensional tapi cukup melalui aplikasi di smartphone. Malah, saat pandemi Covid-19 melanda, hampir seluruh bidang kehidupan mengandalkan teknologi ini," katanya.

Hal tersebut disampaikan Siti Fauziah di hadapan puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta, peserta acara Sarasehan Kehumasan MPR RI, Menyapa Sahabat Kebangsaan.

Acara sarasehan bertema: 'Peran Mahasiswa dalam Mengisi Kemerdekaan', berlangsung di Convention Hall, Kompleks UIN Suka, Yogyakarta, Jumat (22/7/2022). Dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Suka DR. H. Abd. Syakur, M.Si mewakili Rektor, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Biro Humas Setjen MPR Budi Muliawan, SH., MH., sebagai narasumber dan dosen FISHUM UIN Suka Dr. Bono Setyo, M.Si., juga sebagai narasumber.

Lebih jauh, Ibu Titi menyampaikan bahwa yang harus mendapat perhatian lebih mahasiswa sebagai generasi Z terkait penggunaan medsos adalah kecanggihan teknologi yang memiliki dua sisi yang saling berseberangan. Pertama, medsos memiliki sisi manfaat. Contohnya, dengan teknologi tersebut memudahkan mahasiswa mencari materi tambahan ketika sedang melakukan riset atau memperlancar akses komunikasi mahasiswa yang sedang terkendala mengikuti kegiatan belajar tatap muka.

Kedua, medsos memiliki sisi negative, yakni bisa menjadi salah satu sarana untuk penyebaran berita bohong atau hoaks.

"Kita masih melihat maraknya penyebaran berita hoaks di medsos. Untuk itu, saya tekankan, manfaatkan medsos dengan baik dan bijak. Jadikan medsos sarana berbuat kebajikan, warnailah medsos dengan nilai-nilai luhur bangsa, seperti gotong royong, persatuan, kebhinnekaan serta toleransi dan hal baik lainnya," jelas Ibu Titi.

Terkait Sarasehan Kehumasan MPR, Ibu Titi menyampaikan bahwa acara tersebut adalah program Sekretariat Jenderal MPR dengan menyapa mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, untuk membahas dan mendiskusikan tentang pemuda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Pemilihan kata 'Menyapa Sahabat Kebangsaan' sendiri memiliki makna yang dalam, yakni MPR ingin menjadi sahabat mahasiswa.

"Dengan menjadi sahabat, kita akan saling berbagi, saling mengingatkan dan saling mendukung. Sebagai sahabat, MPR menjelaskan semuanya tentang apa itu MPR, tugas dan kewenangannya sehingga mahasiswa menjadi bertambah wawasannya. Sebaliknya, jika mahasiswa ada masukan, saran serta gagasan apapun yang baik demi MPR dan negara secara luas, maka tangan MPR terbentang lebar. Acara ini juga untuk mengukuhkan peran MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat." terangnya.

Gedung MPR, lanjut Ibu Titi, juga terbuka buat mahasiswa dan masyarakat umum untuk datang walaupun hanya sekedar berkunjung. "Jika ada keperluan ingin mendapatkan buku-buku yang berisikan informasi tentang MPR dan produk-produknya, mahasiswa bisa datang ke Perpustakaan MPR. Di sana ada beberapa buku yang tidak diperjualbelikan, hanya ada di Perpustakaan MPR," tambahnya.

Ibu Titi juga menambahkan, selain perpustakaan untuk mempermudah mahasiswa dan rakyat mengakses berbagai informasi seputar MPR dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital, MPR membuat aplikasi Buku Digital MPR yang bisa didownload melalui play store android dan membuat akun media sosial resmi lembaga MPR. ❑

Sarasehan Kehumasan MPR di Yogya

Potensi Generasi Z Harus Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kemajuan Bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEPALA Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas, Setjen MPR, Budi Muliawan, SH., MH., mengajak segenap komponen bangsa untuk merevitalisasi semangat Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

"Revitalisasi semangat kemerdekaan menemukan momen yang tepat di mana bangsa Indonesia sebentar lagi akan memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia," ujarnya saat menjadi narasumber Sarasehan Kehumasan MPR, Menyapa Sahabat Kebangsaan, 22 Juli 2022, di Convention Hall, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta.

Hadir dalam sarasehan yang bertema: 'Peran Mahasiswa dalam Mengisi Kemerdekaan' itu, Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM.; Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Suka DR. H. Abd. Syakur, M.Si.; Dosen FISHUM UIN Suka Dr. Bono Setyo, M.Si.; dan sekitar 100 mahasiswa yang datang dari berbagai fakultas dan jurusan.

Lebih lanjut Budi Muliawan mengatakan, peran generasi muda dalam kemerdekaan 17 Agustus 1945 sangat berarti dan penting. Para generasi muda mendorong kemerdekaan untuk segera dilakukan agar bangsa ini segera lepas dari segala bentuk penjajahan bangsa asing. "Semangat seperti inilah yang perlu direfleksikan oleh mahasiswa sebagai semangat untuk segera membangun dan memajukan bangsa," ujarnya.

Menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, itu peran generasi muda selalu mengukir sejarah perjalanan bangsa. Gerakan generasi muda, mahasiswa atau yang disebut juga sebagai kaum terpelajar mulai tumbuh pada tahun 20 Mei 1908, di mana pada waktu itu lahir organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo.

"Organisasi Budi Utomo lahir dari

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kepedulian mahasiswa STOVIA untuk bangkit sebagai bangsa yang punyai harkat, martabat, dan harga diri," tutur Budi Muliawan. Dari peristiwa inilah selanjutnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional merupakan titik balik perjuangan bangsa Indonesia yang awalnya mengandalkan perlawanan fisik, beralih lewat pergerakan organisasi.

Gerakan 20 Mei 1908 berkembang dan berlanjut semakin mengerucut pada 28 Oktober 1928 dengan diselenggarakannya Kongres II Pemuda. Dari kongres inilah muncul kesepakatan satu bangsa, nusa, dan bahasa Indonesia. "Hal demikian diikrarkan oleh berbagai organisasi pemuda yang memiliki latar suku, agama, dan bahasa," ungkapnya.

Meski bangsa Indonesia sudah merdeka, kata Budi Muliawan, generasi muda, mahasiswa, tetap kritis dan cerdas dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Hal demikian ditunjukkan dalam ikut mengubah sejarah perjalanan bangsa pada tahun 1966 dan 1998. "Dari sinilah mahasiswa berperan tidak hanya meletakkan pondasi persatuan bangsa, namun juga ikut berperan penting dalam perjalanan bangsa selain peran lainnya yang dilakukan di tengah masyarakat," paparnya.

Tantangan generasi muda, mahasiswa, dari waktu ke waktu terus berkembang dan tidak sama dengan masa-masa sebelumnya. Era kemajuan teknologi berbasis digital yang berkembang sangat cepat telah mewarnai dan memengaruhi segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kecanggihan teknologi membuat jarak dan waktu seperti tak ada sekat lagi. Semuanya serba cepat, mudah dan efisien. "Kemajuan teknologi seperti yang saat ini kita alami menjadi tantangan bersama," ujarnya.

Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dari survey dalam rentang waktu Februari-September 2020, didapati jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total populasi berjumlah 270,2 juta jiwa. Sementara, generasi milenial mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87%.

Dari klasifikasi yang ada, mereka yang lahir di rentang tahun 1997 hingga 2012 disebut sebagai Generasi Z. Budi Muliawan menyebut Generasi Z merupakan generasi yang sangat beruntung. Alasannya, sejak mereka lahir hingga mencapai usia matang, sudah melek teknologi karena sudah berada dalam era di mana teknologi digital tumbuh dan berkembang.

"Sebagian besar penduduk Indonesia adalah Generasi Z," ungkapnya. Generasi Z sebagai potensi sebesar akan mempunyai nilai lebih bila saling bersinergi antarsesama maupun bersinergi dengan elemen bangsa lainnya.

Sebagai generasi yang sudah melek teknologi, Generasi Z dalam keseharian sangat aktif berselancar di berbagai platform media sosial. Mereka memiliki lebih dari satu akun di medsos. "Potensi ini harus betul-betul disadari para mahasiswa dan pemuda," ujar Budi Muliawan. Sebagai generasi yang menguasai teknologi informasi, Generasi Z sangat mudah mengakses berbagai informasi. "Kita harap akses yang dilakukan bisa menambah wawasan, daya kreatif, imajinasi serta inovasi," tuturnya.

Apa yang dialami oleh Generasi Z, menurut Budi Muliawan, tidak dirasakan oleh generasi Baby Bommers. Generasi ini adalah orang yang lahir di tahun antara 1946-1964. Meski akses informasi yang diterima Generasi Baby Bommers sangat terbatas, sebagian besar berasal dari media cetak, seperti koran, namun generasi ini mampu melahirkan banyak orang hebat seperti pendiri Apple Inc. Steve Jobs dan pendiri Microsoft Bill Gates.

Untuk itu, dengan kelebihan teknologi, Generasi Z semestinya bisa melahirkan lebih banyak orang hebat dibanding generasi Baby Bommers. "Saya mengajak Generasi Z untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kalian sendiri," ujarnya. "Silahkan kalian bebas, asal tetap lakukan hal positif serta tetap bersandar kepada nilai-nilai luhur bangsa dan tidak pernah berhenti belajar,"katanya. ❑

Tingkatkan Reformasi Birokrasi, Setjen MPR Gunakan Aplikasi E-RB

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PLT. DEPUTI Bidang Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah, S.E., M.M., mengajak semua kelompok kerja tim Reformasi Birokrasi (RB) Setjen MPR untuk mendukung penggunaan aplikasi E-RB guna meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR. “Ayo kita konsen untuk menerapkan E-RB,” ujarnya.

Hal demikian disampaikan oleh Siti Fauziah saat memberi pengantar dalam ‘Rapat Koordinasi Tim RB dalam Rangka Implementasi Aplikasi E-RB Tahun 2022’. Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Samithi III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 29 Juni 2022, itu diikuti oleh para asesor, baik dari Asesor I, Asesor II, Asesor III, dan para asisten Asesor.

Lebih lanjut dikatakan oleh perempuan yang akrab disapa Ibu Titi itu, penggunaan aplikasi E-RB perlu dan penting, sebab saat ini semua aktivitas masyarakat dan pemerintahan sudah berbasis elektronik. “Saat ini eranya aplikasi elektronik”, tuturnya. Untuk itu, penggunaan aplikasi E-RB di lingkungan Setjen MPR harus didukung. Penggunaan aplikasi itu disebut mampu sebagai pengungkit nilai dari pelaksanaan RB.

Penggunaan E-RB, menurut perempuan asal Bandung, Jawa Barat, itu sangat bermanfaat. Dengan aplikasi itu, penerapan RB bisa dipantau secara langsung. Untuk itu, dia berharap, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada sudah *care* pada E-RB. Penggunaan aplikasi itu disebut bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan RB di Setjen MPR. “Toh bila hasilnya bagus, nanti juga akan kembali kepada para ASN,” ujarnya.

Menurut Kabag Organisasi dan Tata Laksana, Novinda Efrilla, S.E., M.M., dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR adalah: (1). Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; (2). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Lalu, (3). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; (4). Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024; (5). Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjuynya, (6). Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 5 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 Sekretariat Jenderal MPR RI; (7). Surat Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 67W tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2022; serta Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.”

Lebih lanjut, kata Novinda, aplikasi E-RB merupakan aplikasi berbasis web sebagai alat bantu dalam Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), khususnya dalam pengolahan data dukung pelaksanaan RB pada masing-masing area perubahan sesuai dengan form LKE PMPRB. Aplikasi itu, menurut Novinda, dapat dimanfaatkan untuk pengisian LKE PMPRB berdasarkan Permenpan Nomor 26 Tahun 2020, pengumpulan Data Dukung Pelaksanaan RB, monitoring Data Dukung yang telah dikumpulkan, dan monitoring Nilai Evaluasi RB secara Mandiri.

Asesor I Muhamad Jaya, S.IP., M.Si., dalam rapat koordinasi itu mengatakan, Setjen MPR telah selesai melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukan pengisian LKE dan

sudah menyampaikan kepada Kemenpan RB pada tanggal 15 Juni 2022. Tahapan mekanisme PMPRB dilalui secara baik, mulai dari pengisian LKE unit hingga LKE final diterima oleh Kemenpan RB.

Dalam rangka memudahkan pengisian LKE dan penyampaian kepada evaluator Kemenpan RB digunakan aplikasi E-RB. Aplikasi E-RB ini memiliki kriteria dan standar pengukuran/penilaian yang sama dengan PMPRB online yang dimiliki oleh Kemenpan RB. Penggunaan E-RB ini juga dilakukan dalam rangka penguatan reviu berjenjang, mulai dari asesor hingga Ketua RB dalam hal ini Setjen MPR. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan memastikan LKE telah diisi sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.

Setjen MPR menyampaikan, hasil PMPRB ini kepada Kementerian PAN RB melalui surat Sekretaris Jenderal MPR dengan memberikan alamat link akses aplikasi E-RB disertai dengan user id dan password sehingga evaluator dapat langsung mengakses LKE Setjen MPR. Pada surat penyampaian PMPRB tersebut kami juga melampirkan surat pernyataan bahwa proses PMPRB ini telah direview oleh Inspektorat yang ditandatangani oleh inspektur.

"Semoga apa yang kita upayakan ini berjalan lancar hingga pelaksanaan evaluasi verifikasi lapangan oleh evaluator dari Kemenpan RB dan memperoleh hasil yang baik pula", ujarnya. ❑

Red.-AWG

Setjen MPR Bersama Setjen DPD Hadir Dalam Gelar Penyembelihan Hewan Kurban DPR RI

SEKRETARIAT Jenderal MPR RI bersama Sekretariat Jenderal DPD RI hadir dalam acara gelar Penyembelihan Hewan Kurban yang dilaksanakan DPR RI, dalam rangka Idul Adha 1443 H, di halaman Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Kegiatan penyembelihan hewan kurban bersama Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) MPR dan DPD RI adalah yang pertama kali dilakukan. Hadir dalam acara tersebut Plt Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM.; Plh. Sekretaris Jenderal DPR RI Sumariyandono, serta perwakilan Setjen DPD RI.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman, Suratna, menyampaikan, jumlah hewan kurban yang disalurkan sebanyak 17 ekor sapi dan 12 ekor kambing. "Alhamdulillah tahun ini penerima hewan kurban meningkat, semoga peningkatan ini menambah keimanan kita dan ketaqwaan kepada Allah," ungkapnya.

Adapun 17 sapi yang disembelih adalah sapi kurban dari Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Komisi IV DPR RI, Sekjen DPR RI, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem, Fraksi PKS, dan Fraksi Gerindra. Juga dari Karo Umum Setjen DPR RI (Rudi Romansyah), Biro BMN, Korpri DPR dan Korpri DPD.

Sementara 12 kambing merupakan kambing kurban dari Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal, Biro Pemberitaan Parlemen, Bagian Gedung dan Instalasi DPR, Sekretariat Komisi VII DPR RI, beberapa karyawan dan partisipan Bank Syariah Indonesia (BSI). ❑

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Djarot Saiful Hidayat, Ketua Badan Pengkajian MPR

Biar Nanti Panitia Ad Hoc yang Memutuskan

PIMPINAN MPR menggelar Rapat Gabungan (Ragab) dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD serta mengundang Pimpinan Badan Pengkajian MPR. Agenda Ragab ini adalah mendengarkan laporan dari Badan Pengkajian MPR tentang hasil kajian mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), dan persiapan Sidang Tahunan MPR, serta persiapan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-77 MPR.

Ragab berlangsung di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 25 Juli 2022, itu dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua yaitu Ahmad Basarah, Yandri Susanto, dan Arsul Sani, serta Lestari Moerdijat yang mengikuti secara virtual. Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang hadir di antaranya Tb. Hasanuddin (PDI Perjuangan), Sodik Mujahid (Partai Gerindra), Idris Laena (Partai Golkar), Neng Eem Marhamah (PKB), Benny K Harman (Partai Demokrat), Tiffatul Sembiring (PKS), Jon Erizal (PAN), M. Iqbal (PPP), dan Tamsil Linrung (Kelompok DPD). Ragab juga diikuti Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat.

Ragab menyatakan dapat menerima laporan Badan Pengkajian yang telah menyelesaikan tugas melakukan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Ragab juga sepakat untuk menindaklanjuti hasil kajian Badan Pengkajian MPR dengan membentuk Panitia Ad Hoc (PAH). Bagaimana tanggapan Ketua Badan Pengkajian MPR terhadap hasil Ragab ini, berikut wawancara dengan Djarot Saiful Hidayat usai Ragab. Petikannya.

Bagaimana hasil dari Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD terkait dengan hasil kajian Badan Pengkajian MPR tentang PPHN?

Jadi, intinya adalah Badan Pengkajian MPR telah melaporkan hasil kajiannya tentang PPHN, baik tentang subtansi dari PPHN maupun pilihan bentuk hukum untuk PPHN. Alhamdulillah, laporan hasil kajian Badan Pengkajian MPR sudah diterima dengan baik oleh peserta Ragab. Jadi, dengan diterimanya laporan hasil kajian Badan Pengkajian MPR maka tugas Badan Pengkajian MPR untuk merumuskan atau mengkaji substansi dan bentuk hukum PPHN sesuai tugas dari Pimpinan MPR itu sudah selesai.

Laporan hasil kajian Badan Pengkajian MPR sudah kita serahkan secara resmi kepada Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD. Dalam Ragab juga disepakati bahwa laporan hasil kajian Badan Pengkajian MPR ini akan ditindaklanjuti dengan membentuk Panitia Ad Hoc (PAH). Pimpinan MPR akan menggelar Sidang Paripurna MPR untuk mendapatkan persetujuan pembentukan Panitia Ad Hoc. Tugas Panitia Ad Hoc ini adalah untuk menindaklanjuti laporan hasil Badan Pengkajian MPR yang sudah kita serahkan secara resmi kepada Pimpinan MPR.

Sebelum Ragab diadakan, Badan Pengkajian MPR juga sudah melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan MPR. Berdasarkan rapat konsultasi itu, maka disepakati bahwa laporan hasil kajian Badan Pengkajian MPR terkait PPHN perlu disampaikan dalam Rapat Gabungan (Ragab). (Ragab) Ini adalah tindaklanjut dari rapat konsultasi dengan Pimpinan MPR.

Rapat Gabungan ini untuk mengambil keputusan. Apa keputusan dari Rapat Gabungan ini? Semua sepakat untuk menindaklanjuti dengan membentuk Panitia Ad Hoc. (Soal pembentukan Panitia Ad Hoc ini), Tadi sudah disepakati secara bulat, musyawarah mufakat dalam Ragab.

Bagaimana dengan substansi dari PPHN itu sendiri?

Dalam laporan hasil kajian Badan Pengkajian MPR kita sampaikan terlebih dahulu adalah substansi PPHN. Seharusnya substansi PPHN itu lebih filosofis, memberikan arah, kebijakan, dan lebih bersifat *directive*, dan menjadi *blue print* pembangunan kita ke depan. Maka bahasanya (PPHN) adalah bahasa garis-garis besar. Mau dibawa kemana negara ini ke depan?

Kemudian PPHN juga didasarkan pada visi misi negara. Visi misi negara itu ada di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Visinya adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu menjadi visi kita. Arah bangsa kita menuju ke sana, yaitu bagaimana kita bisa mencapai visi dan misi Indonesia merdeka sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Nah, dari situ, kita menerjemahkan atau menurunkan visi misi itu ke dalam tiga ranah. Tiga ranah bidang pembangunan yang utama. *Pertama*, kita harus membangun karakter dan kualitas manusia Indonesia. Ini sebagai akarnya. *Kedua*, kita juga membangun kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan. Kalau ini berjalan dengan baik, maka, *ketiga,* kita bisa melakukan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Ini berupa bunga dan buah yang dipetik dan dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Lalu bagaimana dengan opsi bentuk hukum dari PPHN itu sendiri?

Karena PPHN ini menyangkut garis-garis besar saja maka akan membawa konsekuensi apa bentuk dan dasar hukumnya. Kalau bahasa PPHN seperti itu maka di mana PPHN itu ditempatkan? Nah, pilihan atau opsi bentuk hukum PPHN itu ada beberapa macam. *Pertama,* apakah PPHN itu dimasukkan langsung ke dalam UUD NRI Tahun 1945. Kalau dimasukkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945 maka akan susah. Ini berarti bisa dilakukan amandemen terus-menerus. Artinya, kita (Badan Pengkajian MPR) menolak plihan memasukkan PPHN ke dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, apakah dimungkinkan dalam bentuk Ketetapan (Tap) MPR. Ini sangat mungkin. Tetapi bagaimana? Ada dua cara, yaitu, pertama, melalui amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. Sekali lagi, amandemen terbatas hanya khusus pada pasal itu. Kedua, melalui Konvensi Ketatanegaraan. Badan Pengkajian kemudian menyepakati untuk tidak melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kita tidak mengambil jalan amandemen terbatas. Lalu, bagaimana dengan konvensi ketatanegaraan? Badan Pengkajian MPR menawarkan opsi ini agar bisa nanti dikaji dan dipertimbangkan.

Ketiga, mengatur PPHN dengan undang-undang. Pertanyaan, kalau PPHN diatur dengan UU apakah cocok? Sebab, substansi dan materi PPHN itu bukan bersifat teknokratis. Substansi dan materi PPHN lebih bersifat *directive*, lebih filosofis, dan garis besar. Oleh karena itu, opsi PPHN diatur dengan UU perlu juga dikaji. Semua opsi dan pilihan bentuk hukum PPHN itu akan menjadi bahan kajian dan pembahasan dan pekerjaan di Panitia Ad Hoc.

Bagaimana kecenderungan dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD terhadap hasil opsi atau pilihan bentuk hukum PPHN yang dikaji Badan Pengkajian MPR?

Kita bisa melihat kecenderungan terhadap opsi atau pilihan bentuk hukum PPHN itu pada saat dibahas secara mendalam di Panitia Ad Hoc. Jadi, Badan Pengkajian MPR tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Kami hanya memberikan hasil kajian. Kami tidak mengambil keputusan atas hasil kajian itu. Badan Pengkajian MPR hanya memberikan bahan. Nanti, Panitia Ad Hoc yang mengambil keputusan dalam sidang paripurna MPR.

Apakah pilihan bentuk hukum PPHN berupa Ketetapan MPR melalui Konvensi Ketatanegaraan sudah tepat melihat situasi kondisi sosial politik saat ini?

Melihat situasi sosial politik saat ini, kita tidak memilih atau melakukan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Badan Pengkajian MPR, baik pimpinan maupun anggota badan, sepakat bentuk hukum untuk PPHN jangan sampai dilakukan melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945. Sebab, waktunya tidak tepat dan situasinya juga tidak memungkinkan. Kalau dilakukan amandemen (terbatas) UUD NRI Tahun 1945 saat ini maka seperti membuka kotak pandora. Berbagai macam kepentingan bisa masuk. Karena itu kita tutup peluang amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Tapi perlu terobosan supaya PPHN ini bisa diterima dan menjadi payung bagi seluruh penyelenggara negara, bukan hanya presiden tetapi juga lembaga-lembaga tinggi negara. Karena itu, bentuk hukum PPHN harus dalam posisi di atas UU. Bagaimana kalau dengan sistem Konvensi Ketatanegaraan, atau dalam bentuk UU? Nanti biar Panitia Ad Hoc yang mengambil keputusan. ❑

Pancasila itu Nyawanya Anak-anak Bangsa

ARTIS cantik **Dessy Ratnasari** yang juga anggota Komisi X DPR RI sangat mengapresiasi Pancasila dijadikan sebagai mata pelajaran (maple) untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai mulai SD hingga perguruan tinggi pada Tahun Ajaran baru Juli 2022.

"Ini akan menjadi semacam sosialisasi dan internalisasi secara kontinyu yang terjadi kepada anak bangsa yang dimulai dari lembaga pendidikan. Karena terus diulang-ulang maka Pancasila akan menjadi dari jiwa dan prilaku peserta didik," kata Dessy saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Juni 2022.

Pancasila itu, ungkap pelantun everlasting song 'Tenda Biru' ini adalah nyawanya anak-anak bangsa, kalau kita mau bicara soal revolusi mental dan nasionalisme. ❑

DER

Dessy Ratnasari

Superhero Gatotkaca
Asli Indonesia itu Keren

PADA bulan Juni 2022 lalu, film superhero "Satria Dewa: Gatotkaca" tayang perdana di bioskop tanah ini. Bagi yang sudah nonton pasti tahu bahwa film yang sarat dengan adegan perkelahian. Tambah seru karena adegan film ini didukung visual effect dan CGI (Computer-Generated Imagery) karya berbagai studia di Indonesia yang bekerja di bawah Limine Studio, Jakarta.

Pemeran Gototkaca dalam film yang digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo ini dipercayakan kepada aktor **Rizky Nazar**. Begitu mendapat tawaran, Rizky Nazar mengaku, hal pertama dilakukannya adalah persiapan fisik demi memberikan aksi yang terbaik.

Dia menyata bersyukur, karena tim produksi memberikannya waktu yang cukup untuk melakukan persiapan, seperti mendalami karakter dan berlatih bela diri. "Tekad kami untuk kembali memperkenalkan tokoh superhero Indonesia. Untuk itulah, kami berharap lewat film Satria Dewa: Gatotkaca ini, superhero Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Risky Nasar

Hasna Nisrina Aisyah

Siswa Madrasah Raih
Perunggu Olimpiade Matamatika Dunia

KUALITAS pendidikan madrasah di Indonesia ternyata diakui dunia. Siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Tanah Laut, Kalimantan Selatan, **Hasna Nisrina Aisyah,** berhasil meraih Medali Perunggu pada Olimpiade Heat Round Hong Kong Internasional Mathematical Olympiade (HKIMO) 2022.

Di kompetisi ini, Hasna harus melewati lima tantangan topik utama dalam kejuaraan ini, yakni berpikir logis, aritmatika/aljabar, teori bilangan, geometri & kombinatorik. Olimpiade yang digelar secara online ini diikuti ribuan siswa SLTA dari 18 negara.

"Alhamdulillah, Saya bisa meraih medali perunggu, sebab saingannya berat dan dari berbagai negara. Prestasi ini bisa dicapai, menurut Hasna, berkat dukungan orang tua, kepala madrasah, guru pembina, serta atas doa dan dukungan seluruh guru dan tenaga kependidikan. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Wajah Baru Gedung Sarinah

Jadi Arena untuk Jalan-Jalan, Belanja, dan Belajar Sejarah

Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian kembali gedung perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat, setelah dua tahun berhenti beroperasi karena dirombak. Peresmian yang dilakukan pada Kamis (14/7/2022) itu turut disaksikan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

Renovasi terhadap Gedung Sarinah mulai dilakukan sejak akhir Juli 2020. Tidak semua bagian Gedung Sarinah mengalami pemugaran. Beberapa bagian gedung yang dirintis oleh Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, ini tetap dipertahankan. Seperti, eskalator pertama di Indonesia, relief Presiden ke-1 RI Soekarno, hingga kolam pantul.

Perombakan terhadap gedung pusat perbelanjaan pertama di Indonesia ini membuat Sarinah tampil semakin menawan. Visualnya terlihat fresh, modern, dan kekinian. Tetapi tidak menanggalkan identitasnya sebagai gedung bersejarah. Taman dan pepohonan yang tumbuh terawat di depan gedung, membuat Sarinah seperti oase di sekitaran bangunan bertingkat. Hijau dipandang, nyaman untuk bersandar ketika penat menempel di sekujur badan.

Realitas itu didukung bukti banyaknya pengunjung yang menikmati teras depan Sarinah dengan tenang. Beberapa orang tampak duduk menyendiri ditemani secangkir kopi. Ada juga warga masyarakat yang terlihat tengah berasyik masyuk berbagi kebahagiaan dengan pasangannya. Bahkan, sebagian di antaranya adalah warga negara asing, dan hanya mengenakan T-shirt beserta celana pendek. Itulah yang Majalah *Majelis* MPR RI dapati ketika berkunjung ke satu-satunya mal yang berstatus cagar budaya di Indonesia, beberapa saat lalu.

Saat itu siang menjelang sore, beberapa anak berseragam sekolah tidak diperkenankan masuk ke dalam mal. Seorang satpam mencegat mereka, dan meminta menunjukkan aplikasi peduli lindungi. Karena tidak bisa menunjukkan apa yang diminta, para pelajar itu berlalu sembari menggerutu.

Ketika kaki terayun menuju ke dalam Gedung, ada aroma yang berbeda dibanding tempat perbelanjaan pada umumnya. Harum wewangian tradisional begitu terasa. Ada aroma kopi, cengkeh, juga berbagai rempah yang menyemburkan aroma harum, menimbulkan ketenangan bagi setiap pengunjung.

Semakin ke dalam, ditemukan berbagai tenan kuliner milik para pengusaha UMKM. Mulai dari makanan berat, cemilan, hingga minuman. Di tempat tersebut juga bertaburan stan-stan batik dan kerajinan tangan lainnya, yang juga milik para pengusaha UMKM. Sedangkan komoditas barang dagangan lain bervariasi, seperti laiknya tempat belanja modern.

"Ini lumayan lengang, dibanding hari libur dan akhir pekan. Pada akhir pekan, biasanya pengunjung meluber sampai ke luar. Banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan Sarinah untuk mengisi waktu luang, sembari berkumpul dengan keluarga dan menikmati kuliner yang ada di sini," kata seorang penjaga tenan saat *Majelis* mengajaknya ngobrol.

Lebih Tinggi dari Monas

Salah satu yang menonjol dan membedakan Sarinah dengan tempat belanja lain adalah tersedianya banyak ruang publik untuk berinteraksi. Seperti, ruang terbuka amphitheater dan skydeck untuk pergelaran dan ekshibisi. Juga community gathering (pertemuan komunitas), yang sangaat nyaman dan jarang ditemukan di tempat belanja modern lainnya.

Selain tempat berbelanja dan jalan-jalan, Sarinah juga menyediakan salah satu sudut ruangannya untuk mengenalkan sejarah berdiri dan perkembangan mal tertua di Indonesia itu. Ada beberapa foto bersejarah

yang dipajang, mulai dari awal mula pemasangan tiang pancang pendirian Gedung Sarinah pada 23 April 1963 hingga proses renovasi yang baru selesai.

Di samping sudut galeri foto dipamerkan relief patung petani peninggalan Bung Karno. Sebelumnya, relief tersebut tersimpan di ruang mekanikal elektrikal dan baru ditemukan selama proses renovasi gedung sarinah. Relief tersebut terdiri dari sosok petani yang mengenakan caping, pedagang yang memikul barang bawaan berisi ikan, perempuan desa yang membawa bakul hasil panen, juga kerbau dengan bagian tanduk yang patah.

Tak jauh dari tempat tersebut juga dipamerkan kain Batik Garuda Nusantara (BGN). Pembuatan kain batik sepanjang 74 M ini diprakarsai Yayasan Tjanting Batik Nusantara. Dibuat dalam rangka perayaan 10 tahun pengakuan Unesco atas batik sebagai warisan budaya tak benda. Sekaligus bukti kebulatan tekad bangsa Indonesia melestarikan batik.

Batik ini dibuat, diawali oleh goresan lilin malam dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo pada 1 Agustus 2019, berbarengan dengan bulan Kemerdekaan Indonesia ke-74. Presiden Jokowi juga berkenan membubuhkan tanda tangannya. Serta memberinya nama Batik Garuda Nusantara.

Batik Garuda Nusantara dimulai dengan motif garuda (Gurdo), diselingi motif batik tradisional lainnya. Yaitu, Parang, Truntum, Sido Mukti, dan Sekar Sejagad. Batik Garuda Nusantara dikerjakan oleh 74 pembatik dari 8 sentra batik utama mewakili seluruh Indonesia. Yaitu dari Pekalongan, Bangkalan, Lasem, Solo, Pura Pakualaman, Cire bon, Jambi dan Bekulu. Batik ini dibuat bolak balik, yang berarti panjang keseluruhannya menjadi 148 meter. Atau lebih panjang dibanding tinggi Monas yang mencapai 132 meter. Batik Garuda Nusantara membutuhkan waktu pengerjaannya selama satu tahun. ❑

MBO

Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos

Papua Damai Bila Ada Dialog *dan Rekonsiliasi*

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAJAH dunia politik Indonesia kerap kali memberi kesan glamaour. Mobil mewah, baju dan sepatu mahal, duit banyak, hingga rumah megah. Selain itu, para politisi terkesan bebas berkunjung ke berbagai tempat, termasuk ke luar negeri. Karena itu, di setiap periode pemilihan umum selalu banyak wajah baru yang ikut berkontestasi, memperebutkan kursi legilatif, baik pusat maupun daerah.

Kesan tersebut tidak salah, tetapi juga tidak benar seluruhnya. Masih banyak anggota legislatif yang memilih hidup sederhana, tak pernah diterpa isu miring. Tidak melakukan korupsi dan jauh dari skandal wanita simpanan. Banyak anggota lagislatif yang memegang teguh agamanya dan hidup dekat dengan Tuhannya

Realitas dalam dunia politik itu diungkapkan oleh Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M. Kesos., (43), anggota MPR RI Kelompok DPD dapil Papua Barat, kepada Majalah *Majelis* saat menyambangi ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Mamberob yang juga Anggota Badan Pengkajian MPR mengungkapkan, anggapan bahwa politik adalah dunia yang glamour bisa diungkap dari chat wa yang ia terima. Setiap hari puluhan chat berisi berbagai permintaan bantuan mampir ke gawainya. Seperti minta bantuan bayar SPP, kredit motor, orang sakit, meninggal, hingga bantuan untuk membangun rumah.

Masyarakat menganggap layak menerima hadiah atau pemberian karena telah mengantar wakilnya ke kursi parlemen. Masyarakat juga menilai, anggota yang dipilihnya layak memberikan ucapan terima kasih dengan cara memenuhi permintaan yang dinginkan. Apalagi, pada saat bersamaan mereka memang membutuhkan uluran tangan, karena itu mereka mengirim permintaan, melalui chat wa atau SMS.

Bagi Mamberob, banyaknya chat permintaan bantuan itu sebagai konsekuensi dari pilihannya terjun ke dunia politik. Semua itu adalah risiko yang harus diterima sebagai wakil daerah yang dipilih oleh rakyat. Ia juga sadar kondisi tersebut terjadi karena masyarakat di daerah yang diwakilinya masih jauh dari kata sejahtera. Bahkan, kemiskinan yang mendera Papua Barat membuat provinsi tersebut selalu menempati urutan pertama atau kedua dari daerah termiskin di Indonesia.

Mamberob mengakui, tidak semua permohonan bantuan bisa dipenuhi. Tetapi, ia tidak pernah melupakan dukungan dari masyarakat yang memilihnya. Sesekali ia membawakan buah tangan bagi mereka. Apalagi memang, tidak semua pendukungnya mengharap bantuan. Cukup menghadiri undangan yang disampaikan, mereka pun merasa senang.

"Secara geografis daerah Papua Barat sangat sulit untuk dijangkau. Apalagi, posisinya juga jauh dari ibukota. Tetapi, kemiskinan yang menyelimuti Papua juga disebabkan trauma masa lalu. Atau sejak Papua berintegrasi dengan NKRI," kata Mamberob.

Situasinya, kata Mamberob, semakin tidak bagus karena pemerintah memilih opsi bersenjata dalam menghadapi aksi penolakan

terhadap integrasi. Praktis, paska Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 14 Juli 1969 situasi di Irian Jaya (Papua) makin tidak kondusif. Padahal, masa yang menolak integrasi jauh lebih sedikit dibanding yang mendukung untuk bergabung dengan NKRI.

Saat ini gerombolan sipil bersenjata yang kerap di juluki Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB), dan teroris, itu sebagian di antaranya adalah keturunan orang-orang yang dulu menolak integrasi. Mereka terus membuat keonaran, karena menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, saat orangtuanya mendapatkan kekerasan.

"Kondisinya semakin rumit karena istilah yang disematkan pada mereka. Istilah OPM, KKB dan teroris menjadi stigma yang jelek bagi orang Papua. Sementara pemerintah tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah kelompok yang mengalami trauma di masa lalu," kata Mamberob lagi.

Gus Dur

Meski begitu, Mamberob percaya, masih ada jalan untuk memperbaiki kekacauan yang selama ini terjadi di provinsi paling Timur Indonesia itu. Yaitu, dengan membuka pintu dialog, antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Terutama menyangkut penyelesaian sejarah kelam masa lalu.

Dialog diperlukan, karena orang Papua membutuhkan jaminan bahwa kekerasan masa lalu tidak akan pernah terjadi lagi. Masyarakat Papua juga menginginkan jaminan keadilan datang dari pemerintah, sebelum beranjak memikirkan masalah kesejahteraan.

"Uang yang mengalir melalui kran otsus penting, tapi bukan segalanya. Harus ada rekonsiliasi dan dialog. Ada pengakuan dan saling memaafkan, baru kita bisa memulai pembangunan," kata Mamberob lagi.

Saran untuk melakukan dialog dan rekonsiliasi ini sudah

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

didengungkan berbagai pihak, termasuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sayangnya, masukan tersebut tidak pernah direalisasikan. Hanya Gus Dur satu-satunya presiden dalam sejarah NKRI yang dianggap berani mengajukan tawaran dialog dan rekonsliasi kepada masyarakat Papua.

Gus Dur datang ke Papua dan mengabulkan tuntutan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Gus Dur juga tegas mengatakan, siap memberikan apapun kepada Masyarakat Papua, asal bukan kemerdekaan untuk memisahkan diri dari NKRI. Karena itu, Gus Dur menjadi satu-satunya presiden yang diakui oleh orang Papua sebagai pimpinan bangsa dan negara Indonesia.

"Beliau berani datang ke Papua, beliau juga tegas dan jelas memenuhi tuntuntan masyarakat mengembalikan dari nama Irian Jaya menjadi Papua sebagai identitas orang asli di sana. Gus Dur bilang kamu boleh meminta semua hal, tapi tidak boleh minta merdeka," kata Mamberob lagi.

Menyangkut dugaan pihak asing ikut memperburuk kondisi keamanan di Papua, Mamberob mengingatkan, agar masyarakat tidak selalu menyalahkan pihak luar. Menurutnya, konflik di Papua adalah persoalan rumah tangga bangsa Indonesia sendiri. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan oleh internal bangsa Indonesia.

Sampai saat ini, kata Mamberob, belum ditemukan tanda-tanda yang pasti menyangkut campur tangan asing pada persoalan Papua. Di Papua, tidak pernah ada kabar orang membagi-bagi duit. Apalagi berbentuk mata uang asing. Bahkan, untuk menukar mata uang asing di Papua, apalagi dalam jumlah yang besar sangatlah sulit.

"Jangankan campur tangan asing, wartawan asing mau masuk ke Papua saja sulit. Hanya karena sekarang era digital, tanpa wartawan asing pun berita dari Papua bisa terekspos. Dan, itu membuat kabar Papua menjadi konsumsi dunia internasional," kata Mamberob lagi.

Daripada menuduh ada tanga-tangan asing lebih baik fokus pada beberapa oknum, baik ASN, Polisi hingga anggota TNI yang memperjual belikan senjata dan amunisinya kepada KKB. Karena, bukti itu makin mempersempit peluang adanya campur tangan asing pada konflik yang selama ini terjadi di Papua.

"Harus diwaspadai kemungkinan adanya pihak yang memang menghendaki Papua terus berkonflik, agar perdagangan senjata terus berjalan dan bantuan anggaran untuk Papua selalu tersedia. Kalau papua aman-aman saja maka lalu lintas anggaran itu tidak akan ada lagi," tegas Mamberob.

Makan Beras

Mamberob adalah satu dari sedikit generasi muda asal papua yang beruntung. Diusianya yang relatif muda ia sudah menjadi anggota MPR dari Kelompok DPD. Keanggotaannya ini diresmikan pada 2017 melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu. Di MPR, oleh kelompok DPD, Mamberob diberi amanat menjadi anggota Badan Pengkajian.

Keberuntungan Mamberob bukan sekali ini saja diraihnya. Sejak lama hidup pria kelahiran Teminabuan, Papua Barat, 16 Maret 1979, ini sudah bergelimang keberuntungan. Sejak kecil, putera pasangan Salmon

Albert Rumakiek dan (alm) Yeni Mahowai ini sudah terbiasa makan nasi. Padahal, kala itu padi merupakan bahan pangan yang dianggap sangat terhormat oleh masyarakat Papua. Hanya saat tertentu saja dia merasakan makan ubi atau makanan lain hasil kebun dan ladang.

"Dulu, jalan ke kampung saya rusak berat kalau musim hujan, lumpurnya sangat dalam sehingga tidak ada kendaraan yang mengantar beras jatah Bapak selaku guru dan kepala sekolah. Dalam situasi begitulah, saya terpaksa makan ubi atau hasil ladang yang lain," kata Mamberob lagi.

Keberuntungan Mamberob tidak hanya soal makanan. Sebagai anak asli Papua, ia juga beruntung karena mengenyam pendidikan dengan baik. Ia sudah bepergian ke kota-kota besar, ketika teman-temannya di kampung masih berkutat dengan keterbelakangan. Pada saat menjadi mahasiswa, Mamberob dipercaya memimpin Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Dan sebelum ikut kontestasi anggota DPD pada 2014, Mamberob dipercaya menjadi tenaga ahli di DPR RI.

"Sejauh ini apa yang saya peroleh tak lepas dari kerja keras yang selalu saya lakukan. Ketika teman-teman sebaya bermain, saya belajar. Saya juga harus berjalan kaki berpuluh kilometer ke sekolah. Saat teman-teman mahasiswa seangkatan bersenang-senang saya sibuk dalam organisasi. Jadi seumur hidup, saya tidak pernah bersantai-santai. Saya selalu bekerja keras," kata Mamberob lagi.

Mamberob meyakini, bahwa kesenangan dan keberhasilan hanya bisa diperoleh dengan bekerja keras. Seperti yang dilakukan negara-negara yang saat ini menjadi negara maju. Mereka sudah bekerja keras sejak berabad-abad lamanya.

Menyangkut keikutsertaan dalam pemilihan anggota legislatif, yang lebih memilih melalui jalur DPD dibanding DPR RI, Mamberob berdalih, untuk saat ini peluangnya menjadi anggota DPD lebih besar daripada DPR. Alasannya, kursi DPR di Papua Barat lebih kecil dibanding DPD. Selain itu, mekanisme kontestasi pemilihan DPD juga lebih sederhana, karena ia tidak pernah menjadi kader salah satu partai politik pun.

"Seperti umumnya politisi, saya juga memiliki cita-cita tinggi. Bukan sekedar anggota DPR, bupati atau gubernur. Tetapi saya melihat, saat ini DPD merupakan posisi yang paling mungkin saya peroleh," kata Mamberob lagi. ❑

MBO

Biodata

Nama lengkap : **Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si.,M.Kesos**

Tanggal lahir : Teminabuan 16 Maret 1979

PENDIDIKAN:

2015 : Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Jakarta
2004 : Lulus Sekolah Tinggi Teologi Kijne, Jayapura
1997 : Lulus SMU 2 Sorong
1994 : Lulus SLTP Negeri Beraur, Sorong
1991 : Lulus Sekolah Dasar YPK Euchairstia Klamono, Sorong

PENGALAMAN ORGANISASI:

2001 – 2002 : Ketua Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kijne, Jayapura
2002 – 2004 : Wakil Sekretaris BPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jayapura
2004 – 2006 : Sekretaris BPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jayapura
2006 – 2008 : Sekretaris Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
2008 – 2010 : Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
2010 – 2020 : Anggota Dewan Yayasan Bina Darma, Salatiga
2014 – 2018 : Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia

PENGALAMAN KERJA:

2012 – 2017 : Staf Ahli di Dewan Perwakilan Rakyat
2017- sekarang : Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat.

Pastikan Forum G20 Menjadi Solusi Berbagai Tantangan

SEJAK Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China (RRC) dan telah menyebar keseluruh dunia , 188 negara yang mengonfirmasi terkena virus, termasuk Indonesia, dan sekarang telah memasuki tahun ketiga dan kita tidak tahu kapan wabah ini berakhir. Di samping masalah Covid-19, kita juga dihadapkan dengan masalah Dampak Perubahan Iklim Global.

Dampak dari wabah dan perubahan iklim global ini sama-sama telah kita rasakan di semua aspek kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahananan kemamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Di bidang ekonomi selama dua tahun, 2020-2021, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2.07 % (2020), dan pertumbuhan positif 3.69 % (BPS, 2021) . Semua sektor mengalami kontraksi kecuali sektor pertanian/agibisnis, karena ini menyangkut deman pangan tetap meningkat, meskipun tetap tumbuh positif tetapi tidak seperti yang diharapkan. Pada tahun 2020 lalu, PDB sektor pertanian tercatat sebesar 1,75%, dan 1.35 % (triwulan III, 2021). Salah satu yang menjadi andalan di sub sektor pangan (padi dan jagung), sub sektor perkebunan (kelapa sawit). Akibat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah ini, salah satu dampaknya adalah penganguran.

Bank Dunia telah mengingatkan Presiden RI, Bpk Jokowi, bahwa Pandemi Covid-19 menciptakan luka dalam bagi dunia, termasuk Indonesia. Meski Covid-19 sudah mulai turun, akan tetapi luka tersebut butuh waktu yang cukup lama untuk disembuhkan. Salah satunya mengenai pengangguran. Demikianlah diungkapkan Habib Rab, Kepala Ekonom Bank Dunia regional Indonesia dan Timor Leste saat menyampaikan laporan prospek ekonomi Indonesia secara virtual, Kamis (16/12/2021) ."Dampak jangka pendek dari covid ini ada dan sudah dilihat dan ada risiko dampak yang akan bertahan lama, terkait pengangguran meningkat dan penurunan investasi. Kita lihat ada penurunan pertumbuhan potensional terus menurun," jelasnya.

Untuk itu Pemerintah untuk lebih fokus bagaimana mengatasi pengangguran karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran pada Agustus 2021 mencapai 9,1 juta orang atau secara persentase mencapai 6,49%. Sementara angka pengangguran sebelum terjadi pandemi atau pada 2019 mencapai 7,1 juta. Artinya, ada 2 juta orang yang menganggur karena pandemi Covid-19

Di samping itu kita juga antisipasi peringatan BMKG akan dampak perubahan iklim, baik La-Nina maupun El-Nino yang menimbulkan masalah kebanjiran, kekeringan, dan kebakaran lahan dan hutan, serta kabut asap dan tanah longsor. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan, potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim hingga 2024 bisa mencapai Rp 544 triliun. Rinciannya, sektor pesisir dan laut mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp 408 triliun, air Rp 28 triliun, pertanian Rp 78 triliun, dan kesehatan Rp 31 triliun.

Selanjutnya pada sesi penutupan KTT G20 Roma telah dilakukan penyerahan posisi keketuaan atau Presidensi G20 dari Italia ke Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 sampai setahun ke depan." Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia memegang Presidensi G20 pada tahun 2022 setelah G20 terbentuk sejak tahun 1999. Indonesia telah menjadi anggota sejak awal G20 dibentuk dan menjadi satu-satunya Negara dari ASEAN yang tergabung untuk mewakili kelompok negara berkembang dan kawasan Asia Tenggara.

Dalam sejarahnya, G20 telah menjadi forum utama kerjasama

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI

ekonomi internasional yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan global. Forum yang dimotori oleh negara-negara dengan perekonomian pesat di dunia ini juga telah menghasil berbagai solusi nyata, contohnya mendukung dunia kembali tumbuh serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial pada krisis keuangan global tahun 2008. Selain itu, G20 juga berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui penangguhan pembayaran utang luar negeri pada negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan Covid-19 sebesar >5 triliun USD (Riyadh Declaration), serta kontribusi lainnya dalam penanganan pandemi Covid-19, dan penanganan isu-isu lainnya termasuk perdagangan, dampak perubahan iklim, risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon dan mengim-plementasikan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia memastikan bahwa forum yang dibawa pada G20 Tahun 2022 akan mencerminkan pemecahan solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi dunia melalui upaya dalam menghasilkan solusi nyata untuk mengatasi tantangan tersebut. Untuk itu, komitmen pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah iklim ini harus dibuktikan dengan program nyata. Salah satunya adalah pengembangan agribisnis, di samping untuk adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim global juga untuk mengatasi pengangguran. Fokus komoditinya adalah tanaman pangan (padi jagung), ternak unggas, dan komoditi ekspor kelapa sawit, karet, coklat, hortikultura, terutama tanaman hias yang jelas sudah ada pasarnya. Karena sektor ini tealah terbuksi tetap tumbuh di tengah badai krisis, mampu menahan inflasi, menyediakan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan per kapita/pemerataan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Masalahnya adalah tinggal bagaimana membuat kebijakan secara berkualitas, dengan fokus komoditi, kawasan, dan senergi terutama kebijakan moneter, pinjaman dengan bunga rendah dan ada skim selain KUR, Fiskal (APBN, penguatan SDM)), dan investasi, penyederhanaan perizinan, pemanfatan lahan terlantar.

Di samping masalah dukungan kebijakan moneter, fiskal dan investasi dalam upaya pengembangan agibisnis, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam aspek Entrepreneurship, Leadership, Management dan Teksnis untuk generasi petani milneal, melalui pengutan kelembagaan koperasi petani sangat penting . Untuk itu pelatihan untuk meningkatkan kompetensi generasi mileneal untuk menguasai ke empat aspek materi tersebut menjadi prioritas. Selanjutnya dengan SDM yang kompeten ini diarahkan dan disalurkan untuk menjadi pengurus koperasi dalam rangka memberikan pelayanan prima; penyediaan sarana, pembiayaan, informasi, teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil petani.

Terakhir, hal yang tidak kalah penting adalah penguatan modal koperasi di setiap kecamatan, dengan memberikan pinjaman modal kerja koperasi minimal 15 M/koperasi untuk kawasan skala ekonomi 1.600-3.200 Ha dengan bunga rendah atau sistem bagi hasil. Tercatat di Kementrian Pertanian, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) 4.697 unit berupa koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian dibutuhkan anggaran Rp 70.5 T . Sumbernya bisa dari APBN, KUR, pola Kemitraan dengan sumber permodalan diluar perbankan dengan prinsip sukses peneyaluran, pemanfaatan dan pengembalian.

Harapannya dengan pengembangan Agribisnis yang fokus komoditi, kawasan, dan sinergi penanganannnya yang dikoordiir oleh Menko Bidang Pereknomian, Insya Allah masalah pengangguran dan dampak perubahan iklim global dapat diatasi dengan baik. ❑

Agar Kebal dari Paham Radikal

Di tengah kesibukan sebagai Ketua MPR, Bambang Soesatyo, tetap produktif menulis. Buktinya buku ke-24 karyanya dirilis. Kali ini ia memberi judul bukubnya dengan situasi yang trend di masa pandemic Covid-19, yakni Vaksinasi. Vaksinasi ideology, menurutnya, penting agar bangsa Indonesia kebal dan terputus dari mata rantai radikalisme.

VAKSIN dan vaksinasi merupakan kata yang sering kita dengar di masa pandemi Covid-19. Kedua kata tersebut merupakan usaha atau langkah dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat agar suntikan vaksin yang dibenamkan ke dalam tubuh manusia mampu memberi kekebalan sehingga memutus rantai dan terhindar dari penularan virus Covid-19. Vaksin dan vaksinasi pun dilakukan secara masif oleh pemerintah, dari Sabang sampai Merauke, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Kedua kata tersebut juga digunakan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam bukunya. Politisi Partai Golkar itu untuk ke-24 kalinya menerbitkan kumpulan tulisan. Nah, kali ini himpunan tulisannya itu diberi judul *Vaksinasi Ideologi, Melawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa.*

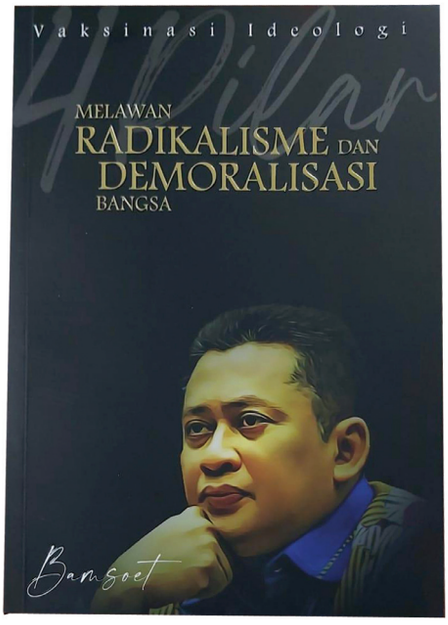

Bamsoet menggunakan judul tersebut, sebab merasa prihatin atas apa yang terjadi pada saat-saat ini. Di halaman 13 dia mengungkapkan, merasa terusik karena kewajiban warga negara menyanyikan Indonesia Raya dipersoalkan. Belum reda masalah itu, muncul lagi pandangan sesat lainnya, yakni menyalahkan nilai dan makna sungkem kepada orangtua. Dari sinilah, menurut pria yang saat ini menjadi Ketua Umum IMI itu, ruang publik menjadi bising dan banjir ujaran kebencian. Persepsi masyarakat Indonesia yang ramah, santun, dan toleran menjadi tercoreng karena ada kelompok yang memanfaatkan media sosial untuk menyemburkan ujaran kebencian, diskriminasi, menyebarluaskan hoaks, serta penipuan.

Seperti di halaman 7 bukunya, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, selain menggencarkan vaksinasi kesehatan, memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR juga menggencarkan vaksinasi ideologi melalui sosialisasi Empat Pilar MPR untuk mencegah, sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa.

Buku yang ber-cover gambar dirinya dengan suasana temaram, isi bukunya dibagi dalam 5 bagian. Isi-isi dari tulisan itu menggambarkan sosialisasi Empat Pilar sejak 23 Februari 2020 hingga 16 Mei 2022. Sosialisasi yang dilakukan, seperti yang ada di buku itu, dikemas dengan berbagai metode, bentuk, cara, dan ragam, dan ditujukan ke berbagai segmen masyarakat, seperti dengan SMA Dea Malela, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Tak hanya dengan lembaga atau kelompok masyarakat, Bamsoet melakukan vaksinasi ideologi juga dengan menggandeng artis, selebgram, dan influencer untuk menguatkan kekebalan masyarakat dari radikalisme dan demoralisasi bangsa. Dalam halaman 89, diceritakan dirinya nge-vlog bareng artis Irfan Hakim. Dalam keterangan, acara itu sekaligus melakukan sosialisasi. Kenapa para artis, termasuk Raffi Ahmad, Jessica Iskandar, Atta Halilintar, dan Baim Wong dilibatkan dalam sosialisasi? Diterangkan di halaman itu, kerjasama untuk menunjukkan kepedulian para selebritas terhadap kondisi bangsa dan negara. Di balik kehidupan mereka yang disorot lampu popularitas dan dunia glamor keartisan, mereka masih mau menyiapkan waktu membuat konten Empat Pilar dengan pesan persatuan untuk seluruh anak bangsa.

Bila vaksinasi dalam dunia kesehatan dilakukan secara berlanjut, yakni vaksin pertama, kedua, ketiga, bahkan rencana ada yang keempat, maka vaksinasi ideologi ini menurut Bamsoet perlu terus dilakukan. Dijelaskan di halaman 43, vaksinasi ideologi dengan Sosialisasi Empat Pilar perlu karena untuk membangun imunitas jati diri dan karakter kebangsaan agar mampu menangkal berbagai ancaman virus ideologi. Agar vaksinasi yang dilakukan menarik, 'tidak membuat orang takut', maka cara yang dilakukan tidak boleh hanya dengan kegiatan konvensional, seperti seminar dan diskusi. 'Vaksinasi' yang dilakukan harus dikembangkan lebih kreatif, dan inovatif, seperti melalui kesenian, stand up comedy, dan lain sebagainya.

Ditegaskan dalam buku itu, vaksinasi ideologi ini akan terus dilakukan untuk mencegah adanya potensi perpecahan bangsa dari gerakan radikalisme, intoleran, dan berbagai serangan ideologi transnasional. ❑

AWG

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI
DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI